

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA
DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI KREATIF
(Studi Kasus di Enam Sentra Wisata di Jawa Barat)**

Laporan Penelitian Kelompok

Mendapat Bantuan Dana dari BOPTN UIN SGD Bandung

Tahun Anggaran 2014



Peneliti:

Ketua: Endah Ratna Sonya, M.Si.

Anggota: M. Taufiq Rahman, Ph.D.

Anggota: Dr. Muhammad Zuldin, M.Si.

Anggota: Kustana, M.Si.

**Pusat Penelitian
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung
2014**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan akan banyaknya potensi kreatif masyarakat yang harus digali secara optimal melalui pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup. Penelitian ini mengambil kasus di Saung Angklung Udjo Bandung, Kawasan Sentra Bunga Cihideung Lembang-Bandung Barat, Keraton Kasepuhan Cirebon, Sentra Golok Galonggong Tasikmalaya, Sentra Ikan Rancapanggung Cililin, dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Melalui berbagai aktivitas tersebut, masyarakat di sekitar kawasan tersebut semakin meningkat kehidupan ekonominya dan juga turut aktif menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan budaya. Penelitian ini mengidentifikasi pengembangan potensi yang belum digarap secara optimal harus menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengoptimalkan manfaat untuk masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari enam lokasi penelitian dapat dirinci bahwa empat lokasi yaitu Saung Angklung Udjo, Wisata Bunga Cihideung, Sentra Golok Galonggong, dan Sentra Ikan Rancapanggung itu masuk dalam model pembangunan masyarakat lokal. Karakteristik utamanya adalah aktor utama yang merintis arena tersebut adalah berdasarkan inisiatif masyarakat lokal. Dalam terminologi pembangunan sosial, itu disebut sebagai pembangunan model *bottom up*. Sementara itu, Keraton Kasepuhan Cirebon dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak berada pada ranah perencanaan sosial. Model ini tidak lagi berbasiskan inisiatif lokal, tetapi dibangun atas perencanaan sosial yang dilakukan oleh berbagai kekuatan formal maupun informal. Keduanya menjalin sinergi yang harmonis dalam mendinamiskan peran sosial Keraton Kasepuhan Cirebon dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Kata Kunci : *Community Development*, ekonomi kreatif, pembangunan berkelanjutan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Urgensi Penelitian	12
1.6. Kerangka Penelitian	12
1.7. Jadwal Pelaksanaan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pembangunan Masyarakat	19
2.2. Model-model Pembangunan Masyarakat	26
2.3. Masyarakat dan Budaya	31
2.4. Lingkungan dan Pariwisata	34
2.5. Ekonomi Kreatif	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode	49
3.2. Teknik Pengumpulan Data	49
3.3. Teknik Analisis Data	49
3.4. Validitas dan Reliabilitas Data	50
3.5. Obyek Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pemberdayaan Masyarakat di SAU	62
4.2. Pemberdayaan Masyarakat di Wisata Bunga	69
4.3. Pemberdayaan Masyarakat di Keraton Kasepuhan	74
4.4. Pemberdayaan Masyarakat di Sentra Golok Galonggong ...	80
4.5. Pemberdayaan Masyarakat di Sentra Ikan Rancapanggung	84
4.6. Pemberdayaan Masyarakat di TNGHS	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Implikasi Kajian	99
5.3. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Syukur sebesar-besarnya kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan izin-Nyalah penelitian ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini menampilkan bahwa masalah-masalah mendasar di dalam pengembangan masyarakat masih tetap ada dan belum sepenuhnya tertuntaskan. Masalah transformasi sosial yang menjadi fokus tema kajian ini belum betul-betul terlaksanakan, apalagi jika perkembangannya tidak dilakukan intervensi dari berbagai pihak. Dengan kajian ini kita dapat melihat bahwa pemikiran untuk organisasi masyarakat masih harus diraba-raba oleh umat manusia. Oleh karena itu, jawaban-jawaban dari para akademisi sangat perlu untuk diteruskan kepada masyarakat demi perkembangan yang lebih baik lagi.

Demikianlah, maka semoga upaya perbandingan model-model pengembangan masyarakat ini menjadi salah satu pergulatan pemikiran manusia untuk perbaikan dirinya sendiri. Dan dari enam sentra budaya dan wisata yang dibahas di sini akan nampaklah bagaimana latar belakang budaya yang berbeda-beda mengajukan konsep untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk kajian ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN SGD Bandung, Dr. Sahya Angara, Drs., M.Si. atas izin dan dukungan yang diberikannya kepada kami untuk melakukan penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Ahmad Ali Nurdin, Ph.D.; Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Dr. H. Encup Supriatna, Drs., M.Si.; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Hamzah Turmudi, M.Si.; yang telah memberikan petunjuk, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan kajian ini. Kemudian, kami pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Pusat Penelitian UIN SGD Bandung, Dr. Deden Effendi, M.Ag. atas bantuan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat terselenggara. Terima kasih pun kami sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam urusan keuangan UIN SGD Bandung, karena penelitian ini didanai oleh DIPA-BOPTN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2014.

Akhir sekali, penghargaan untuk keluarga tersayang di rumah kami masing-masing yang dengan sabar telah memaklumi sibuknya waktu tersita oleh penelitian ini. Semoga jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Amien.

Bandung, 20 Nopember 2014

Para Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak Indonesia dipimpin rezim Orde Baru, Indonesia telah melakukan rekonstruksi di berbagai bidang yang mengarah pada “modernisasi” dengan slogannya yang dikedepankan “*nation building*” atau pembangunan nasional. Berpijak dari pembangunan di berbagai bidang melalui program PELITA (Pembangunan Lima Tahun)-nya, para pemimpin Orde Baru menghendaki terwujudnya “suatu masyarakat adil dan makmur”, meskipun pada dataran realitanya masih adanya jurang kesenjangan. Terlepas dari analisis tentang kesenjangan tersebut -- tekad untuk menangkap inspirasi tuntutan hati nurani rakyat -- maka terwujudlah penyusunan program-program pembangunan. Perwujudan satu PELITA ke PELITA yang lain, hakikatnya dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia “tinggal landas” (Mustari & Rahman, 2010).

Pembangunan yang sedang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, merupakan varian dari modernisasi, industrialisasi dan perubahan sosial. Sedangkan pembangunan, di dalamnya termasuk proses dinamis yang merupakan usaha ke arah tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Tetapi, suatu pembangunan yang baik dan terarah pun dapat menciptakan problem-problem pembangunan yang lain. Pendekatan terhadap problematika pembangunan dan cara penyelesaiannya (*problem solving*), pada gilirannya melahirkan pemikiran strategi pembangunan. Di samping itu juga, pemerintahan Orde Baru dalam pembangunannya lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan pengembangan sosial. Penekanan yang demikian ini tidak sedikit pula mengalami hambatan-hambatan, seperti halnya masalah jumlah penduduk, pengelolaan sumber-sumber alam, pertumbuhan ekonomi dan pendanaan pembangunan, perkembangan ekonomi dan pemerataan, kelembagaan dan ekologi internasional. Pada dasarnya permasalahan tersebut menimbulkan berbagai arah dan kecenderungan dalam perubahannya (Tjokroamidjono, 1982: 59-60).

Pada masa Orde Baru, “dualisme” pembangunan di Indonesia seperti yang disebut Boeke dalam bukunya *Economics and Economic Policies of Dual Society* (1953) masih tetap terjadi. Dalam teorinya, Boeke menyebutkan bahwa dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Bentuk yang paling sering diketemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris pra-kapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek. Masyarakat lokal kita memang berada di tengah-tengah percaturan pembangunan tersebut.

Demikianlah, maka pembangunan desa pun mengalami kebuntuan, sejalan dengan krisis ekonomi, sosial, dan politik Indonesia secara keseluruhan sejak akhir tahun 1990-an hingga saat ini. Dalam masalah pertanian, misalnya, didapati sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional telah menurun, sementara jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, terutama di pedesaan, hampir tidak menurun. Hal itu disebabkan kerana lahan pertanian yang semakin sempit, sistem penyakapan (*tenancy rates*) yang belum adil, dan teknologi pertanian yang belum modern. Kemunduran drastis di bidang pertanian ini telah membuat Indonesia sebagai negara ASEAN yang menjadi pengimpor makanan terbesar saat ini (Widodo dalam *Masyarakat Indonesia*, 2005). Selain itu, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, hingga pemerintah menganggapnya sampai di titik maksimum, diramalkan akan menimbulkan lagi lonjakan jumlah orang miskin. Misalnya, kajian Bank Dunia mendapati korelasi antara lonjakan harga beras dengan lonjakan jumlah orang miskin (Pambudy dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Pelbagai kebijakan dan rencana pemerintah bukannya tidak ada. Kebijakan revitalisasi pertanian sudah pun dicadangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Juni 2005, tetapi dipandang bahwa kebijakan ini “terkesan hanya sebagai retorika, belum terlihat implementasi dan realisasinya.” Demikianlah, sehingga akibatnya tujuan pembangunan nasional sekarang dapat dianggap sebagai “semakin jauh dari pertanian dan pedesaan.” (Pambudy dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Memang secara umum, agenda politik Indonesia, yang sejak era Reformasi (pasca kejatuhan Soeharto) bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, “rupanya justru makin jauh dan terpisah dengan keadaan objektif yang sungguh-sungguh diperlukan rakyat untuk perubahan.” (Abdurrahman dalam *Gatra*, 6 Desember 2006). Demikianlah, Indonesia telah memperlihatkan kepada dunia bahwa demokrasi tidak ada hubungannya dengan perubahan dan perbaikan nasib rakyat. Datanya menurut catatan Bank Dunia, sekitar 109 juta orang (49% dari penduduk Indonesia) hidup dalam kemiskinan (Praginanto dalam *Gatra*, 24 Januari 2007).

Dulu, seperti disarankan oleh Moh. Sadli (1957), tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Namun, kenyataannya hal itu hanya mengundang gelombang pasang urbanisasi, sambil meninggalkan, tanpa mempedulikan, perkembangan masyarakat desa. Oleh karena itu, agak lebih melegakan ketika J.A.C. Mackie (1980) mengemukakan temuannya yang menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boeke sebagai sektor subsisten-prakapitalis, ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an.

Di sinilah, maka masalah pembangunan ini semestinya menjadi keprihatinan kita bersama, termasuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masalah pengembangan masyarakat (*community development*) dengan melibatkan aspek budaya dan lingkungan hidup menjadi fenomena yang menarik. Kekayaan budaya Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke serta kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sangat besar merupakan potensi yang luar biasa, namun keragaman budaya dan potensi lingkungan hidup yang demikian besar tersebut cenderung tidak digarap secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat atau pihak-pihak lain yang seharusnya melihat peluang dan potensi dari hal tersebut (Rahman, 2003).

Keragaman budaya dan potensi lingkungan hidup yang demikian besar cenderung tidak digarap secara optimal oleh masyarakat, juga karena banyak aspek pentingnya memelihara budaya dan lingkungan yang dilupakan. Dalam konteks lingkungan hidup, kerusakan alam dan lingkungan, bencana alam dan lain-lain menjadi keprihatinan bersama dan memberikan pelajaran bagi kehidupan. Manusia menjadi faktor utama rusaknya alam dan lingkungan.

Pengembangan masyarakat sudah sewajarnya memiliki orientasi kebermanfaatannya untuk kesejahteraan. Isu globalisasi dalam berbagai aspek, masalah kemiskinan dan pengangguran, masalah kerusakan alam, dan lain-lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manakala berbagai cara mencari solusi dilakukan, termasuk penggunaan teknologi mutakhir. Demikian karena menurut Manning (1980), perbedaan upah dan praktek-praktek di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya dan lingkungan hidup. Indonesia menyimpan ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang bersumber dari kekayaan budaya dan alam yang layak dikembangkan di tanah air. Tengok saja potensi yang dimiliki : sekitar 17.500 pulau,

400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua bahkan memiliki 270 etnis), budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial-ekonomi (www.madani-ri.com).

Nilai-nilai budaya luhur (*cultural heritage*) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi pembangunan candi, batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni budaya lain yang menjadi asset bangsa. Tercatat pula tujuh lokasi yang dijadikan situs pusaka dunia (*world heritage site*). Belum lagi tingkat keragaman hayati (*biodiversity*) yang sukar ditandingi. Begitu pula spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti komodo, orang utan, cendrawasih, dll. Termasuk kekayaan budidaya rempah-rempah seperti cengkeh, lada, teh, jahe, pala, dll.

Jawa Barat sendiri memiliki potensi itu semua yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi Jawa Barat yang demikian kaya dengan budaya dan lingkungan hidup menjadi menarik karena potensi-potensi tersebut masih perlu digali dan dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan.

Beberapa alasan mengapa pengembangan masyarakat melalui program budaya dan lingkungan hidup menjadi penting. *Pertama*, struktur atau keorganisasian kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dimana keadaan mengalami perubahan yang terus-menerus. *Kedua*, penguatan budaya lokal dan lingkungan hidup dapat mempertegas identitas bangsa yang terancam punah akibat globalisasi. *Ketiga*, penguatan budaya lokal sekaligus dapat memperkaya khasanah pariwisata nasional tapi bernuansa lokal. *Keempat*, lingkungan hidup dan budaya masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menjaga harmoni kehidupan dimana keduanya memberikan andil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pengembangan budaya lokal dapat meningkatkan kesejahteraan berbagai *stakeholder* yang terlibat dan *concern* dengan pengembangan budaya lokal serta lingkungan hidup menjadi faktor yang penting untuk jalannya aktivitas kebudayaan (Rahman, 2011).

Pada Juli 2007 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak berbagai pihak untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hal tersebut akan memperkuat Struktur Industri Nasional khususnya *Growth* dan *Share* Sektor Industri Dalam PDB / PDRB. Industri kreatif adalah industri tidak terbatas seperti pekarya desain, film, musik, piranti lunak (*software*), media elektronik, penerbitan, seni, dan budaya, hingga industri multimedia baik tradisional maupun modern.

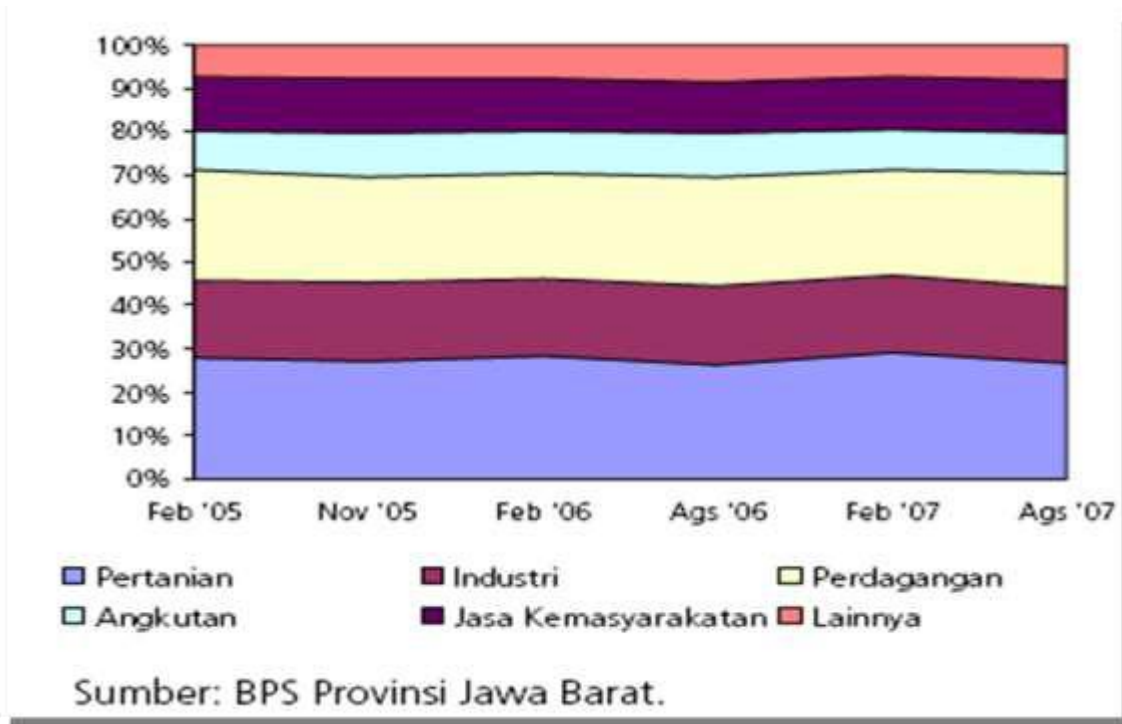
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS/2006) setiap tahun industri kreatif mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15%. Perkembangan industri tersebut (BPS/2006) mampu menyokong 33,5 % total angka PDB yang setara dengan Rp. 693 Triliun. Di Uni Eropa industri kreatif merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Sedangkan di Inggris serta Australia industri tersebut menjadi penyumbang besar bagi PDB.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian (2007) mengungkapkan industri kreatif mengalami peningkatan dari 5,6 % mencapai 7,3 % dengan pemasukan terbesar dari bisnis fashion termasuk fashion tradisional seperti batik, dll. Charles Humphrey (Duta Besar Inggris untuk Indonesia, 2007) mengungkapkan Indonesia punya potensi untuk mengembangkan industri kreatif dengan dasar keragaman budaya, seni, dan lain-lain yang bisa menjadi keunggulan Indonesia untuk mengembangkan industri kreatif ke depannya.

Industri kreatif mengembangkan tiga pilar utama sebagai modal awal: kreativitas sumber daya manusia, inovasi serta semangat kewirausahaan. Oleh karena itu penting sekali membangun komunitas kreatif dan dikelola secara profesional dan mengoptimalkan semua potensi masyarakat. Di Jawa Barat sendiri sektor profesi dominan masih mayoritas bergerak di sektor pertanian, tapi perlahan namun pasti

sektor jasa dan perdagangan mulai menunjukkan geliat yang meningkat. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Komposisi Penduduk di Jawa Barat Menurut Lapangan Pekerjaan



Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Pangestu (2010) pertumbuhan ekonomi kreatif diatas rata-rata nasional pada 2006 mencapai 7,3%, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hanya 5,6 %. Sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB sekitar 4,7%. Tiga sub kategori ekonomi kreatif yang terbesar adalah fashion 30%, kerajinan 23% dan periklanan 18%. Industri ekonomi kreatif diperkirakan telah menyerap 3,7 juta tenaga kerja atau 4,7% dari total penyerapan tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor sekitar 7%.

Tabel 1.2. Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah (Periode Juli 2005-Maret 2007)

Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Juli 2005	105.149	46.086	151.235	2.444,4	10,57
Maret 2007	126.953	53.868	180.821	2.654,5	11,21
<u>Pedesaan</u>					
Juli 2005	80.928	33.036	113.964	2.693,1	16,62
Maret 2007	112.234	31.970	144.204	2.800,7	16,88
<u>Kota+Desa</u>					
Juli 2005	93.735	39.966	133.701	5.137,5	13,06
Maret 2007	116.835	41743	158.579	5.455,2	13,55

Sumber: BPS Provinsi Jabar

Aneka profesi masyarakat merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan segala potensi dan peluang kreatif masyarakat. Permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat merupakan permasalahan akut yang harus dicarikan solusinya. Di sinilah diperlukannya kreativitas untuk mengembangkan berbagai potensi agar dapat membuat masyarakat semakin sejahtera.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kreatif didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau proses timbulnya ide baru. Pada intinya pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, ada banyak pengertian kreativitas, misalnya ada yang mengartikan kreativitas sebagai upaya melakukan aktivitas baru dan mengagumkan. Di lain pihak, ada yang menganggap bahwa kreativitas adalah menciptakan inovasi baru yang mencengangkan.

Menurut Widayatun, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Sedangkan menurut James R. Evans, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Sementara itu, Santrock menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Semiawan mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran (*fluency*), keluwesan (*flexibility*), dan keaslian (*originality*) dalam pemikiran, maupun ciri-ciri non aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Sedangkan menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif.

Kreativitas tidak hanya dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Dalam perkembangannya, ditemukan bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Beberapa ahli mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Rogers (dalam Utami Munandar, 2009:38) menyatakan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas ditandai dengan adanya:

- 1) Keamanan Psikologis. Keamanan psikologis dapat terbentuk melalui 3 proses yang saling berhubungan yaitu:
 - a) Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.
 - b) Mengusahakan suasana yang didalamnya tidak terdapat evaluasi eksternal (atau sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek mengancam).
 - c) Memberikan pengertian secara empatik, ikut menghayati perasaan, pemikiran, tindakan individu, dan mampu melihat dari sudut pandang mereka dan menerimanya.
- 2) Kebebasan Psikologis. Lingkungan yang bebas secara psikologis, memberikan kesempatan kepada individu untuk bebas mengekspresikan secara simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya.

Menurut Utami Munandar (2009:71), kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide-ide baru yang ada dalam dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri dari kreativitas adalah :

- 1) Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam.
- 2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik.
- 3) Memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah.
- 4) Bebas dalam menyatakan pendapat.
- 5) Mempunyai rasa keindahan yang dalam.
- 6) Menonjol dalam salah satu bidang seni.
- 7) Mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi/sudut pandang.
- 8) Mempunyai rasa humor yang luas.
- 9) Mempunyai daya imajinasi.
- 10) Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah.

Dalam hubungannya dengan produktivitas, kreatif adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, karena menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif itu bentuk akhirnya akan mempunyai ciri-ciri kebaruan dan keunikan, meskipun unsur-unsur dasarnya sudah ada sebelumnya. Kreatif adalah kemampuan berpikir untuk mencapai produk yang beragam dan baru yang dapat dilaksanakan, baik dalam bidang keilmuan, seni, sastra, maupun bidang lainnya dari bidang-bidang kehidupan yang banyak dimana hasil produk yang baru disenangi masyarakat atau diterima sebagai suatu yang bermanfaat.

Kreatif merupakan potensi yang terdapat dalam setiap diri individu yang meliputi ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat dipadukan dan dikembangkan sehingga dapat menciptakan suatu produk yang baru dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kreatif muncul karena adanya motivasi yang kuat dari diri individu yang bersangkutan.

Menurut Harris (dalam Nursaumi, 2003:12) dalam artikelnya yang menyatakan bahwa: "Kreatif dapat dipandang suatu kemampuan, sikap dan proses. Kreatif sebagai suatu kemampuan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang telah ada. Kreatif sebagai sikap adalah kemampuan diri untuk melihat perubahan dan kebaruan, suatu keinginan untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan, kefleksibelan pandangan, sifat menikmati kebaikan, sambil mencari cara-cara untuk memperbaikinya. Sedangkan kreatif sebagai proses adalah suatu keinginan yang terus menerus memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi, dengan membuat perubahan yang bertahap dan memperbaiki karya-karya sebelumnya".

Orang kreatif menggunakan pengetahuan yang kita semua memilikinya dan membuat lompatan untuk memungkinkan mereka memadamkan segala sesuatu dengan cara-cara yang baru (Deporter dkk, 2000:295). Lebih lanjut Deporter (2000:292): "Seseorang yang kreatif selalu mempunyai rasa ingin tahu, ingin mencoba-coba, bertualang, suka berpetualang, suka bermain-main, serta intuitif dan setiap orang berpotensi untuk menjadi orang kreatif ini".

Melalui pendapat yang di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kreatif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan untuk menemukan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baru atau unik dan mempunyai suatu keinginan untuk terus-menerus memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi, dengan membuat penlabahan yang bertahap dan memperbaiki karya-karya sebelumnya.

Pada prakteknya, kreativitas itu sendiri adalah benda hidup. Ia dapat saja meneruskan tradisi, dapat pula merupakan sesuatu yang baru, dan dapat pula merupakan suatu kontinuitas dari yang lama ke yang baru. Demikian juga, kreativitas itu dapat berupa karya perorangan dan dapat pula merupakan karya kelompok. Oleh karena itu, semakin banyak orang atau kelompok masyarakat yang kreatif, semakin ramai pula karya-karya yang muncul dan berkembang di masyarakat tersebut.

Berbagai potensi kreatif masyarakat harus digali secara optimal melalui pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup. Berbagai potensi tersebut sudah dilakukan di Saung Angklung Ujo (selanjutnya SAU), Kawasan Sentra Bunga Cihideung Lembang-Bandung Barat, Keraton Kasepuhan Cirebon, kampung kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).

Saung Angklung Udjo (SAU) adalah suatu tempat yang merupakan tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, dan workshop instrumen musik dari bambu. Selain itu, SAU mempunyai tujuan sebagai laboratorium kependidikan dan pusat belajar untuk memelihara kebudayaan Sunda dan khususnya angklung. Didirikan pada tahun 1966 oleh Udjo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati, dengan maksud untuk melestarikan dan memelihara seni dan kebudayaan tradisional Sunda. Berlokasi di Jalan Padasuka 118, Bandung Timur, Jawa Barat, Indonesia, SAU merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam mewariskan dan mempertahankan budaya lokal, dalam hal ini budaya Sunda. SAU, adalah sanggar seni yang secara spesifik menyajikan musik angklung dan mewakili eksotika kota Bandung kepada wisatawan.

Warisan budaya menurut Davidson (1991:2) dipahami sebagai sebagai produk atau budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri kelompok atau bangsa. Begitulah langkah yang dilakukan Udjo dan para penerusnya dalam menggerakkan potensi seni budaya masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kreatif. Hal itu pun dilakukan oleh masyarakat Desa Cihideung, Lembang.

Cihideung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Parompong, Lembang. Tempat wisata alam ini merupakan pusat wisata agrobisnis, dimana sepanjang jalan dapat ditemukan berbagai bunga-bunga cantik. Berdasarkan survey sekitar 85% penduduk di desa Cihideung berprofesi sebagai petani bunga potong dan tanaman hias. Cihideung merupakan surga bagi pecinta bunga. Bunga yang ditanam di desa Cihideung bisa dibilang lengkap. Tata letak yang tepat dan hawa yang sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama disini. Selain menikmati bunga yang tertata rapi dan bunga yang bermekaran, pengunjung juga bisa melihat area pembibitan bunga. Hampir di setiap liburan, di desa Cihideung banyak didatangi oleh wisatawan untuk membeli bunga atau hanya sekedar melihat-lihat koleksi bunga di desa Cihideung. Selain itu, Sentra Wisata Cihideung Lembang mulai dikelola secara profesional juga mengembangkan seni dan budaya menanam bunga secara baik dan mengarah pada manajemen profesional dengan tetap menjaga kekayaan alamnya.

Begitu juga yang dilakukan oleh para pewaris tahta kerajaan Cirebon dan masyarakat sekitarnya yang terus mempertahankan seni budaya Cirebon dimana Keraton sebagai sentralnya dan masyarakat

terlibat dalam aktivitas seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Keterlibatan pihak Keraton dalam menjaga dan mengembangkan seni tradisional keraton untuk masyarakat, pengembangan kerajinan masyarakat, batik Cirebon, dan lain-lain memberikan jalan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada faktanya, di Cirebon, terdapat obyek wisata sejarah, budaya, dan religi, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon. Bekas istana ini beralamat di Jalan Kasepuhan No 43, Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 30 menit dari Stasiun Kereta Api Kejaksan dan 30 menit dari Terminal Bus Harjamukti Cirebon. Pihak istana, masyarakat, dan pemerintah Kota Cirebon masih memelihara dan melestarikan warisan budaya masa lalu ini.

Di Tasikmalaya, ada lokasi kerajinan golok yang terkenal, yaitu Golok Galonggong. Golok ini merupakan salah satu kerajinan tangan khas Tasikmalaya yang terlahir dari kampung perajin golok Galonggong di Kecamatan Manonjaya, sekitar 15 km dari pusat Kota Tasikmalaya. Golok produk industri rumahan ini sangat terkenal dengan kualitas ketajamannya juga kekuatan gagang dan sarung goloknya. Tak heran, Golok Galonggong terkenal hingga luar pulau dan mendominasi golok di Jawa Barat.

Di tengah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum begitu optimal, suatu kawasan di sekitar jembatan Sungai Ciminyak, Jalan Raya Rancapanggung Cililin, menawarkan wisata kuliner dan alam di pinggir genangan Waduk Saguling sebagai salah satu pilihan rekreasi. Di sekitar jembatan yang menghubungkan antara Desa Mukapayung dan Rancapanggung berderet sekitar belasan tempat makan sekaligus penjualan ikan. Lokasi makannya pun berupa tenda dan kios-kios terbuka dengan suasana perbukitan hijau, gunung, hamparan sawah bertingkat, dan sungai Waduk Saguling dengan perahu-perahu nelayan penambak ikan yang hilir mudik melintas di atas genangan waduk. Wisata kuliner di Jembatan Ciminyak Waduk Saguling ini sudah mulai banyak dikunjungi sejak sekitar lima tahun lalu.

Taman Nasional Gunung Halimun - Salak (TNGHS) adalah salah satu taman nasional yang terletak di Jawa bagian barat. Kawasan konservasi dengan luas 113.357 hektare ini menjadi penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah yang terluas di daerah ini, dan sebagai wilayah tangkapan air bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Melingkup wilayah yang bergunung-gunung, dua puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Halimun (1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m). Keanekaragaman hayati yang dikandungnya termasuk yang paling tinggi, dengan keberadaan beberapa jenis fauna penting yang dilindungi di sini seperti elang jawa, macan tutul jawa, owa jawa, surili dan lain-lain. Kawasan TNGHS dan sekitarnya juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, antara lain masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Baduy.

Melalui berbagai aktivitas tersebut, masyarakat di sekitar kawasan tersebut semakin meningkat kehidupan ekonominya dan juga turut aktif menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Untuk itu pengembangan potensi yang belum digarap secara optimal harus menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengoptimalkan manfaat untuk masyarakat.

Keberadaan komunitas budaya di suatu wilayah mendukung dalam pengembangan budaya dan lingkungan hidup menarik untuk dikaji lebih mendalam. *Pertama*, studi tentang pengembangan masyarakat dengan segala aspek terkait di dalamnya bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat, di mana komunitas tersebut menjadi aktor yang menggerakkan potensi ekonomi kreatif warganya. *Kedua*, keberadaan komunitas tersebut dapat merepresentasikan eksisnya berbagai komunitas budaya lokal serta berbagai upaya menjaga lingkungan hidup yang berkontribusi dalam mempertahankan budaya dan alam lingkungan

masing-masing. Dengan demikian upaya pengembangan masyarakat merupakan bagian penting dari tujuan mencapai kesejahteraan.

1.2. Identifikasi Masalah

Upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam di Indonesia telah lama disuarakan, terutama selama satu dekade terakhir ini. Ada satu hal pokok yang menjadi alasan, mengapa upaya tersebut demikian kuat diperjuangkan. Pendekatan kebijakan, teknis dan bisnis dalam pengelolaan sumberdaya alam Indonesia selama ini telah terbukti banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik sumberdaya, bahkan merusak tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal yang telah mengelola sumberdaya alam yang terbukti lestari berdasarkan banyak penelitian dari generasi ke generasi.

Isu kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam mulai mendapat respon, namun tidak bersifat struktural, dari pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai program yang berorientasi untuk membantu pendapatan masyarakat lokal, seperti program rehabilitasi lahan dan tanaman, dan program wanatani (*agroforestry*). Tetapi hasil pelaksanaan dari program-program tersebut sangat jarang mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena hampir semua program-program tersebut lahir dari kebijakan yang masih bersifat reaktif, yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang menjadi sulit untuk ditangani dibandingkan bila masalah tersebut dicegah sebelum timbul.

Kebijakan-kebijakan ini jarang dikoordinasikan dengan putusan-putusan pembangunan ekonomi yang biasanya ikut membentuk arah sifat pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi politik Indonesia yang melatarbelakangi konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Konsep tersebut memandang sumberdaya alam sebagai sumberdaya dengan nilai yang tidak terbatas dan mudah didapat. Konsep tersebut juga menjadi salah satu faktor lahirnya hegemoni negara atas sumberdaya alam, yang kemudian melahirkan Hak Menguasai Negara (HMN).

Sistem pengelolaan sumberdaya alam yang telah dikembangkan masyarakat adat maupun masyarakat lokal, sejak lama merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam dan atau di sekitarnya, dan kelestarian daya dukung lingkungan dengan cara mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat dan keberlanjutan (*sustainability*). Sebagai contoh, pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan lokal di Kawasan Ekosistem Halimun, antara lain stratifikasi leuweung (*leuweung titipan, tutupan, & garapan*), sistem *agroforestry* khas Jawa Barat seperti talun, dudukuhan, kebon kayu, reuma dan huma.

Namun saat ini, sistem tersebut mengalami tekanan-tekanan eksternal, antara lain akibat tidak diakuiinya keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam mereka, dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang bertumpu pada konsep hak menguasai negara. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan masyarakat adat dan lokal yang sebetulnya merupakan pemilik, pengelola, sekaligus penjaga dan pemelihara sumberdaya alam, menjadi terasing di tanahnya sendiri dengan semakin terkungkungnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam.

Bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan mereka kehilangan sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, bahan baku industri rumah tangga dan bahan baku kegiatan spiritual. Hilangnya sumberdaya tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan praktek tradisional yang kemudian mengakibatkan berubahnya tatanan sosial masyarakat adat.

Setelah sekian lama menghadapi berbagai tekanan, masyarakat adat dan masyarakat lokal mendesak kuat pemerintah untuk segera menghormati, menghargai, melindungi dan mengakui konsep pengelolaan sumberdaya alam yang mereka terapkan selama ini sebagai suatu paradigma baru dalam pembangunan. Di lapangan, sistem ini telah terbukti dapat mempertahankan keberlanjutan secara ekologi, sosial – budaya dan ekonomi.

Berdasarkan berbagai kondisi riil tersebut di atas, hal yang perlu mendapatkan prioritas perhatian adalah keterkaitan kondisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat daerah-daerah tersebut dalam merespon derap pembangunan nasional dan pengaruh cepatnya gerak globalisasi. Kiranya tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa faktor perilaku manusia sangat menentukan bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai persoalan sosial budaya dan lingkungan yang menjadi faktor determinan bagi kelangsungan hidup masyarakat, faktor sosial budaya tampaknya juga memberikan harapan bagi daya dukung pengembangan masyarakat (*community development*). Unsur sosial budaya yang memiliki potensi cukup strategis untuk membangun “kesadaran kolektif” masyarakat daerah sangatlah signifikan bagi pengembangan masyarakat setempat. “Kesadaran kolektif” dan “solidaritas sosial” biasanya mudah dibangun melalui sarana “kelembagaan sosial” yang sudah ada (Rahman & Yuswadi, 2000). Pemanfaatan kelembagaan tradisional tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif jika disesuaikan dengan definisi masyarakat tentang kelembagaan yang dimilikinya. Makna subyektif masyarakat terhadap budaya dan lingkungan yang dimilikinya juga memiliki posisi sentral bagi kelangsungan pembangunan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana model pengembangan masyarakat (*community development*) berbasis budaya dan lingkungan hidup di Kawasan Saung Angklung Ujo (SAU) Desa Padasuka Bandung, Sentra Wisata Bunga Desa Cihideung-Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) dalam menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat di Jawa Barat.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pendidikan Non-Formal di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS)?
2. Bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Penguatan Ekonomi Masyarakat di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS)?
3. Bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya

- Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) di Bogor dan Sukabumi?
4. Bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Seni Budaya Lokal dan Seni Budaya Kontemporer di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS)?
 5. Bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pemanfaatan ICT (*Information and Communication Technology*) di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS)?
 6. Bagaimana model pengembangan masyarakat yang diterapkan oleh di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan secara deskriptif bagaimana program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pendidikan Non Formal di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).
2. Menjelaskan program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Penguatan Ekonomi Masyarakat di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).
3. Menjelaskan program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).
4. Menjelaskan program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Seni Budaya Lokal dan Kontemporer di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).
5. Menjelaskan program pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup melalui program Pemanfaatan ICT di SAU, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).

6. Mendapatkan model pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup dalam menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat.

1.5. Urgensi Penelitian

Berkaitan dengan hal itu, studi penelitian ini memiliki beberapa signifikansi sebagai berikut :

1. Signifikansi Teoretis

Memperkaya kajian tentang pengembangan masyarakat, khususnya kajian tentang strategi pengembangan masyarakat yang melibatkan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup untuk menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat.

2. Signifikansi Praktis

Memberikan masukan bagi diambilnya kebijakan-kebijakan pengembangan masyarakat lokal oleh pemerintah (khususnya Bappeda, Dinas Pariwisata dan Dinas terkait lainnya di masing-masing daerah) yang memungkinkan budaya lokal terus bertahan dan menjadi asset pariwisata serta lingkungan hidup terus terjaga. Diharapkan dapat dikembangkan pariwisata yang berbasis masyarakat (*community based tourism*) bagi kepentingan pembangunan nasional.

Studi tentang pengembangan masyarakat di tiga lokasi ini diharapkan juga memberikan kontribusi bagi daerah yang bersangkutan dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda).

1.6. Kerangka Pemikiran

Upaya penguatan pengembangan ekonomi masyarakat perlu dipandang sebagai suatu keharusan, dimana penguatannya merupakan salah satu titik perhatian dari studi kelembagaan. Membangun kelembagaan untuk memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan di lingkungan industri kecil dan menengah yang berbasis sumberdaya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) setempat, adalah juga berarti mengembangkan budaya non-material untuk meningkatkan daya saing modal sosial (*social capital*). Dari kacamata ekonomi, penguatan kelembagaan usaha kecil dan menengah harus mempunyai makna peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan di lingkungan UKM.

Dalam sosiologi, kata kelembagaan (*institution*) dan kelembagaan sosial (*social institutional*) menunjuk pada sesuatu yang telah bersifat mapan (*established*) atau hidup (*contitued*) di dalam masyarakat. Dalam berbagai referensi yang terkait, kata kelembagaan atau *social institution* hampir selalu muncul bersamaan dengan *social organization*. Pada masa-masa awal perkembangan ilmu sosiologi, kedua kata ini tidak dibedakan secara tegas, atau terjadinya tumpang tindih dalam penggunaannya. Kemudian, mulai pertengahan 1950-an, terlihat perbedaan yang menjadi semakin tegas, dimana perubahan dari pengertian yang semula "luas dan baur" menjadi "sempit dan tegas". Hal ini menunjukkan semakin pentingnya kedudukan konsep tersebut dalam sosiologi.

Sosiolog Sumner dalam buku *Folkways* yang terbit tahun 1906 masih memasukkan unsur struktur di bawah kata kelembagaan. Sebaliknya, Durkheim (tahun 1897) dan Cooley (1909) memasukkan unsur-unsur nilai, norma, dan kepercayaan ketika membicarakan organisasi sosial. Perbedaan yang mulai tegas misalnya tampak pada Mac Iver dan Page (tahun 1949) serta L. Broom dan P. Selznik (tahun 1950), yang

menyatakan dengan tegas perbedaan penggunaan *institution* dengan *organization* (Mitchel, 1968: 99-101, 172-173). Dalam pengertian Uphoff (1992) dan Fowler (1992) kelembagaan adalah “*a complex of norm and behavior that persist overtime by serving some socially valued purpose*”, sedangkan organisasi adalah struktur peran yang diakui dan diterima.

Untuk kepentingan analisis yang lebih baik, maka perlu memformulasikan batasan kelembagaan secara tegas. Dari penelusuran referensi secara mendalam, maka Syahyuti (2003) berpendapat bahwa “kelembagaan” berisikan dua aspek penting, yaitu “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Fokus utama dalam kajian aspek kelembagaan adalah perilaku atau perilaku sosial, dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (*values*), norma (*norm*), *custom*, *mores*, *folkways*, *usage*, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sementara itu dalam aspek keorganisasian fokus kajian utamanya adalah struktur atau struktur sosial. Inti kajiannya adalah pada aspek peran (*roles*). Dengan demikian aspek kajian secara lebih jauh mencakup : peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antara kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan (sentralitas atau distributif). Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural, dan berlangsung relatif lebih cepat.

Kedua aspek tersebut diturunkan dari konsep bahwa ada dua hal utama dalam kajian sosiologis. Dalam buku Taneko (1993) misalnya dikatakan bahwa dua inti pokok dalam sosiologi adalah segi struktur (aspek keorganisasian) dan segi dinamikanya atau proses sosial (aspek kelembagaan). Artinya, kedua kajian itu bersifat saling membutuhkan, melengkapi, dan memperkuat.

Makna kelembagaan secara hakiki lebih mengandung makna tentang aspek “isi”, tidak hanya pada “bentuk luar” atau fisiknya (Lauer, 1982 dalam Pranadji, 2002). Salah satu isi penting dari kelembagaan tadi adalah tata nilai yang menghidupkan kelembagaan tadi.

Bottomore (dalam Taryoto, 1995) mendefinisikan kelembagaan sebagai *a complex or cluster of roles*, yang menyebutkan bahwa konsep peranan (*role*) merupakan komponen utama kelembagaan. Horton dan Hunt (1984) mendekati pembahasan kelembagaan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga kelembagaan didefinisikan sebagai “suatu system norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan”, secara jelas bahwa: “*An institution is an organized system of social relationship which embodies certain common value and procedures and meets certain basic needs of the society. Common value refers to shared ideal and goals; common procedures are the standardized behavior pattern followed; and system of relationship is the network of rules and statues through which people carrying out this behavior*”.

Terdapat tiga hal yang mendasar dari kelembagaan menurut Horton dan Hunt, yaitu sistem nilai, prosedur hubungan, serta bentuk hubungan sesama anggota masyarakat (=struktur). Sementara itu, Mubyarto (1977) mendefinisikan kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Koentjaraningrat (1997) mengusulkan istilah pranata sebagai padanan kata “*institution*”, dan pranata sosial untuk “*social institution*”. Pranata diartikan sebagai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Sedangkan pranata sosial diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang

berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Definisi ini lebih menekankan kepada aspek tata kelakuan dan norma-norma, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pranata terdiri dari tiga wujud kebudayaan, yaitu : (1) sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud idiel kebudayaan, (2) kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan, dan (3) peralatannya untuk wujud fisik kebudayaannya. Ditambahkan dengan personilnya sendiri, maka pranata terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi.

Jika kita gunakan kembali kata asalnya, institusi, kita dapati bahwa ia adalah salah satu konsep sosiologi yang paling luas digunakan dan mempunyai beberapa pengertian yang berlainan. Ada kalangan yang menggunakan konsep ini untuk merujuk kepada suatu organisasi seperti universitas, perpustakaan atau asosiasi. Ada pula yang menganggapnya sebagai organisasi khusus seperti penjara, rumah sakit dan sekolah berasrama (dikenal sebagai institusi total). Konsep ini pun dimaksudkan sebagai suatu pola perilaku yang telah menjadi kebiasaan (*established*), atau suatu pola hubungan sosial yang mempunyai cita-cita sosial tertentu.

Pengertian yang paling banyak digunakan dan diterima dalam bidang sosiologi adalah pengertian yang ketiga. Namun sosiolog dan antropolog masih belum mencapai kesepakatan tentang penggunaan konsep ini. E. Chinoy (*Society*, 1962) berpendapat bahwa istilah institusi perlu dikhususkan kepada pola perilaku yang telah disetujui. Oleh karena itu, istilah lain hendaklah digunakan untuk menunjukkan aspek-aspek organisasi perilaku dan kelompok-kelompok yang terlibat. Contoh institusi yang diberikan oleh Chinoy adalah hukum pembunuhan dan kebiasaan yang menentukan interaksi sosial sehari-hari.

A. W. Gouldner dan H. Gouldner dalam buku mereka *Modern Sociology* melihat institusi sebagai cara yang standard untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat, seperti upacara penguburan. R. M. Maclver dan C. H. Page dalam buku mereka *Society* mencoba membedakan institusi dari persatuan. Institusi, bagi mereka adalah *established forms or conditions of procedure characteristic of group activity*. Kelompok yang terlibat dalam tatacara yang diterima secara meluas itu dikenal sebagai persatuan. Jadi gereja adalah persatuan, sedangkan sembahyang dan bentuk-bentuk pemujaan adalah institusi. Demikian juga kesatuan sekerja adalah persatuan, dan tawar menawar secara kolektif dan pemogokan adalah institusi. Seorang individu bisa menjadi anggota persatuan, tetapi tidak bisa menjadi anggota suatu institusi.

Institusi sosial yang utama adalah institusi perkawinan, institusi politik, institusi pelajaran, institusi ekonomi, dan institusi agama. Tiap-tiap institusi ini saling berkaitan dan masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Institusi perkawinan, misalnya berfungsi mengontrol pola hubungan seks serta melahirkan generasi baru. Institusi ekonomi mempunyai fungsi untuk mengontrol produksi dan penggunaan barang dan layanan. Fungsi utama institusi pelajaran adalah mendidik anggota suatu kelompok serta melanggengkan warisan budaya sosialnya.

Begitu sentralnya peranan kelembagaan dalam masyarakat, maka setiap perubahan sosial menjadikan kelembagaan sebagai wadahnya. Demikian pula halnya dengan pembangunan yang diartikan sebagai perubahan yang direncanakan. Hal ini sudah terlihat selama ini, dimana setiap program ke pedesaan hampir pasti membentuk suatu kelembagaan baru, misalnya: koperasi untuk aktivitas usaha ekonomi, kelompok tani untuk aktivitas budidaya ekonomi kerakyatan, kelompok P3A untuk urusan air irigasi, kelompok pencapir untuk kepentingan pemenuhan informasi, kelompok ternak bagi peternak, kelompok penyangga hutan dan lain-lain.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan memainkan fungsi penting, mengingat kelembagaan menjadi wadah, penuntun, dan menyediakan pola bagi proses pengelolaan lingkungan hidup, bahkan kelembagaan berfungsi mengarahkan orientasi dari kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, bagaimana wujud pengelolaan lingkungan suatu masyarakat ditentukan oleh eksistensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Inti dari eksistensi suatu kelembagaan (*institution*) adalah sejumlah aturan (*norm*), sistem nilai (*value system*), sistem kepercayaan (*trust system*) dan sistem pengetahuan (*knowledge system*) yang berfungsi sebagai patokan berperilaku (*behavior standard*), menjadi acuan bagi warga masyarakat menilai perilaku ideal dan perilaku menyimpang dari setiap anggotanya (*social control*). Kawasan atau wilayah yang menjadi jangkauan suatu kelembagaan dalam suatu masyarakat sangat spesifik karena berfungsi untuk mengatur dan menata suatu aspek tertentu dalam rangka tujuan tertentu pula. Dengan demikian kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pengendali bagi individu dan kelompok masyarakat untuk memelihara hubungan harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya.

Dalam kajian ini, konsep kelembagaan tradisional dipahami dan dioperasikan sebagai seperangkat ajaran dan kepercayaan yang bersifat ideal, isinya berupa sistem nilai, sistem pengetahuan lokal yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat dalam melakukan sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan alamnya. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam sangat ditentukan oleh kelembagaan yang dimiliki.

Demikian pula dengan konsep tradisi dimaksudkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk merumuskan dan menanggapi persoalan dasar dari keberadaannya dimuka bumi ini, yaitu kesepakatan yang dicapai masyarakat mengenai soal hidup dan mati. Tradisi lebih bersifat imanen dalam situasi aktual agar serasi dengan realitas yang berubah, dan sekaligus transenden sehingga dapat berfungsi memberi orientasi dan legitimasi, sehingga dengan demikian tradisi dapat dipahami sama dengan kebudayaan (Hidayana, 1989). Sementara, dalam studi-studi yang dilakukan oleh para ahli antropologi, kelembagaan dimaknai sama dengan konsep pranata sosial (*social institution*) yang berarti sistem nilai dan sistem norma dan hukum tidak tertulis yang menjadi acuan dan pengendali setiap individu dalam semua aktivitas untuk mencapai suatu tujuan khusus (Koentjaraningrat, 1981; Naping, 2002). Pranata sosial dijelaskan dalam karya-karya antropologi merupakan bagian integral dari penjelasan kebudayaan secara umum (Kaplan, 1999; Keesing, 1981) yakni kebudayaan terdiri atas sistem kognisi yang merupakan pola bagi terbentuknya perilaku. Dalam konteks ini bagaimana sistem pengetahuan (kognisi) masyarakat tentang lingkungan alam, sistem kepercayaan yang berkaitan dengan lingkungan, bahkan dalam bentuknya yang lebih tradisional, kelembagaan dipahami dalam wujud mitologi, dan ungkapan dalam bentuk cerita rakyat.

Oleh karena itu, strategi pengembangan perekonomian rakyat di pedesaan dapat ditempuh antara lain dengan pengembangan kelembagaan lokal pendukung, pengembangan pertanian rakyat berkebudayaan industrial, pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat, atau pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokasi. Ada tiga pilar utama kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di pedesaan yaitu: kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (*voluntary sector*), kelembagaan pasar (*private sector*), dan kelembagaan politik dalam pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Kelembagaan komunitas lokal-tradisional perlu ditransformasikan ke arah kelembagaan komunitas lokal yang maju dan responsif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa

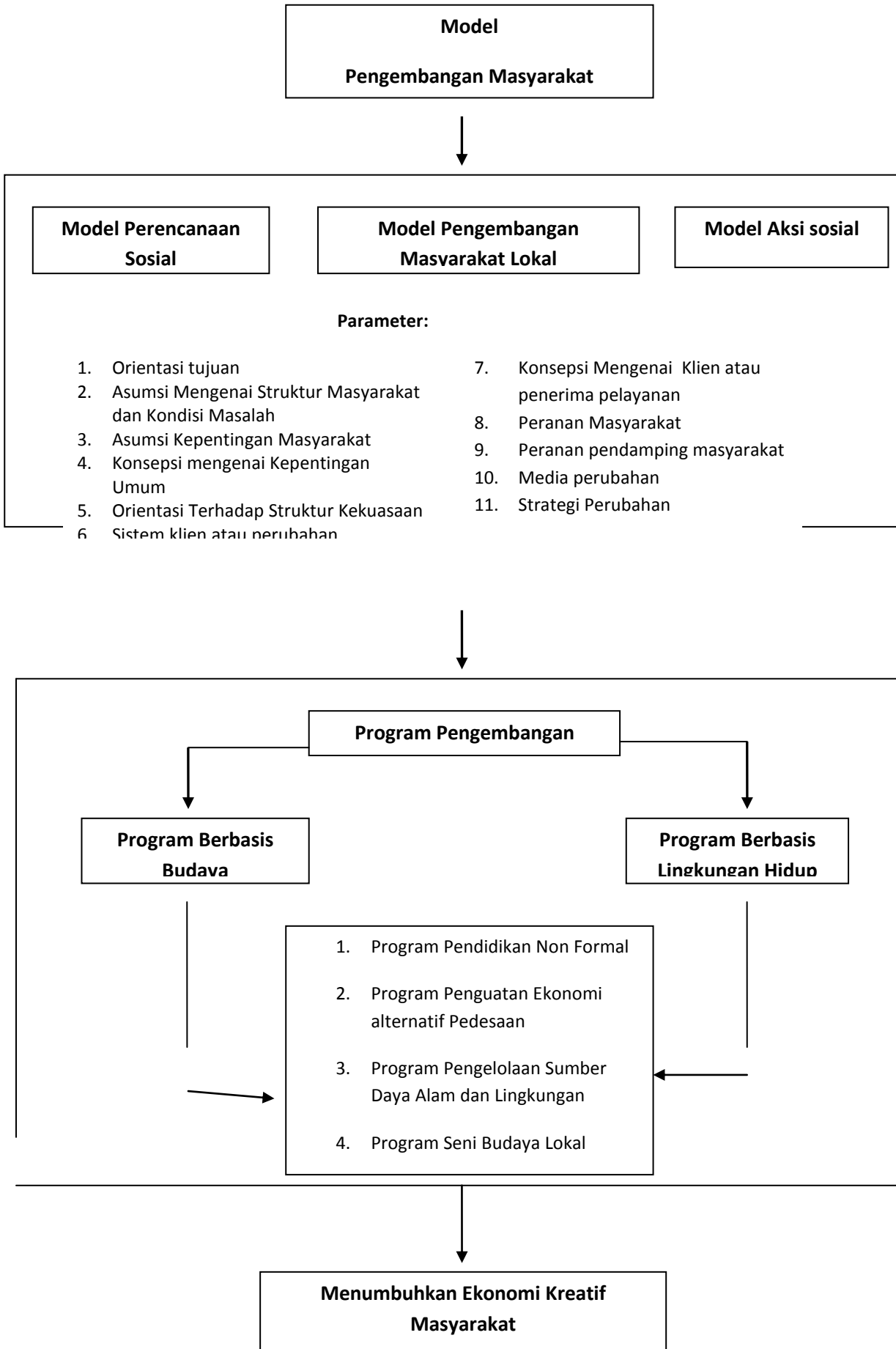
perubahan teknologi (tradisional-modern), sektoral (pertanian-industri), maupun tata-nilai yang hidup dalam masyarakat (budaya pertanian tradisional-pertanian-industrial).

Kelembagaan pasar atau *private* dapat menciptakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang punya jiwa kewirausahaan tinggi, ulet, tidak mengenal lelah, dan dinamis dalam mengikuti perubahan dinamika pasar. Sementara itu, kelembagaan pemerintah lokal atau kelembagaan politik dalam sistem pengambilan keputusan haruslah dapat diarahkan pada kelembagaan politik di tingkat lokal yang handal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lokal dapat mengakses terhadap sistem pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota sebagai unit otonom yang lebih tinggi. Pada gilirannya masyarakat lokal di pedesaan mempunyai akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya di wilayahnya sehingga pemanfaatan dan pemeliharannya bisa lebih optimal sesuai jiwa desentralisasi pembangunan.

Pembangunan pertanian yang telah dilakukan selama ini pada hakikatnya adalah pertanian yang sebagian bersifat adaptif terhadap lingkungan yang sudah mapan. Contohnya adalah pengembangan tanaman padi dengan menggunakan input produksi seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan dalam kondisi lingkungan sawah yang sudah siap dan menyatu dengan budaya masyarakatnya. Revolusi hijau sukses karena dilandasi penguasaan teknologi budidaya disertai dengan penyiapan kelembagaan pendukungnya, sehingga dapat berjalan cepat dan diadaptasi secara luas oleh masyarakat pedesaan. Dalam upaya pengembangan pertanian rakyat di masa depan, selain penyediaan, diseminasi, pengembangan, serta pemanfaatan teknologi budidaya; juga perlu pendalaman teknologi pada aspek pasca panen, pengolahan, serta distribusi dan pemasarannya.

Sejalan dengan proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat tradisional-subsisten ke arah masyarakat modern-komersial; maka perlu transformasi dari pertanian rakyat dengan budaya lokal-tradisional ke arah pertanian rakyat dengan budaya industrial. Beberapa ciri pertanian-industrial seperti yang dikemukakan oleh Sasmita (1996), antara lain adalah: (1) Ilmu dan pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan intuisi atau kebiasaan); (2) Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya; (5) Kualitas dan mutu merupakan orientasi dan tujuan para pelaku; (6) Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan; dan (7) Perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam, sehingga setiap produk yang dihasilkan bersifat standar baik dalam mutu, jumlah, bentuk, rasa, dan sifat-sifat lainnya, dan dengan ketepatan waktu.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Model Pengembangan Masyarakat



Proses transformasi budaya haruslah menjadi penggerak proses modernisasi masyarakat pertanian. Paradigma ini sedikitnya mempunyai tiga aspek: (1) pengembangan agroindustri dimulai dengan mengutamakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan lokal; (2) menggunakan desa sebagai unit otonom terbawah sebagai wadah kegiatan; dan (3) pendekatan wilayah pedesaan itu dapat meningkatkan keterkaitan desa-kota baik keterkaitan barang (input pertanian, output pertanian, barang konsumsi), keterkaitan tenaga kerja, maupun keterkaitan modal. Ekonomi rakyat di lingkungan industri kecil dan menengah akhirnya sejalan dengan fokus utama pada pengembangan UKM. Sumber peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan di di lingkungan industri kecil dan menengah adalah melalui kegiatan investasi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan-industrial yang didukung oleh investasi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana fisik, serta investasi modal sosial melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan-industri perlu didorong dengan menumbuhkan lembaga-lembaga tradisional yang modern, handal, dan mengakar pada budaya masyarakatnya.

1.7. Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juli 2014. Secara lebih lengkap jadwal penelitian tersebut digambarkan dalam matriks dibawah ini:

Tabel 1.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2013-2014

No	Kegiatan	Bulan					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1.	Persiapan						
	Penyusunan proposal	■					
	Koordinasi Rencana Penelitian	■					
2.	Pembahasan Metodologi		■				
3.	Pelaksanaan Penelitian						
	Pengumpulan Data			■	■		
	Pengolahan Data			■	■		
4.	Analisis Data dan Interpretasi Data					■	
5.	Pelaksanaan Seminar/Diskusi Terbatas						■
6.	Penyusunan Usulan dan Rekomendasi						■
7.	Penulisan Laporan						■

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini difokuskan pada suatu tema tentang model pengembangan masyarakat (*community development*) berbasis budaya dan lingkungan hidup dalam upaya menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Kegiatan penelitian ini difokuskan kepada studi pengembangan masyarakat di 6 (enam) kawasan yakni Saung Angklung Ujo Desa Padasuka Kota Bandung, Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang, Keraton Kasepuhan Cirebon, kerajinan golok Galonggong di Manonjaya Tasikmalaya, Sentra Wisata kuliner ikan di Rancapanggung Cililin-Bandung Barat, dan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).

2.1. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan (*development*) diartikan sebagai proses perubahan dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Perubahan ini dapat terjadi dari satu atau dua orang maupun lebih yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan, semakin banyak warga masyarakat mengambil keputusan tentang masalah kemasyarakatan dan semakin meluasnya pernyataan seseorang dalam kegiatan kerjasama, maka akan semakin optimal pencapaian kesejahteraan mereka.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi

ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Dengan demikian berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat dari adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Parsudi Suparlan dalam tulisannya tentang Antropologi Pembangunan, yang mana tulisan tersebut sebagai penghormatan kepada Koentjaraningrat (1997), mendefinisikan Pembangunan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.

Pembangunan adalah proses mengubah masyarakat di Negara – Negara berkembang secara terencana, transformatif (menjadi lebih baik), sesuai dengan program – program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan (<http://www.pustakabersama.net/buku.php>).

Sedangkan menurut Inayatullah (1967), pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Rogers dan Shoemaker (1971) mengatakan bahwa pembangunan ialah suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.

Kleinjans (1975) mengatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru yang pada akhirnya bukan soal teknologi atau GNP, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

Rogers (1983) mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan

material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) oleh mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi. Modernisasi merupakan tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara dunia kedua. Negara dunia ketiga juga tidak luput oleh sentuhan modernisasi ala barat tersebut. berbagai program bantuan dari negara maju untuk negara dunia berkembang dengan mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan semakin meningkat jumlahnya. Namun demikian kegagalan pembangunan ala modernisasi di negara dunia ketiga menjadi sebuah pertanyaan serius untuk dijawab. Beberapa ilmuwan sosial dengan gencar menyerang modernisasi atas kegagalannya ini. Modernisasi dianggap tidak ubahnya sebagai bentuk kolonialisme gaya baru, bahkan Dube (1988) menyebutnya seolah musang berbulu domba.

Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakekatnya merupakan *self projected reality*. Sumber perbedaan ini pun beragam, mulai dari perbedaan dalam perspektif epistemologik-ontologik pada tingkat filsafati, sampai kepada perbedaan penilaian atas tuah pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empirik.

Paradigma liberal berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, maka paradigma ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan aktifitas dan kegiatannya sehingga mereka bisa menjawab tantangan hidupnya dan peran negara bisa dikurangi. Paradigma ini melahirkan beberapa pendekatan yang berakar dari paradigma itu sendiri, yaitu:

1) Pendekatan pertumbuhan

Dalam pendekatan ini fokus utamanya adalah pembangunan industri. Industri diperbesar, swasta diberi kesempatan yang lebih leluasa, bank berkembang dan diberi kebebasan bagi penanaman modal asing. Konsentrasi utama adalah bidang industri tetapi melupakan aspek pemerataan sehingga jurang kemiskinan sangatlah jelas. Pendekatan ini dianggap kurang memberikan kesempatan kepada mayoritas masyarakat miskin untuk meningkatkan derajat hidupnya. Terjadi gap yang tinggi sehingga problem

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan pendekatan pertumbuhan ini WW. Rostow mengemukakan klasifikasi kehidupan masyarakat dalam 5 periode:

- a) Masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi-fungsi produksi terbatas. Pada umumnya masyarakat pada periode ini memusatkan proporsi yang sangat besar dari sumber daya yang mereka miliki pada sektor pertanian. Pusat kekuatan politik umumnya berada di daerah dalam tangan mereka yang mengontrol dan memiliki tanah.
- b) Prakondisi untuk lepas landas, yaitu tahap dimana masyarakat mengalami transisi. Dalam tahap ini dibutuhkan waktu untuk mentransformasi masyarakat dari tradisional melalui berbagai cara sehingga mampu memanfaatkan hasil-hasil dari ilmu modern dan menghindari hasil-hasil yang semakin menurun.
- c) Lepas landas, yaitu interval ketika rintangan dan hambatan lama untuk pertumbuhan yang lancar pada akhirnya bisa diatasi. Kekuatan untuk memajukan kehidupan ekonomi meluas dan bergerak mendominasi masyarakat.
- d) Menuju Kedewasaan, merupakan suatu periode panjang kemajuan yang berkesinambungan kendatipun berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi berusaha menggunakan teknologi modern di seluruh front kegiatan ekonomi.
- e) Konsumsi masa tinggi, merupakan masa ketika suatu negara bisa memproduksi apa saja yang diinginkan lewat teknologi modern, sektor-sektor utama bergerak menuju barang-barang konsumsi yang tahan lama dan jasa. Kelebihan produksi didistribusikan secara merata sehingga melahirkan apa yang disebut *welfare state*.

Konsentrasi dari pendekatan Rostow ini adalah pertumbuhan yang banyak dikoreksi oleh orang liberal sendiri sehingga melahirkan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan *basic needs* dan pendekatan *people centered development*.

- a) Pendekatan *basic needs*. Pendekatan ini berusaha melakukan koreksi terhadap pendekatan pertumbuhan. Basic needs meliputi: *shelter, food, health, infra structure, dan education*. Menurut pendekatan ini setiap usaha pembangunan harus memenuhi basic needs tersebut melalui pelayanan dan fasilitas sosial. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dominan, sehingga memperbesar ketergantungan masyarakat pada pemerintah dan pada hakekatnya dapat merendahkan martabat manusia.
- b) Pendekatan *people centered development*. Pendekatan ini merupakan penyempurnaan atau koreksi dari pendekatan sebelumnya. Disini pembangunan masyarakat harus diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan "*self sustaining capacity*" masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan mengubah peranan masyarakat dari penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang aktif dalam pembangunan.

2) Paradigma Dependensi atau Struktural

Paradigma ini berdasarkan atas pandangan struktural yang menganggap bahwa manusia tidak akan mampu membuat sesuatu dan mengatasi masalahnya sendiri selama struktur atau sistem tidak memberi peluang untuk itu. Gagasan-gagasan pokok dari paradigma dependensi dapat diikhtisarkan dari segi dalil-dalil pokok berikut:

- a) Dependensi adalah suatu kondisi yang didalamnya negara-negar dibatasi oleh lingkungan internasional dengan cara menciptakan keterbelakangan atau menimbulkan pembangunan yang menyimpang atau tidak layak.
- b) Dependensi terjadi melalui dua tahap yang menghubungkan konsep interest, eksploitasi “ekstern” dan “intern” sebagai aspek-aspek interaktif dari suatu hubungan sistemik.
- c) Dependensi adalah suatu fungsi kapitalisme
- d) Dependensi adalah suatu kondisi di mana konsekuensi pembangunan selalu berada pada keseimbangan negatif, sekalipun dalam beberapa hal konsekuensi itu positif.
- e) Dependensi hanya bisa dipahami dengan tepat menurut istilah historis, yaitu sebagai suatu keadaan yang didalamnya unsur-unsur “intern” dan “ekstern” ketergantungan saling berkaitan baik secara empiris maupun secara definisi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Paradigma dependensi merupakan perspektif global dalam memandang berbagai aspek pembangunan yang menyimpang dan keterbelakangan sesungguhnya.
- b) Paradigma dependensi terpusat hampir semata-mata pada situasi-situasi dependensi dan hampir tidak berkata apa-apa tentang situasi non dependensi.
- c) Dalam paradigma ini usahanya jauh lebih kritis ketimbang konstruktif, jauh lebih merupakan petunjuk tentang apa yang salah dan kenapa demikian daripada apa yang benar dan bagaimana mencapainya.
- d) Paradigma ini tidak menawarkan alternatif-alternatif pada ketergantungan dan keterbelakangan.
- e) Paradigma dependensi amat sedikit menaruh perhatian pada kelayakan nilai dan tujuan-tujuan yang dinyatakan atau diisyaratkan sebagai yang diinginkan.
- f) Literatur dependensi jauh lebih terbuka terhadap revolusi, dan kurang terikat pada tambahan-tambahan atau perubahan daripada literatur liberal terdahulu (Siregar, 1991)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paradigma dependensi itu global, holistik dan kritis.

Pembangunan merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia sehingga berbagai upaya telah dan akan ditempuh agar supaya program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin diraih yakni mensejahterakan rakyat. Fokus perhatian pembangunan tidak dilihat dari persepektif ekonomi semata dimana keberhasilan pembanguna dapat diukur dari meningkatnya produk nasional bruto, akan tetapi banyak faktor lain yang tidak boleh dikesampingkan misalnya faktor sosial, politik, dan lain-lain. Jika dibahas lebih mendalam faktor-faktor tersebut mempunyai varian yang sangat luas misalnya bagaimana pemerataan hasil pembangunan serta partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Salah satu elemen yang tidak boleh diabaikan, khususnya dalam proses pembangunan di pedesaan, adalah petani. Golongan ini merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan sangatlah signifikan. Banyak literatur yang mengemukakan bahwa selama ini petani hanyalah obyek dari pembangunan dan posisinya semakin termarginalkan. Lembaga-lembaga donor yang datang dengan berbagai bentuk bantuan untuk petani (baik dari pemerintah ataupun swasta) seolah merasa telah mengerti benar akan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan petani. Lebih lagi mereka

menganggap bahwa mereka “lebih” dibanding petani baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, keuangan, dan sebagainya. Dengan paradigma seperti tersebut, dampaknya adalah bahwa pendekatan pembangunan yang hendak diterapkan tentu saja akan disesuaikan dengan perspektif mereka, bukan berdasarkan pandangan petani. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menilai keberhasilan pembangunan. Karena keberhasilan pembangunan juga akan dilihat dari kaca mata lembaga donor tadi, bukan dari pihak petani. Bahkan lebih buruk lagi apabila pembangunan tersebut menemui kegagalan sama sekali jika dilihat dari kedua sisi. Robert Chambers dalam salah satu bukunya yang menjadi referensi dalam studi pembangunan pedesaan yang berjudul “*Rural Development: Putting the Last First*” menegaskan bahwa seringkali kegagalan pembangunan disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan pendekatan (Chambers, 1983)

Selain penerapan pendekatan yang kurang tepat seperti yang diungkapkan oleh Chambers di atas, partisipasi petani sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pembangunan di pedesaan tidak boleh dipandang sebelah mata. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan petani dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang, dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.

Akan tetapi salah satu kendala yang dialami adalah bentuk komunikasi di kebanyakan daerah pedesaan yang bersifat *top down* dimana petani hanya sebagai *audience* atau sasaran dari pesan-pesan yang disampaikan tanpa melalui proses dialogis terlebih dahulu sehingga pesan yang disampaikan oleh lembaga donor merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan. Padahal komunikasi akan efektif apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengar dan berbicara sehingga tercapai apa yang disebut sebagai *mutual understanding* (Liliweri, 1991)

Oleh karena itu, orang kemudian berpaling pada konsep pembangunan berbasis masyarakat atau apa yang disebut pengembangan masyarakat (*community development*). Di sini, konsep *Community Development* dipandang sebagai pembangunan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas. Pembangunan masyarakat bertujuan mengembangkan tingkat kehidupan dan mempunyai cakupan seluruh komunitas. Arthur Dunham (dalam Rothman, 1987) menyatakan bahwa *community development* adalah upaya-upaya terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan kemampuan orang untuk berpartisipasi, mengatur sendiri dan mengintegrasikan kegiatan dalam urusan-urusan masyarakat.

Pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, masyarakat adalah partisipan sekaligus pemetik hasil pembangunan. Pengembangan masyarakat ada kalanya dipandang sebagai kebalikan dari pendekatan pengembangan *top-down* yang segalanya ditentukan dari luar komunitas.

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat yang biasanya membentuk organisasi-organisasi masyarakat seperti ditulis Kibdervatter (1979: 46) memiliki komponen-komponen:

- a. Berorientasi pada kebutuhan, baik material maupun non-material.
- b. Memanfaatkan kesejatan (*indigenous*) masyarakat setempat termasuk visi dan misinya tentang masa depan.
- c. Mandiri, yang berarti mendasarkan pada kekuatan dan sumberdaya yang dimilikinya.
- d. Bersifat ekologis, yang memanfaatkan sumber daya secara rasional dan penuh kesadaran.

- e. Didasarkan pada transformasi struktural, yang berarti adanya perubahan dalam relasi sosial, kegiatan ekonomi dan struktur kekuasaan.

Dalam konteks ini, *community development* mencakup 5 elemen, yaitu : (a) fokusnya pada seluruh kebutuhan masyarakat, (b) dorongan swadaya sebagai dasar dan keseluruhan program, (c) bantuan teknis dari pemerintah atau organisasi lainnya berupa tenaga petugas, perlengkapan atau keuangan, (d) memadukan berbagai keahlian demi kepentingan masyarakat, dan (e) perencanaan dan penyusunan program berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan utama dari *Community Organization* adalah pengembangan 'harga diri' (*dignity*) dan kepuasan berpartisipasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tetapi dari kedua istilah tersebut dapat diambil satu konsep yang sama yaitu sebagai proses yang memfokuskan perhatian kepada aktivitas lokal. Di bawah ini terdapat beberapa definisi tentang pembangunan masyarakat, diantaranya yang dikemukakan oleh Dunham (dalam Rothman, 1987), "*Community Development can be tentatively defined as a process designed to create conditions of economic and social progress for the whole community with its active participation and the fullest possible reliance upon the community is initiative.*"

Menurut Dunham (dalam Rothman, 1987) pemberdayaan masyarakat lebih merujuk kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan partisipasi aktif yang didasari inisiatif masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya, pembangunan masyarakat seharusnya tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta tetap terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Hikmat, 2005).

Definisi lain yang diterima secara luas dikemukakan oleh PBB :

Istilah "*Community Development*" menunjukkan digunakannya berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan diantara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer. (Suharto, 2005).

Cary (dalam Hardcastle, et.al., 2004) menjelaskan empat arah di dalam memahami pembangunan masyarakat, yaitu sebagai suatu *proses, metode, program* dan sebagai suatu *gerakan*.

Community development sebagai suatu metode merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, sebagai pedoman atau arah untuk bekerja sama supaya dapat mencapai tujuan menekankan pada beberapa tujuan khusus. Perencana-perencana pusat, pengembang-pengembang ekonomi, dan para profesional yang mewakili berbagai bidang, memandang pengembangan masyarakat akan membantu masyarakat untuk mencapai secara nyata tujuan-tujuan yang diinginkan mereka. *Community development* sebagai suatu program, merupakan serangkaian prosedur yang berisikan tentang berbagai aktivitas dengan membawa prosedur-prosedur aktivitas yang dipandang baik atau sempurna.

Sebagai gambaran adalah pelaksanaan sejumlah proyek-proyek kecil sebagai basis untuk program-program pengembangan yang lebih luas.

Terdapat lima prinsip dasar yang sangat penting bagi mereka yang berminat kepada pengorganisasian ataupun pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut dimana pengorganisasian (ataupun pengembangan) masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multi lapisan profesi (*multi vocational*), karena disini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang sub professional, selain layanan yang profesional.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* serba bisa (*multi talents*) pada wilayah pedesaan, dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat (Dunham dalam Rothman, 1987).

Kelima prinsip ini telah menjadi bagian yang esensial di dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat. Seorang *community worker* dituntut, di samping harus menguasai berbagai keahlian, untuk selalu memperhatikan dan menghormati kearifan nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan akumulasi pengetahuan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu adagium yang dipakai di dalam pembangunan masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat (*working with people*) dan bukan bekerja untuk masyarakat (*working for people*), hal ini sesuai dengan prinsip kelima. Dengan prinsip ini seorang *community worker* menempatkan diri secara setara dengan masyarakat dan bertindak sebagai teman (*partner*) yang bersedia belajar bersama masyarakat dan tidak bersifat menggurui.

2.2. Model-model Pembangunan Masyarakat

Jack Rothman (1987) mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pembangunan masyarakat, yaitu: *locality development* (model A) dengan tujuan utama membangun kompetensi serta integrasi masyarakat; *social planning* (model B) yang di dalam prosesnya mengikutsertakan elemen-elemen perencanaan sosial dengan terfokus terhadap upaya pemecahan masalah masyarakat secara rasional; dan yang ketiga ialah *social action* (model C) yang lebih mengutamakan advokasi di dalam upaya pemecahan masalah.

a. *Locality Development*

Pendekatan ini mensyaratkan bahwa perubahan di masyarakat harus diikuti oleh partisipasi yang luas dari masyarakat di tingkat komunitas lokal dengan ikut serta di dalam penentuan tujuan (*goal*) dan ikut ambil bagian di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. *Locality development* adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. *Locality development* merupakan sebuah proses untuk membangun masyarakat (*community building*) dengan penekanan utama terhadap peningkatan strategi kemandirian, penerimaan akan keberagaman, partisipasi yang luas, kebersamaan dan pengembangan kepemimpinan lokal.

Locality development lebih berorientasi pada tujuan proses (*process goal*) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*) dengan berusaha meningkatkan “*community competency*” (yaitu kemampuan di dalam pemecahan masalah berdasarkan asas *self-help*) dan integrasi sosial (yaitu hubungan yang harmonis diantara kelompok ras, etnik, dan kelas sosial yang berbeda dan diantara semua orang tentunya). Di dalam *locality development* pemilihan, pengangkatan, arahan dan kendali terhadap kepemimpinan berada di tangan masyarakat lokal.

b. *Social Planning*

Social planning lebih menekankan kepada upaya teknis di dalam pemecahan masalah terutama yang berkenaan dengan permasalahan sosial yang substantif, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan masyarakat, perumahan, dan lain-lain. *Social planing* lebih berorientasi pada ‘tujuan tugas’ dan para perencana sosial dipandang sebagai ‘ahli’ (*expert*) dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

Gaya pemecahan masalah di dalam model ini sangat teknokratis dan sangat ditandai dengan pemikiran yang rasional. Partisipasi penuh dan luas masyarakat tidak begitu mendapat tempat di dalam model ini. Partisipasi yang terjadi sangat bervariasi tergantung tipe permasalahan dan lingkungan yang ditemui. Pendekatan ini sangat menitikberatkan pandangan bahwa perubahan yang terjadi di dalam lingkungan modern yang kompleks membutuhkan para perencana ahli yang mempunyai berbagai kemampuan teknis termasuk kemampuan untuk menggali dan menganalisis data-data penelitian kuantitatif serta mampu melakukan manuver-manuver terhadap organisasi birokratik besar yang kesemuanya itu dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan tersebut juga harus ditunjang dengan kemampuan lainnya di dalam menganalisis kebutuhan (*need assesment*), analisis keputusan, riset evaluasi, teknik delphi, komputer grafis, dan kemampuan untuk menggunakan berbagai macam alat-alat statistika.

c. *Social Action*

Tujuan dan sasaran utama *social action* adalah perubahan-perubahan fundamental di dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini menggunakan cara-cara yang “militan” dengan advokasi sebagai taktik dan alat utama pencapaian tujuan.

Para praktisi yang menggunakan aksi sosial umumnya bertujuan untuk membantu golongan masyarakat miskin, lemah dan tertindas dengan berdasarkan prinsip keadilan sosial yang dominan. Oleh karena itu, di dalam intervensi aksi sosial para praktisinya harus mampu untuk merubah keputusan-keputusan pemerintah baik legislatif atau keputusan politik lainnya apabila keputusan tersebut ternyata merugikan masyarakat. Cara-cara klasik yang sering pula dipergunakan di dalam aksi sosial ini ialah demonstrasi, penyerangan, boikot, pembangkangan sipil, dan gerakan-gerakan lainnya yang bersifat menggunakan kekuatan massa. Selain itu, di dalam aksi sosial membangun koalisi menjadi perhatian utama aksi sosial ini dilakukan sebagai konsekuensi akibat tidak dimilikinya sumber dana, jaringan, dan keahlian di masyarakat sehingga penggunaan “*people power*” merupakan cara yang potensial untuk menekan struktur kekuasaan yang menindas.

Ketiga model pemberdayaan masyarakat dari Rothman ini di dalam kenyataannya tidak selalu berdiri sendiri tetapi saling tumpang tindih (*overlapping*) dan menghasilkan keterpaduan antara Model A dengan B, Model B dengan C dan model C dengan A. Keterkaitan antara ketiga model pemberdayaan masyarakat dengan 12 variabel situasi kemasyarakatan digambarkan secara ringkas pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1.4. Matriks Karakteristik Tiga Model Pemberdayaan Masyarakat

Variabel	Model A (Pembangunan masyarakat Lokal)	Model B (Perencanaan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Orientasi tujuan	Kemandirian, integrasi & kemampuan masyarakat (tujuan proses)	Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat	Perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses & tugas)
2. Asumsi mengenai struktur masyarakat & kondisi masalah	Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah	Masalah sosial nyata: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja	Ketidakadilan, kesengsaraan, ketidakmerataan, ketidaksetaraan
3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat	Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaan yang dapat diselaraskan	Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan	Konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan: ketiadaan sumber
4. Konsepsi mengenai kepentingan umum	Rasionalis-uniter	Idealis-uniter	Realis-individualis
5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan	Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor	Struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi elit kekuasaan harus

			dihilangkan
6. Sistem klien atau sistem perubahan	Masyarakat secara keseluruhan	Seluruh atau sekelompok masyarakat, termasuk masyarakat fungsional	Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu
7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan	Warga masyarakat atau negara	Konsumen	Korban
8. Peranan masyarakat	Partisipasi dalam proses pemecahan masalah	Konsumen atau penerima pelayanan	Pelaku, elemen, anggota
9. Peranan pekerja sosial	Pemimpin, koordinator, pembimbing	Peneliti, analis, fasilitator, pelaksana program	Aktivis advokasi: agitator, broker, negosiator
10. Media perubahan	Mobilisasi kelompok-kelompok kecil	Mobilisasi organisasi formal	Mobilisasi organisasi masa dan politik
11. Strategi perubahan	Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah	Penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli	Katalisasi dan pengorganisasian masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan
12. Teknik perubahan	Konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, brainstorming, <i>role playing</i> , bimbingan dan penyuluhan.	Advokasi, andragogi, perumusan kebijakan, perencanaan program	Konflik atau unjuk rasa, konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi massa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, negosiasi, pembelaan

Sumber : Suharto (1997)

Berbagai perubahan dialami masyarakat di dunia ini. Bahkan perubahan-perubahan tersebut makin hari terasa makin cepat berjalan dengan arah yang tak terduga. Perubahan meliputi berbagai hal mulai dari yang kasat mata sampai pada yang tampak tapi terasa seperti perubahan ekspektasi dan aspirasi warga masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam cara organisasi memandang dan membangun hubungan dengan komunitas merupakan akibat dari perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai dan ekspektasi komunitas itu sendiri.

Perubahan ekonomi komunitas oleh Perry (2001) didefinisikan sebagai proses yang didalamnya warga masyarakat lokal membentuk organisasi dan membangun kemitraan yang terkait satu sama lain dengan bisnis yang menguntungkan. Dalam pengembangan ekonomi komunitas; makin banyak orang yang terlibat akan menunjukkan perubahan komunitas, makin banyak pula organisasi yang bertindak dan berupaya mendorong keinginan dan cita-cita komunitas secara keseluruhan.

Perry (2001) menyebutkan beberapa karakteristik program pengembangan ekonomi komunitas yang efektif yaitu:

1. Bersifat multifungsi dengan strategi yang komprehensif untuk berbagai kegiatan yang berjalan, sehingga berbeda dengan proyek-proyek pengembangan ekonomi individu atau upaya-upaya perbaikan komunitas.
2. Mengintegrasikan atau memadukan tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial untuk revitalisasi komunitas yang lebih jauh.
3. Mendasarkan operasinya pada prinsip memberdayakan lebih banyak penduduk melalui tata laksana pengembangan organisasi dan komunitasnya secara keseluruhan.
4. Prosesnya diarahkan pada hasil analisis dari perencanaan strategis yang berbeda dengan taktik oportunistik dan tidak sistematis.
5. Menggunakan pendekatan manajemen keuangan yang dijalankan dunia bisnis guna membangun pemilikan asset dan mendapatkan dukungan mitra finansial lain yang beragam.
6. Bersifat publik baik untuk entitas yang berorientasi keuntungan maupun berorientasi publik, watak publik menjadi fokus perhatian program.

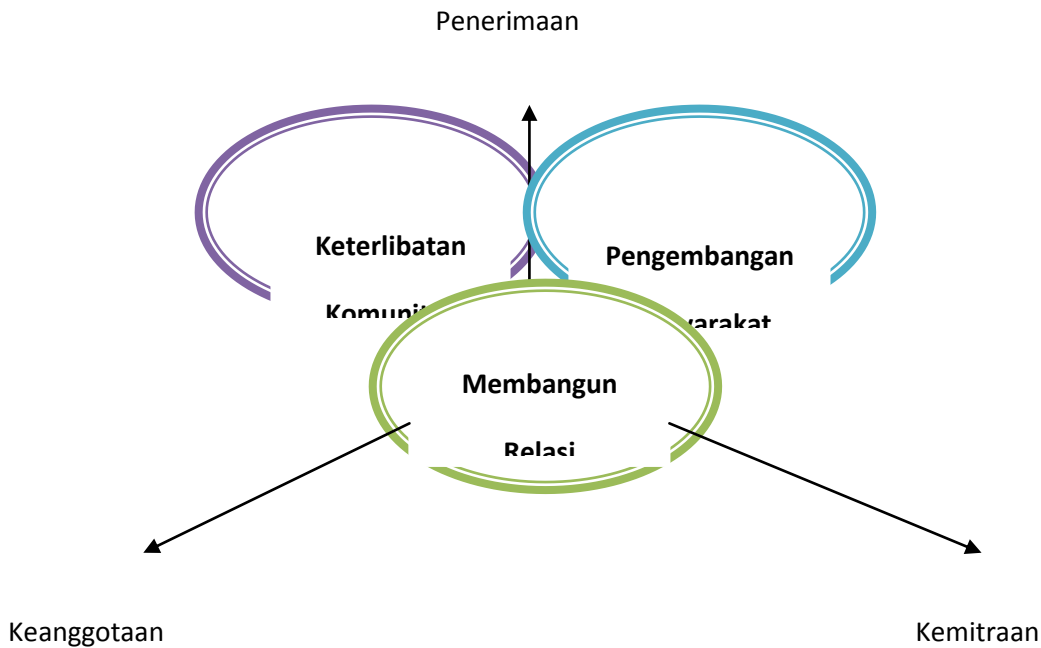
Dalam konteks melakukan perubahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, Natural Resources Canada (2004) menunjukkan 5 aspek yang mesti diperhatikan; yakni visi, keterampilan, insentif, sumber daya dan rencana aksi. Visi akan memperjelas arah perubahan yang dilakukan organisasi. Keterampilan diperlukan untuk menjalankan transformasi tersebut. Insentif diperlukan untuk mengupayakan perubahan dan rencana tindak bagaimana perubahan tersebut dijalankan. Apabila salah satu dari kelima aspek itu tak ada, maka perubahan yang diharapkan tidak akan terjadi.

Langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam konteks *community development* bisa dipandang sebagai bagian dari langkah untuk mengatasi permasalahan global tersebut. Karena itu, *community relation* bisa bermakna lebih dari sekedar membangun hubungan baik antara organisasi dan komunitas sekitarnya, melainkan juga bisa berperan melalui tindakan-tindakan pada tingkat lokal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan global. *Community development* bisa dipandang sebagai sumbangan kecil yang berarti yang diberikan organisasi sebagai warga bersama dengan komunitas di sekitarnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan besar tadi pada tingkat lokal dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Mengingat *Community Development* berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan sosial yang nyata yang dihadapi komunitas sekitar organisasi. Melalui pendekatan *Community Development* itu, organisasi bersama-sama dengan komunitas sekitarnya berusaha untuk mengidentifikasi, mencari solusi dan melaksanakan rencana tindak atas permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal ini fokusnya adalah permasalahan yang dihadapi komunitas, bukan permasalahan yang dihadapi organisasi. Namun dampak dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi komunitas itu akan dirasakan juga oleh organisasi, mengingat program-program *community development* dikembangkan untuk kemaslahatan organisasi dan komunitas. Lebih dari itu, kegiatan *Community Development* terkoordinasi dengan strategi organisasi, bisa juga membantu organisasi. Mengembangkan kemitraan merupakan salah satu praktik *community development* yang dijalankan organisasi.

Gambar 1.2. Kegiatan komunitas organisasi (sumber : WMMC Resources Ltd)



2.3. Masyarakat dan Budaya

Selo Sumarjan (Soekanto, 2003) menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat sebagai obyek sosiologi menurut Ralph Linton (Soekanto, 2003) merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Kebudayaan (*culture*) adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Menurut Koentjaraningrat (1979) *culture* mempunyai kesamaan arti dengan kebudayaan yang artinya mengolah atau mengerjakan seperti mengolah tanah atau bertani. *Culture* diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan perilaku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Edward B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* (1971) telah memberikan satu definisi yang klasik mengenai konsep kebudayaan: "Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebebasan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat."

Kebanyakan definisi Antropologi dan Sosiologi mengenai kebudayaan dibuat berdasarkan kepada definisi tersebut. Begitu banyak ahli antropologi dan sosiologi yang menekankan hakikat bahwa kebudayaan atau perilaku itu dipelajari. Dengan demikian proses pembelajaran mesti dijadikan tumpuan analisis. Clyde Kluckhohn menganggap aspek ide sebagai yang paling penting dari kebudayaan.

Robert Redfield juga menekankan aspek ide dalam konsepsinya mengenai kebudayaan ketika ia menganggap kebudayaan sebagai "pengertian yang disetujui bersama" (*The Folk Culture of Yucatan*, 1941).

Malinowski dalam *A Scientific Theory of Culture* (1944) berpendapat bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah suatu respon terhadap keperluan-keperluan manusia.

Sebagai keseluruhan cara hidup manusia, kebudayaan meliputi kehidupan kelompok yang bercorak material dan immaterial. Budaya kebendaan atau *artifact* merupakan ciptaan manusia yang berbentuk objek-objek tertentu seperti alat, bangunan, senjata, kendaraan, dll. Budaya bukan material atau *mentifact* adalah suatu ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat istiadat, hukum, dan sebagainya.

Tiap-tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, tetapi kebudayaan itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Namun, beberapa aspek yang sama terdapat di kalangan semua masyarakat (seperti bahasa, objek-objek material, pelaksanaan keagamaan, sistem kekeluargaan, nilai, kesenian, dan lain-lain). Inilah yang dikatakan dengan pola kebudayaan universal (*universal pattern of culture*).

Perubahan merupakan sifat penting bagi suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah satu proses revisi bagian-bagian atau aspek-aspek kebudayaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kebudayaan yang mengalami perubahan yang paling lambat dikatakan statis sementara kebudayaan yang mengalami perubahan pesat dikatakan dinamis.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi bahwa kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan E.B. Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan totalitas pengalaman manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kapabilitas serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

C. Kluckhohn menghimpun dan menerbitkan kembali 164 definisi kebudayaan yang dikelompokkan menjadi enam: deskriptif, historis, normatif, psikologis, struktural, dan genetik (Saifuddin, 2005). Melalui '*Universal Categories of Culture*,' Kluckhohn merumuskan 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu :

- a. Sistem teknologi yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia
- b. Sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, dan lainnya)
- c. Sistem kemasyarakatan (kekerabatan, organisasi politik, dll.)
- d. Bahasa (lisan dan tulisan)
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb.)
- f. Sistem pengetahuan
- g. Religi (Sistem kepercayaan)

Sedangkan Melville J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan yakni:

- a. Alat-alat teknologi
- b. Sistem ekonomi
- c. Keluarga
- d. Kekuasaan Politik

Para sosiolog maupun antropolog telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan (Soekanto, 2005:303). Perubahan sosial dan budaya berlangsung terus menerus dan tidak dapat dihentikan. Hanya tingkat kecepatan dan arah sajalah yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan antara perubahan sosial (*social change*) dengan perubahan budaya (*cultural change*).

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial antara lain meliputi perubahan dalam segi distribusi kelompok usia, tingkat kelahiran penduduk, tingkat pendidikan rata-rata, penurunan kadar rasa kekeluargaan dan informalitas antar tetangga karena adanya perpindahan orang dari desa ke kota, dan perubahan peran suami sebagai atasan kemudian menjadi mitra (partner) istri dalam keluarga demokratis dewasa ini. Perubahan budaya dapat meliputi antara lain penemuan dan penyebaran mobil, penambahan kata-kata baru terhadap bahasa kita, perubahan konsep tata susila dan moralitas, bentuk seni baru (musik, tari, dll.), dan kecenderungan masyarakat yang menghendaki adanya persamaan seksual (*sex equality*).

Namun demikian, konsep-konsep tersebut saling tumpang tindih. Kecenderungan persamaan seksual berkaitan dengan perubahan seperangkat norma budaya menyangkut peran pria dan wanita, dan juga berkaitan dengan perubahan hubungan sosial. Hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, dalam penggunaan kedua istilah tersebut perbedaan diantara keduanya tidak terlalu diperhatikan. Di samping itu, kedua istilah tersebut seringkali ditukar-pakaikan. Kadangkala digunakan istilah perubahan sosial budaya (*sociocultural change*) agar dapat mencakup kedua jenis perubahan tersebut (Harton dan Chester L.Hunt, 1992:208).

Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sebagai contoh dikemukakannya perubahan pada logat bahasa Aria setelah terpisah dari induknya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan ketimbang perubahan sosial. Ruang lingkup kebudayaan lebih luas. Sudah barang tentu ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial.

Seorang Sosiolog akan lebih memperhatikan perubahan kebudayaan yang bertitik tolak dan timbul organisasi sosial, serta mempengaruhinya. Pendapat tersebut dapat dikembalikan pada pengertian sosiolog tentang masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat, menurut Kingsley Davis, adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antara organisasi-organisasi, dan bukan hubungan antara sel-sel. Masyarakat dapat dilihat dari dua jenis, yaitu *gemeinschaft* atau komunitas (paguyuban) dan *gesellschaft* atau masyarakat (patembayan).

Dari segi hubungan sosial, *gemeinschaft* meliputi interaksi sosial yang melibatkan hubungan primer yang rapat dan berhadap-hadapan (*face-to-face*); dan adanya tradisi dan cita-cita yang sama. Sebaliknya *gesellschaft* merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang lebih spesifik, impersonal dan instrumental. Hubungan sosial yang terlibat bersifat sekunder dan hanya melibatkan sebagian dari jumlah individu dalam kelompok tersebut. Dari segi jenis sosial, *gemeinschaft* adalah masyarakat yang mempunyai hubungan sosial berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang rapat. *Gesellschaft* adalah jenis masyarakat yang mempunyai hubungan sekunder yang lebih kuat. Ikatan sosial lebih bercorak sukarela, kontraktual, dan berdasarkan kepada kepentingan diri sendiri.

Max Weber mengaitkan kedua konsep tadi dengan proses integrasi pelaku ke dalam suatu komunitas atau masyarakat. Jika proses integrasi itu mengakibatkan *gemeinschaft*, atau komunitas, dasar untuk komunitas itu adalah perasaan kekitaan (*ourness*) yang dialami oleh para pesertanya, satu perasaan yang motivasinya bercorak afektif atau tradisi. Kalau proses integrasi itu mengadakan *gesellschaft* atau

masyarakat, maka motivasi perilaku sosial lebih melibatkan perkiraan atau hubungan kepentingan (Aron, 1965: 235).

Pada umumnya, *gemeinschaft* merujuk kepada masyarakat pra-industri, sementara *gesellschaft* mewakili masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan proses perindustrian. Tetapi perlu diingat bahwa kedua konsep tersebut merupakan bikinan tipe ideal (*ideal type constructs*). Apa yang ada dalam kenyataan adalah hampir-hampir mirip. Contoh yang asli sukar ditemui.

Sementara itu, kebudayaan dikatakan Davis mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan bukan karena warisan yang berdasarkan keturunan. Apabila diambil definisi kebudayaan dari Tylor yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan-perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut.

Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan jelas mempunyai satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Soekanto, 2005:309).

Masalah yang muncul, kemudian, dalam pembicaraan tentang pembangunan di wilayah pedesaan ini adalah budaya masyarakat desa. Ciri-ciri masyarakat pedesaan biasanya diidentikkan dengan sistem sosial dan budaya yang bersifat tradisional. Banyak literatur yang membahas tentang hal tersebut, antara lain Rogers dan Shoemaker yang mengungkapkan 6 point, yakni:

- 1) Kurang berorientasi pada perubahan.
- 2) Kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana.
- 3) Relatif rendah kemelekhurufan (*literacy*), pendidikan dan pemahamannya terhadap metode ilmiah.
- 4) Hubungan interpersonal masih sangat efektif.
- 5) Sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dengan pihak luar.
- 6) Kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan orang di luar sistem (Hanafi, 1987).

2.4. Lingkungan dan Pariwisata

Sejak awal perkembangan kapitalisme sumberdaya alam telah dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang cukup penting, selain faktor sumberdaya manusia, dan modal. Secara teoretik, kapitalisme – sebagai ideologi – bertujuan melakukan pemupukan modal (*capital accumulation*) melalui proses-proses penanaman modal (*capital investment*). Dalam prakteknya ideologi ini akan mendorong terjadinya ekspansi keluar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku, dan mencari tenaga kerja semurah mungkin. Globalisasi dan penanaman ideologi pasar bebas merupakan salah satu bentuk rekayasa pengembangan ideologi imperialisme baik secara halus, yang dengan mudah diakses oleh negara-negara sedang berkembang.

Berkembangnya upaya masing-masing negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro yang mementingkan orientasi pertumbuhan dan mekanisme pasar, merupakan salah satu bentuk kemenangan imperialisme dan kapitalisme. Hampir sebagian besar negara sedang berkembang tampaknya berusaha mengejar pertumbuhannya, dengan melakukan berbagai cara, termasuk eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya alamnya. Eksplorasi hutan tropis - yang menjadi kekayaan

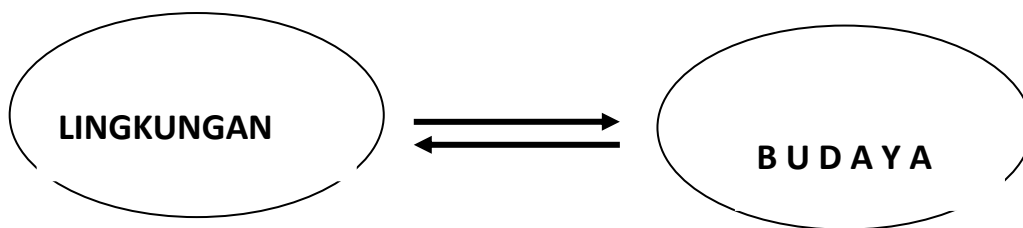
Indonesia - secara besar-besaran sejak tahun 1980-an yang lalu sebenarnya juga merupakan upaya pemerintah rezim Orde Baru dalam rangka mengejar pertumbuhan. Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan hutan melahirkan persaingan kepentingan dan keragaman struktur sosial di dalamnya. Persaingan kepentingan itu antara lain melibatkan berbagai pihak seperti: 1) pemerintah, baik pusat maupun daerah; 2) pelaku bisnis, terutama pengusaha dan investor yang menanamkan usahanya di sektor sumberdaya alam; 3) masyarakat sekitar daerah eksploitasi; dan 4). Organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi (Usman, 2001).

Dampak terbatasnya sumberdaya alam dan munculnya berbagai kepentingan ini melahirkan konflik-konflik yang berakibat ketidakharmonisan hubungan, Pelly (1993) menyebutnya sebagai ketidakserasian sosial.

Deforestasi merupakan akibat dari berbagai macam kekuatan. Namun deforestasi berskala besar yang paling mengancam ditimbulkan oleh tekanan kemiskinan dan tekanan keserakahan. Persoalan-persoalan sosial yang tak terpecahkan seringkali mengkondisikan kerusakan lingkungan, sementara ketamakan atau keserakahan sejumlah orang yang tidak dibatasi mengkondisikan kebiasaan untuk menghambur-hamburkan sumberdaya alam (Goeltenboth, 1992:31)

Di sinilah diperlukannya kesadaran yang dapat menyambungkan antara budaya dan lingkungan, bahwa jika budayanya merusak maka lingkungannya pun akan menjadi rusak. Sebetulnya, hubungan antara budaya dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Alam dan lingkungan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian dan keberlangsungan hidupnya karena ia melindungi kehidupan manusia, dan menjaganya. Maka manusiapun harus mampu menjaga segala kekayaan alam seperti air, tanah, udara, pepohonan dan potensi sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan Teori Ekologi Budaya yang dikembangkan oleh ahli sosiologi lingkungan Julian H. Steward dijelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan, budaya dengan lingkungan saling memiliki ketergantungan, dan tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya saling membutuhkan. Budaya mempengaruhi lingkungan begitu juga sebaliknya.



Gambar 1.3. Hubungan antara budaya dan lingkungan dalam Teori Ekologi Budaya (Steward, 1930)

Sistem budaya yang beraneka ragam dan juga lingkungan hidup yang sangat khas harus dipahami dan disadari sebagai sumber daya atau modal sosial (*social capital*) yang telah tersedia di masyarakat, walaupun di beberapa daerah sistem sosial budaya dan upaya memelihara alam lingkungan telah mengalami pergeseran bahkan tidak dipedulikan. Padahal jika potensi tersebut digarap secara optimal dan profesional akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Keunggulan dalam berbudaya itulah yang kemudian menimbulkan banyaknya orang yang berminat untuk mengunjungi, mempelajari, mengapresiasi, bahkan menghidupkan kehidupan masyarakat yang mempunyai dan mengembangkan budaya tersebut. Dari situ, lahirlah apa yang dinamakan sebagai pariwisata.

Pengertian pariwisata hingga sekarang masih belum begitu memasyarakat. Banyak istilah yang tidak tepat pemakaiannya, hingga bila diucapkan, terasa janggal didengarnya apalagi ucapan yang keliru itu diucapkan oleh para pejabat-pejabat yang membenahi kepariwisataan itu sendiri (Yoeti, 1996: 108).

Ditinjau dari etimologis, kata pariwisata berasal dari Sansekerta, dan bersinonim dengan kata *tour* (dalam bahasa Inggris). Kata ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata "*pari*" dan "*wisata*". *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap dan kata *wisata* berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*travel*" dalam bahasa Inggris.

Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ketempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*tour*", sedangkan untuk pengertian jamak, kata kepariwisataan dapat digunakan kata "*tourisme*" atau "*tourism*" (Yoeti, 1996:112-113).

Pariwisata sering juga diartikan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Menurut Prof. Marioti, objek wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang dapat berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata (Yoeti, 1996:172). Di antara objek-objek wisata itu adalah:

- a. Benda-benda yang tersedia yang terdapat di alam semesta, yang dalam istilah pariwisata disebut dengan istilah *Natural Animities*. Termasuk kelompok ini adalah:
 - 1) Iklim, misalnya cuaca cerah (*clean air*), banyak cahaya matahari (*sunny day*), iklim yang sejuk, dan sebagainya.
 - 2) Bentuk tanah dan pemandangan, misalnya tanah yang datar, lembah pegunungan, sungai, pantai, gunung berapi, dan pemandangan menarik lainnya.
 - 3) Flora dan fauna, seperti tanaman dan binatang yang langka, kawasan yang termasuk cagar alam, daerah perburuan dan sebagainya.
 - 4) Pusat-pusat kesehatan dan yang termasuk kelompok ini, misalnya sumber air mineral, sumber air panas, mandi lumpur, yang kesemuanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
- b. Hasil cipta manusia. Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain:
 - 1) Benda-benda yang bersejarah, kebudayaan dan keagamaan. Misalnya, monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau, museum, galeri, kesenian rakyat, acara tradisional, pameran pestival, upacara perkawinan, dan rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, kuil atau candi maupun pura.
 - 2) Tata cara hidup masyarakat (*the way of life*). Tata cara tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, budayanya; semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan yang memasuki daerah tersebut. Hal semacam ini sudah terbukti, betapa pengaruhnya dan dapat dijadikan *events* yang dapat dijual oleh *Tour Operator*. Contoh yang terkenal diantaranya: Pembakaran mayat di Bali, Upacara pembakaran mayat di Tana Taroja, Upacara Batanagak penghulu di Minangkabau, Upacara khitanan di daerah Parahyangan, Upacara Sekaten di Yogyakarta, *Tea ceremony* di Jepang, Upacara Waisyak di Candi Mendut dan Borobudur, dan lain-lain.

Pariwisata adalah fenomena yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan dan sebagainya, yang merupakan kajian objek sosiologi. Namun demikian kajian sosiologi belum begitu lama dilakukan terhadap pariwisata yang sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, dan tujuan utama pembangunan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun bagi daerah (negara).

Sebagaimana halnya dengan pembangunan secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan aspek-aspek sosial budaya atau sosiologis yang kurang mendapat perhatian. Dengan mengikuti teori modernisasi klasik, pembangunan di dunia ketiga umumnya memberi penekanan pada aspek ekonomi. Paradigma dan program-program yang memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi acapkali bertentangan dengan program-program dan penekanan dengan aspek sosial. Dalam konflik kepentingan ini, aspek sosial lebih sering kali dikalahkan. Masih dalam kaitannya dengan fokus ekonomi, salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mengejar produktivitas, dan dalam usaha ini manusia dipandang sebagai faktor produksi, sama halnya dengan faktor produksi tanah, alam, dan manajemen. Karena dipandang hanya sebagai salah satu faktor produksi yang mekanis, maka berbagai aspek sosial budaya kurang mendapatkan perhatian.

Faktor lain yang memarginalisasi aspek budaya adalah karena *performance indicator* (kinerja atau ukuran keberhasilan) umumnya diukur secara statistik atau kuantitatif. Sementara itu sebagian besar dari isu sosial budaya bersifat kualitatif, sehingga tidak termasuk ke dalam indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak memberikan perhatian serius terhadap aspek sosial budaya ini.

Pembangunan perencanaan dari luar, sesuai dengan dalil-dalil modernisasi, sering kali tidak sadar membawa nilai-nilai luar, serta memaksakan nilai-nilai tersebut di daerah yang dibangun. Etnosentrisme perencana (konsultan) luar ini didukung kemudian oleh sentralisasi pengambilan keputusan, dimana masyarakat lokal tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup atau menentukan masa depan mereka.

Belakangan, aspek sosial budaya mulai diperhatikan karena berbagai alasan. Di kalangan para ahli pembangunan, mulai muncul wacana bahwa pembangunan tersebut sesungguhnya untuk manusia, sebagai suatu proses belajar (*social-learning process*). Dan dalam hal ini manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus siap untuk membangun tersebut dilakukan, sesuai dengan konsep *people-centred development*. Maka di sini manusia bukan sekedar dijadikan faktor produksi.

Kritik tajam juga banyak ditujukan kepada teori modernisasi klasik, dan mengingatkan pentingnya unsur non-material dalam pembangunan, seperti *human dignity* (Julius Nyerere), *social needs* (Maslow), *spiritual needs* (Apthorpe). Menurut paham humanisme, pembangunan harus diusahakan untuk "memanusiakan manusia". Dalam pemanusiaan manusia ini, pembangunan harus memberikan penghargaan terhadap nilai rasa, yang mungkin tidak rasional dalam konsep Weberian, tetapi sangat rasional dalam konsep masyarakat lokal (Pitana dan Gayatri, 2005:33).

Pengalaman empiris juga telah banyak membuktikan bahwa begitu banyak dana dan waktu dikeluarkan untuk melakukan pembangunan, tetapi mengalami kegagalan. Tidak jarang pembangunan justru mengundang protes dari masyarakat di mana pembangunan dilaksanakan. Kegagalan program yang tidak adaptif secara sosial budaya ini memberikan pelajaran penting, betapa aspek sosial budaya ini harus mendapatkan tempat dalam perencanaan pembangunan, bukan hanya sebagai aspek penggiran.

Dalam pembangunan pariwisata ini harus selalu diingat bahwa, pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang benar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai beberapa aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari sub-sistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait. Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut menjadi hubungan interdependensi, yang berarti perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem yang lain, sampai akhirnya ditemukan harmoni yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Nill dan Morrison, pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba (Pitana dan Gayatri, 2005:91).

Analisis sosiologi terhadap pariwisata sangat penting dilakukan dengan mengingat berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Pariwisata telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai “industri terbesar sejak abad ke-20” (WTO, 2000) yang juga menyangkut “pergerakan barang, jasa dan manusia dalam skala besar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia”. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata memang telah terbukti menjadi industri terbesar di berbagai belahan dunia.
- b. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan, ketertiban, keramah-tamahan, kebudayaan, kesehatan dan seterusnya, termasuk berbagai institusi sosial yang mengaturnya.
- c. Pariwisata bersifat sangat dinamis, sehingga setiap saat memerlukan analisis atau kajian yang lebih tajam. Sebagai suatu aktivitas dinamis, pariwisata memerlukan kajian terus-menerus (termasuk dari aspek sosial budaya), yang juga harus dinamis, sehingga pembangunan pariwisata bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat lokal.
- d. Pariwisata tidaklah eksklusif, dalam arti bahwa pariwisata bukan saja menyangkut suatu bangsa tertentu (Barat), melainkan juga dilakukan oleh hampir semua ras, etnik, dan bangsa, sehingga pemahaman aspek-aspek sosial budaya sangat penting.
- e. Pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, yang mempunyai perbedaan dalam norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Pertemuan manusia atau masyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda akan menghasilkan berbagai proses akulturasi, dominasi, asimilasi, adopsi, adaptasi dan seterusnya dalam kaitan hubungan antar budaya, yang tentu saja merupakan salah satu isu sentral dalam sosiologi.
- f. Dewasa ini pariwisata sudah hampir menyentuh semua masyarakat dunia, sampai kepada masyarakat-masyarakat yang dulu dikenal sebagai masyarakat terpencil pun kini sudah dirambah pariwisata dengan berbagai derajat pengaruh. Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu *prime mover* dalam perubahan sosial budaya, sedangkan perubahan sosial-budaya merupakan aspek kemasyarakatan yang menjadi salah satu fokus kajian sosiologi.
- g. Berkembangnya berbagai lembaga, baik di tingkat lokal, regional, ataupun internasional, yang terkait dengan pariwisata, juga merupakan salah satu perhatian dalam sosiologi, sebagaimana sebelumnya sosiologi telah membahas berbagai aspek modernisasi dan dependensi dari hubungan antar negara.

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen, 1984) yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga-harga

5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
7. Dampak terhadap pembangunan dan umumnya
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Peranan pariwisata juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, walaupun tidak ada angka pasti untuk sektor pariwisata dalam catatan statistik.

Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif), seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi, munculnya neo-kolonialisme atau neo-imperialisme dan sebagainya.

Secara teoretikal-idealistis, antara dampak sosial dan dampak kebudayaan dapat dibedakan. Namun demikian, Mathieson dan Wall (1982:37) menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara fenomena sosial dan budaya, sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata ke dalam judul 'dampak sosial-budaya'.

Menilai dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, terutama dari segi metodologis. Salah satu kendala yang hampir tidak bisa diatasi adalah banyaknya faktor kontaminasi yang ikut berperan di dalam mempengaruhi perubahan yang terjadi. Adalah sangat sulit mengisolasi suatu faktor penyebab, karena masyarakat tidak dapat diperlakukan seperti memperlakukan *specimen* dalam laboratorium, di mana berbagai faktor dapat dikontrol. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, harus dilihat bahwa ada banyak faktor lain yang ikut berperan dalam mengubah kondisi sosial-budaya tersebut, seperti pendidikan, media masa, transportasi, komunikasi maupun sektor-sektor pembangunan lainnya yang menjadi wahana dalam perubahan sosial-budaya, serta dinamika internal masyarakat itu sendiri.

Perlu juga dikemukakan bahwa dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama – bahkan bisa bertolak belakang – dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena penilaian positif maupun negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung 'nilai', sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama dengan segenap kelompok masyarakat. Artinya dampak positif dan negatif masih perlu dipertanyakan, "positif menurut siapa, negatif menurut siapa?"

Studi tentang dampak sosial-budaya pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, dengan tiga asumsi yang umum, yaitu (Martin, 1998:171):

- 1) Perubahan dibawa sebagai akibat adanya instruksi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah.
- 2) Perubahan tersebut umumnya bersifat destruktif bagi budaya *indigenous* (asli pribumi).
- 3) Perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, di mana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi Barat, birokrasi nasional dan multinasional, ekonomi yang berorientasi konsumsi, dan gaya hidup mewah.

Wood (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:116-117) selanjutnya menganjurkan di dalam melihat pengaruh pariwisata terhadap masyarakat (dan kebudayaan) setempat, harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdiferensiasi, aktif, dan selalu berubah. Oleh karena itu pendekatan yang kiranya lebih realistis adalah dengan menganggap bahwa pariwisata adalah pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat, di mana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya.

Secara teoretis, Cohen (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:117) mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar, yaitu:

- 1) Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya.
- 2) Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat.
- 3) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial.
- 4) Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata.
- 5) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.
- 6) Dampak terhadap pola pembagian kerja.
- 7) Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial.
- 8) Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan.
- 9) Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial.
- 10) Dampak terhadap bidang kesenian dan adat-istiadat.

Pariwisata juga dapat mengubah struktur internal masyarakat, sehingga terjadi perbedaan antara mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan pariwisata dan mereka yang tidak (Pitana dan Gayatri, 2005:123).

2.5. Ekonomi Kreatif

Ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov, 2007: 2-3).

Persoalan ekonomi timbul dari penggunaan sumber yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan tak dapat dihindarkan dan merupakan inti persoalan ekonomi (Lipsey dkk., 1988: 11).

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu wilayah tertentu (Deliarnov, 2007:3).

Sedangkan pengertian sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dari pengertian ini, sosiologi ekonomi berkaitan dengan fenomena ekonomi dan pendekatan sosiologis.

Fenomena ekonomi adalah gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya atas barang dan jasa. Yang dimaksud dengan cara adalah semua aktivitas orang dan masyarakat

yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi jasa dan barang langka (Philipus, 2006: 65).

Berbeda dengan ekonomi, pendekatan sosiologis adalah kerangka acuan, variabel-variabel, dan model-model yang digunakan oleh para sosiolog untuk memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Weber yang dikutip oleh Philipus (2006: 67-68) menetapkan tiga unsur ekonomi yang berbeda dari sosiologi ekonomi, yaitu:

- 1) Tindakan ekonomi adalah sosial
- 2) Tindakan ekonomi mengandung makna
- 3) Tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan

Sejalan dengan itu sosiologi ekonomi memusatkan perhatiannya pada tiga hal, yaitu:

- 1) Analisis sosiologi terhadap proses ekonomi, misalnya dalam proses pembentukan harga pelaku ekonomi.
- 2) Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan instansi lain dari masyarakat, misalnya hubungan antara ekonomi dengan agama.
- 3) Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan di kalangan santri.

Yang sangat penting dalam pembahasan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup ini adalah keberadaan pasar atau kegiatan pemasaran (*marketing*). Sebab, pemasaran itulah yang akan menghidupkan pengembangan ekonomi masyarakat. Tanpa pemasaran, sehebat dan semenarik apapun hasil budaya suatu masyarakat, tidak akan menghasilkan kegiatan ekonomi yang pada saatnya akan menjadi modal untuk menghidupkan budaya masyarakat tersebut. Di sinilah perlu dicatat kesimpulan dari Chriss Manning, Hal Hil, Ross McLeod dan Howard Dick yang menyatakan bahwa yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi melainkan segmentasi pasar.

Pasar sendiri merupakan tempat tukar-menukar surplus produksi warga masyarakat. Dalam perkembangannya hingga sekarang ini pasar menjadi lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Dalam aktivitas pasar dapat dilihat hampir semua fenomena ekonomi yang berkaitan dengan lokasi, waktu, institusi dan proses di dalamnya. Selain itu terdapat aktor pasar, seperti pedagang, pembeli, produsen, konsumen, pekerja, pengusaha (Narwoko, 2011: 300).

Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual. Pasar sangat penting artinya bagi para pelaku ekonomi. Pemilik faktor-faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan, demikian juga barang-barang yang dihasilkan perusahaan dapat dijual kepada konsumen melalui pasar. Dengan demikian, pasar adalah tempat berinteraksi para pembeli dan penjual barang (Bangun, 2010: 97).

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar juga merupakan salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi yang tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang.

Secara sosiologis, pengertian pasar sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek-aspek ekonomis proses jual beli barang saja, tetapi pasar adalah pranata ekonomi sekaligus juga cara hidup; suatu gaya

umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat; dan suatu dunia sosial budaya yang nyaris lengkap dalam dirinya, sebagaimana ditegaskan Geertz dalam Narwoko (2011: 301).

Dahl dan Hammond yang dikutip oleh Yogi (2004: 5) memberikan pengertian pasar sebagai berikut: suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik dan institusional.

Pasar menurut Kotler yang dikutip oleh Yogi (2004: 5), terdiri dari semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin tersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.

Karena itu dalam pasar, khususnya pasar tradisional, harga sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Harga ditentukan oleh tingkat keakraban yang dibangun antara penjual dan pembeli.

Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan maka perkembangan pasar serta fasilitas perpasaran perlu diatur, sehingga dapat lebih berdaya guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur perencanaan, pembangunan, perijinan, serta pengawasan segala kegiatan perpasaran. Dengan memperhatikan struktur ekonomi masyarakat, maka prioritas diberikan kepada pedagang golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya dalam fasilitas pasar yang telah disediakan.

Menurut Cahyono (1983: 3-9) dalam kegiatan dan pelayanan sehari-hari, maka pasar bisa diklasifikasikan dalam beberapa bentuk seperti dijelaskan di bawah ini.

Dari segi sifat kegiatan dan jenis dagangannya, pasar dapat berbentuk:

1. Pasar eceran, adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil-kecilan, misalnya: per ikat, per butir, dan sebagainya.
2. Pasar grosir, adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar. Misalnya, per kuintal, per ton, dan sebagainya.
3. Pasar induk, adalah pasar yang menunjukkan perdagangannya sebagai pusat pengumpulan, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, pusat penyaluran barang-barang, antara lain: pasar induk sayur-mayur dan buah-buahan, pasar induk beras, dan sebagainya.
4. Pasar khusus, adalah pasar yang memperjual belikan jenis barang tertentu, misalnya: suku cadang, alat-alat teknik, pasar ikan, pasar ayam, pasar burung.

Dari segi ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensinya, pasar terbagi menjadi:

1. Pasar lingkungan, adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pasar wilayah, adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan pemukiman dan barang yang dijual lebih lengkap daripada pasar lingkungan.
3. Pasar kota, adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota dimana barang yang diperjual belikannya lengkap.

4. Pasar regional, adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi kawasan kota-kota besar.

Berdasarkan waktu kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi:

1. Pasar siang hari, adalah pasar yang kegiatannya antara jam 05.00-18.00 WIB.
2. Pasar malam hari, adalah pasar yang kegiatannya antara jam 18.00-05.00 WIB.
3. Pasar siang malam, adalah pasar yang kegiatannya sepanjang hari.

Dilihat dari keberadaan, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar niskala dan pasar nyata. Pasar niskala adalah pasar yang abstrak dimana barang yang diperdagangkan tidak sampai ke pasar dan proses jual beli hanya didasarkan pada contoh barang saja.

Pasar nyata adalah pasar yang proses jual belinya terjadi secara langsung dimana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan proses tukar menukar atau berjual beli barang dagangan (Narwoko, 2011: 300).

Sementara itu dari karakteristiknya, secara garis besar terdapat dua tipe pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern banyak berkembang di perkotaan yang ditandai sifatnya yang impersonal dan harga barang telah ditentukan secara pasti oleh penjualnya. Dalam pasar modern hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual. Harga yang terjadi bukan didasarkan pada interaksi yang erat antara penjual dengan pembeli. Harga yang terjadi tidak dipengaruhi oleh hubungan sosial antara penjual dan pembeli (Narwoko, 2011:301).

Sedangkan pasar tradisional menurut Geertz yang dikutip oleh Narwoko (2011: 301), bukanlah sekedar lapangan dengan bangsal-bangsal dan bangau-bangau yang terletak ditengah kota dimana orang diperbolehkan saling tipu. Tetapi lebih jauh dari itu, pasar adalah suatu lembaga perekonomian dan cara hidup yang keseluruhannya dibentuk dan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan pasar itu sendiri.

Sementara itu menurut Alice Dewey yang dikutip juga oleh Narwoko (2011: 301), dalam kehidupan pedagang dan segala aktivitas pasar tradisional disamping adanya hubungan ekonomis dan jalinan perdagangan antara pasar dan petani ternyata pola hubungan sosial perdagangan dan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya adalah suatu hal tidak kalah pentingnya.

Dalam pasar tradisional pedagang tidak memasang dan menentukan harga barang-barang yang diperdagangkan secara pasti seperti pasar modern. Harga ditentukan dengan cara proses tawar-menawar antara penjual dan calon pembelinya.

Namun, apa yang dipasarkan pada zaman sekarang bukan hanya barang. Jasa juga sekarang sudah merupakan komoditi yang diperdagangkan. Bahkan saat ini ide juga merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Demikianlah, sehingga muncul apa yang disebut ekonomi kreatif.

Dalam hubungannya dengan ekonomi kreatif, konsep ini merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian

gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.^[66]

Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Istilah ekonomi kreatif ini sendiri pertama kali didengungkan tokoh bernama John Howkins, penulis buku *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. Dia seorang yang multiprofesi. Selain sebagai pembuat film dari Inggris, ia juga aktif menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah Inggris sehingga banyak terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan ekonomi kreatif di kalangan pemerintahan negara-negara Eropa.

Menurut Howkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana *input* dan *output*-nya adalah gagasan. John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai "*the creation of value as a result of idea.*" Dalam sebuah wawancara bersama Donna Ghelfi dari World Intellectual Property Organization (WIPO), Howkins menjelaskan ekonomi kreatif sebagai "kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan."

Tokoh berikutnya seorang doktor di bidang ekonomi, Richard Florida, dari Amerika, penulis buku *The Rise of Creative Class* dan *Cities and the Creative Class*. Dia menyuarakan tentang industri kreatif dan kelas kreatif di masyarakat.

Pemenang Nobel di bidang ekonomi, Robert Lucas, mengatakan kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas golongan (*cluster*) orang-orang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuannya. Apa yang termasuk industri kreatif pada mulanya adalah periklanan, arsitektur, seni dan pasar antik, kerajinan tangan, desain, desain pakaian, film, video, *software*, musik, seni pertunjukan, penerbitan, komputer, tv, radio, dll. sekarang barangkali termasuk di dalamnya adalah seni-seni gadget seperti *hand phone*, *smart phone*, dll.

United Nations Conference on Trade and Development mendefinisikan ekonomi kreatif "*An evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development.*"

Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) mendefinisikan industri kreatif sebagai *Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content.*

Riset oleh New England Foundation of the Arts (NEFA) menyebutkan:

Therefore, our definition of the creative economy is represented by the 'cultural core.' It includes occupations and industries that focus on the production and distribution of cultural goods, services and intellectual property. Excluded are products or services that are the result of non-culturally based innovation or technology. While a broader notion of the creative economy is valuable to examine, we concentrate on what could be considered the cultural component of the creative economy.

Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai "Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya."

Di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif didorong dengan diluncurkannya program Indonesia Design Power (IDP) pada 2006. IDP merupakan program untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, sektor ekonomi kreatif makin berkembang pesat di beberapa kota besar. Melalui inisiatif komunitas anak muda di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta industri kreatif telah tumbuh subur dan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat.

Benih yang memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal telah mampu melahirkan karya film, animasi, fashion, musik, *software*, *game* komputer, dan sebagainya. Beberapa di antara pelaku ekonomi kreatif ini malah mendapatkan kesempatan menampilkan karyanya di ajang internasional.

Mantan staf khusus Menteri Perdagangan yang ikut mengembangkan cetak biru (*blue print*) industri ekonomi kreatif, Rhenald Kasali, mengatakan industri kreatif pada intinya membuat produk dan/atau jasa. Jika dijalankan sebagai sebuah industri atau usaha ekonomi, mau tidak mau akan terkait dengan pengambilan risiko.

Hal itulah yang membuat hubungan industri kreatif dan wirausaha sangat berbeda. Inti dasar cetak biru itu adalah sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan kaum intelektual yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu, menurut Rhenald, pemerintah dan masyarakat perlu memikirkan kembali makna pembelajaran, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka, atau hanya untuk memintarkan secara akademis.

Menurut World Economic Forum, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh 1000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di Jenewa, kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tak lepas dari adanya peran kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja. Oleh karena itu, menurutnya, banyak negara secara aktif mempromosikan program kewirausahaan melalui berbagai bentuk dukungan dari negara.

Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk "*The Global Entrepreneurship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies*", menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total

penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.

Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP 10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK, 7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,7 juta orang (17,93 persen), dan berusaha sendiri sejumlah 19,4 juta orang (17,70 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,7 juta orang (3,39 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada bulan Agustus 2011 sebesar 29,89 juta (12,36 persen).

Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar 1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Bila dijumlahkan lulusan SMP yang tidak melanjutkan, putus sekolah menengah (SMA, SMK, dan MA), dan lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan mencapai 1.097.303 pada tahun 2008/2009. Angka ini belum termasuk jumlah lulusan perguruan tinggi (akademi dan sarjana) yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan, yang jumlahnya juga cukup tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap dan perilaku kewirausahaan sasaran didik, baik di sekolah-sekolah kejuruan, maupun di pendidikan profesional. Orientasi mereka, pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga kerja. Dari lain, secara historis masyarakat kita memiliki sikap feodal yang diwarisi dari penjajah Belanda, ikut mewarnai orientasi pendidikan kita. Sebagian besar anggota masyarakat mengharapkan output pendidikan sebagai pekerja, sebab dalam pandangan mereka bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah priyayi yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh warga masyarakat. Lengkaplah sudah, baik pendidik, institusi pendidikan, maupun masyarakat, memiliki persepsi yang sama terhadap harapan *output* pendidikan. Orang Jawa bilang “koyo tumbu oleh tutup”.

Berbeda dengan di negara maju, misalkan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bahwa sejak 1983 telah merasakan pentingnya pendidikan kejuruan (Schrag dan Poland, 1987). Pendidikan kejuruan yang dikembangkan diarahkan pada usaha memperbaiki posisi Amerika dalam persaingan ekonomi dan militer. Pendidikan kejuruan khususnya yang berkenaan dengan pendidikan bisnis, dikatakan bahwa dapat dilakukan pada setiap level pendidikan, baik pada level Sekolah Dasar; Sekolah Menengah; maupun di perguruan tinggi. Pendidikan bisnis di Amerika meliputi, pendidikan pekerja kantor, distribusi dan pemasaran, dan pemahaman ilmu ekonomi.

Lebih lanjut Scharg dan Poland (1987), mengatakan bahwa pendidikan Bisnis menyiapkan siswa untuk masuk dalam pekerjaan bisnis secara mahir, yang sama pentingnya, menyiapkan siswa untuk memimpin persaingan bisnis yang mereka miliki, dan sebagai konsumen yang pandai serta sebagai warga negara yang pandai dalam ilmu ekonomi bisnis. Dari batasan batasan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan bisnis di Amerika di arahkan kepada: 1) menyiapkan siswa sebagai pekerja yang cakap dalam dunia bisnis; 2) menyiapkan siswa sebagai pelaku bisnis yang handal; 3) menyiapkan siswanya sebagai konsumen yang rasional; 4) mengusahakan siswanya untuk menguasai ilmu ekonomi bisnis. Dalam kaitannya dengan menyiapkan siswa sebagai pelaku bisnis, tidak lepas dengan penciptaan wirausahawan.

Schumpeter, sebagaimana dikutip Bygrave (1996) dalam bukunya, *Entrepreneurship*, mengatakan seorang wirausahawan adalah individu yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya (mengejar peluang). Sedang Drucker (1996), mengatakan bahwa wirausaha selalu mencari perubahan, menanggapiya dan memanfaatkannya sebagai peluang. Oleh karena itu, dapatlah kita katakan bahwa seorang *entrepeneur* adalah pribadi yang mencintai perubahan, karena dalam perubahan tersebut peluang selalu ada. Ia akan selalu mengejar peluang tersebut dengan cara menyusun suatu organisasi. Sebagai suatu proses kewirausahaan menyangkut segala fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk mengejarnya (Bygrave, 1996). Karena itu, jika pendidikan bisnis memiliki misi melaksanakan pendidikan wirausahawan, maka sudah selayaknya kurikulum dan strategi pembelajarannya mengalami perubahan dan penyesuaian. Melihat karakter wirausahawan di atas, kelihatannya sulit pembentukan wirausahawan tercapai, manakala proses pembelajarannya tetap mempergunakan strategi yang boleh dikata “klasik”.

Menurut Scharg et. al. (1987) wirausahawan merupakan hasil belajar. Meskipun jiwa wirausahawan mungkin juga diperoleh sejak lahir sebagai bakat, namun jika tidak diasah melalui

belajar dan dimotivasi dalam proses pembelajaran, mungkin laksana pisau yang tumpul. Untuk mempertajam minat dan kemampuan wirausahawan perlu ditumbuh-kembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran. Di sinilah letak dan pentingnya pendidikan wirausahawan dalam pendidikan bisnis.

Terlepas dari tersebut di atas, sebenarnya sejak awal abad 19 Schumpeter (Budiono, 1999; Jinghan, 1999; Todaro, 1997) dalam teori pertumbuhan ekonominya telah mengatakan, bahwa di samping stok kapital dan teknologi telah membawa pertumbuhan ekonomi, satu hal lain yang tidak kalah penting adalah wirausahawan. Ia berpendapat, bahwa di dunia telah muncul pioner-pioner pertumbuhan ekonomi, yang dengan keahlian dan kreativitasnya pertumbuhan ekonomi telah berkembang, yakni wirausahawan. Banyak bermunculan wirausahawan kelas dunia telah lahir, yang dapat melakukan perubahan tatanan perekonomian dunia. Selanjutnya ia berpendapat bahwa di negara sedang berkembang umumnya kekurangan tenaga wirausahawan (Jinghan, 1999; Todaro 1997).

Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia termasuk masih kekurangan wirausahawan. Hal ini dapat dipahami, karena kondisi pendidikan di Indonesia masih belum menunjang kebutuhan pembangunan sektor ekonomi. Perhatikan, hampir seluruh sekolah masih didominasi oleh pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang konvensional. Mengapa hal itu dapat terjadi? Di satu sisi institusi pendidikan dan masyarakat kurang mendukung pertumbuhan wirausahawan. Di sisi lain, banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat mendorong semangat kerja masyarakat, misalkan kebijakan harga maksimum beras, maupun subsidi yang berlebihan yang tidak mendidik perilaku ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan kurangnya wirausahawan di negara kita, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menemukan model hipotetis yang mungkin dapat diterapkan pada program pendidikan bisnis melalui pembelajaran yang menumbuhkan sekaligus mengembangkan sikap positif terhadap wirausahawan, dengan harapan bahwa di kemudian hari banyak tumbuh wirausahawan baru yang dapat mendukung program pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan catatan, bahwa kebijakan pemerintah diasumsikan dapat menunjang kebijakan pendidikan wirausahawan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaaahnya pada makna-makna subyektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti. Pendekatan ini dipilih agar studi ini memperoleh gambaran detail dan mendalam mengenai suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan rincian-rincian spesifik dari situasi, *setting* atau relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subyek penelitian (Patton, 2002).

Dalam penelitian ini, para peneliti menempatkan diri sebagai *the insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati (atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi obyek yang diteliti) agar bisa sebaik mungkin merefleksikan penghayatan subyektif dari obyek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut S. Nasution (1985), metode studi kasus ialah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial. Metode ini dipandang efektif karena mampu digunakan untuk mencari motif-motif di balik fakta sosial yang tampak secara empirik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bertumpu pada pendekatan psikologi sosial sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang telah matang.

Melalui metode studi kasus, pemaparan yang akan dikemukakan dalam hasil penelitian tidak lain merupakan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian dilakukan dan pemaparan hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang dikumpulkan dari aktor-aktor pembangunan yang dilakukan di masing-masing lokasi. Selain itu, juga diwawancarai beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan budaya dan lingkungan hidup di enam tempat tersebut yaitu tokoh masyarakat di kawasan tersebut, warga sekitar yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, pemerintahan kelurahan, hingga Dinas Pariwisata dan Budaya atau dinas terkait lainnya serta pihak swasta yang turut aktif mendukung kegiatan tersebut.

Metode pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam wawancara dengan informan, beberapa informasi yang dipertanyakan antara lain: (a) latar belakang pendirian lembaga, (b) kegiatan-kegiatan lembaga, (c) strategi pemberdayaan, dan (d) upaya untuk mempertahankan komunitas lembaga. Triangulasi data menggunakan triangulasi sumber data.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, secara umum berupa reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan azas penelitian kualitatif, analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data (Bamberger [ed.], 2000). Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktivitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktivitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*, yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Punch, 1998).

3.4. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif memiliki spesifikasi tersendiri. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Moleong (1988) paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Standar kredibilitas. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif dengan tingkat kepercayaan tinggi, para peneliti melakukan: a) perpanjangan keikutsertaan dengan cara melihat kegiatan obyek penelitian; b) ketekunan pengamatan, yang dilakukan untuk mengadakan observasi secara teliti terkait dengan obyek penelitian; c) melakukan triangulasi, yaitu pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.
2. Standar transferabilitas. Pada usaha ini peneliti berusaha menyajikan laporan penelitian secara deskripsi dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa melupakan norma-norma penulisan ilmiah.
3. Standar dependabilitas. Peneliti melakukan pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian.
4. Standar konfirmabilitas. Standar ini lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian.

3.5. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di enam tempat untuk mendapatkan beberapa model pengembangan masyarakat berbasis kebudayaan dan lingkungan hidup yang dikembangkan. Enam lokasi tersebut adalah Saung Angklung Udjo (SAU), Jalan Padasuka 118 Kota Bandung. Obyek penelitian (informan) adalah pengelola SAU yaitu Taufik Udjo dan penerus lainnya dari sang pendiri yaitu Udjo. Tempat kedua adalah Sentra Wisata Bunga Cihideung Lembang. Tempat ketiga adalah kampung budaya di kawasan Keraton Kasepuhan di Kota Cirebon. Tempat keempat adalah Manonjaya, tempat diproduksi golok tradisional Galonggong. Tempat kelima adalah sentra wisata kuliner ikan di Rancapanggung, Cililin. Dan tempat keenam adalah sentra wisata alam Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) di Sukabumi dan Bogor.

3.5.1. Saung Angklung Udjo (SAU)

SAU berada di Padasuka, Kota Bandung merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam mewariskan dan mempertahankan budaya lokal, dalam hal ini budaya Sunda. SAU adalah sanggar seni yang secara spesifik menyajikan musik angklung dan mewakili eksotika kota Bandung kepada wisatawan.

Angklung merupakan instrumen musik tradisional yang terbuat dari bambu, merupakan pengembangan dari instrumen Calung, tabung bambu yang dipukul, sedangkan angklung merupakan tabung bambu yang digoyang, menghasilkan hanya satu nada untuk setiap instrumennya. Pada awalnya angklung hanya bernada pentatonis (*da mi na ti la*). Dibutuhkan puluhan orang untuk memainkan angklung agar terdengar harmonis. Kini dengan teknik tertentu bisa dimainkan oleh beberapa orang saja (www.wikipedia.com).

Pada tahun 1938 Daeng Soetigna memodifikasi suara angklung menjadi diatonis (*do re mi fa so la ti*). Sejak saat itu angklung mulai dikenal secara internasional hingga pernah ditampilkan dalam acara Konferensi Asia-Afrika, Bandung 1955. Angklung kini lebih sering ditampilkan dalam bentuk orkestra dan semakin banyak dibina di sekolah-sekolah.

SAU adalah suatu tempat *workshop* kebudayaan, yang merupakan tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, dan *workshop* instrumen musik dari bambu. Selain itu, SAU mempunyai tujuan sebagai laboratorium kependidikan dan pusat belajar untuk memelihara kebudayaan Sunda dan khususnya angklung. SAU didirikan pada tahun 1966 oleh Udjo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati, dengan maksud untuk melestarikan dan memelihara seni dan kebudayaan tradisional Sunda. SAU berlokasi di Jln. Padasuka 118 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Salah satu bagian pertunjukan di Saung Angklung Udjo adalah angklung orkestra. Pertunjukan itu dapat dinikmati dengan suasana tempat yang segar udaranya dan dikelilingi oleh pohon-pohon bambu yang indah, dari kerajinan bambu dan interior bambu sampai alat musik bambu.

Di samping pertunjukan rutin setiap sore, SAU telah berkali-kali mengadakan pertunjukan khusus yang dilakukan pada pagi atau siang hari. Pertunjukan tersebut tidak terbatas diadakan di lokasi Saung Angklung Udjo saja, tetapi juga di berbagai undangan tampil baik di dalam maupun di luar negeri, pada bulan Agustus tahun 2000 di Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Saung Angklung Udjo mengadakan konser kolaborasi dengan penyanyi cilik yang dijuluki Shirley Temple-nya Indonesia, yaitu Sherina. SAU tidak terbatas pada hanya menjual seni pertunjukan saja, berbagai produk alat musik bambu tradisional (angklung, arumba, calung dan lainnya) dibuat dan dijual kepada para pembeli.

Saat ini sehari-hari jumlah SDM di SAU yang terlibat terdiri dari: manajemen, pemain, dan pengrajin. Manajemen terdiri dari 65 orang dan 3 orang konsultan. Pemain dewasa terdiri dari 25 orang pemain inti, dan 60 orang pemain tambahan. Murid akademi penerima bea siswa (sekaligus juga pemain anak) terakhir ada 400 anak.

3.5.2. Sentra Wisata Bunga Cihideung-Lembang

Sentra Wisata Bunga Cihideung-Lembang yang semakin berkembang juga menunjukkan geliat ekonomi masyarakat dari aktivitas menanam, memelihara hingga menjual aneka bunga yang variatif.

Melalui aktivitas tersebut, masyarakat Cihideung meningkat kehidupan ekonominya dan juga turut aktif menjaga kelestarian alam lingkungan.

Masyarakat Desa Cihideung sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang bunga. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari potensi alam dan kondisi geografis yang berada di Desa Cihideung. Jika kita mengunjungi Desa Cihideung, kita akan menyaksikan bagaimana hampir seluruh keluarga menjadikan bunga sebagai aktifitas kesehariannya.

Berdasarkan penuturan Bapak Asep Sekretaris Desa Cihideung, bahwa saat ini masyarakat yang berdagang bunga kurang lebih ada 2410 keluarga. Biasanya ada yang dikelola sendiri oleh keluarga dan ada pula yang memiliki karyawan, sesuai dengan besar kecilnya usaha penjualan bunga itu sendiri. Desa Cihideung sendiri memiliki 12.912 warga dengan rincian warga laki-laki sebanyak 6150 orang dan jumlah penduduk perempuan 6762 orang. Jika melihat kepadatan penduduknya, daerah ini terbilang padat yaitu 344 jiwa per km².

Cihideung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Parompong, Lembang. Tempat wisata alam ini merupakan pusat wisata agrobisnis, dimana sepanjang jalan dapat ditemukan berbagai bunga-bunga cantik yang bermekaran. Berdasarkan survey sekitar 85% penduduk di desa Cihideung berprofesi sebagai petani bunga potong dan tanaman hias.

Bunga yang ditanam di desa Cihideung bisa dibilang lengkap. Tata letak yang tepat dan hawa yang sejuk dapat membuat betah. Selain menikmati bunga yang tertata rapi dan bunga yang bermekaran, bisa dilihat juga area pembibitan bunga. Hampir di setiap liburan, desa Cihideung banyak didatangi oleh wisatawan untuk membeli bunga atau hanya sekedar melihat-lihat koleksi bunga di desa Cihideung.

Sesuai dengan julukan kota Bandung yaitu Kota Kembang. Di desa Cihideung ini banyak ditanam bunga hias. Masyarakat sekitar tempat wisata cihideung, semuanya mempunyai pekarangan rumah yang penuh dengan bunga hias. Di zaman sekarang ini yang justru semakin marak masyarakat yang tidak mengindahkan lingkungan, semua anggapan tersebut disangkal oleh kondisi masyarakat di sini. Di depan rumah setiap penduduk disini pasti ada *polybag-polybag* yang penuh dengan tanaman hias. Beberapa polybag diantara masyarakat ini ada yang merupakan tempat pengembangbiakan bunga dari taman Bunga Cihideung namun sebagian lagi miliknya sendiri.

Saat ini kawasan ini disebut sebagai salah satu sentra penjualan bunga terbesar di Bandung. Bunga-bunga yang dikembangkan oleh penduduk ini sudah sampai ke pasar global, terutama saat ini paling banyak memasok produk bunga hias ke kota Jakarta. Pengembangbiakan bunga sepertinya telah mendatangkan keuntungan tersendiri pada masyarakat sekitarnya karena kondisi wisata yang ramai dan jual beli bunga semakin meningkat, maka masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani bunga. Jika beruntung, maka terkadang ada kontraktor yang secara langsung membeli bunga dalam jumlah yang banyak dan dihargai miring. Dan tak kalah juga para perias memanfaatkan bunga-bunga hias ini untuk keperluan usahanya.

3.5.3. Keraton Kasepuhan Cirebon

Keraton Kasepuhan adalah [keraton](#) termegah dan paling terawat di [Cirebon](#). Makna di setiap sudut [arsitektur](#) keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi [tembok bata](#) merah dan terdapat [pendopo](#) di dalamnya. Keraton ini memiliki [museum](#) yang cukup lengkap dan berisi benda [pusaka](#) dan [lukisan koleksi kerajaan](#). Salah satu koleksi yang

dikeramatkan yaitu [kereta Singa Barong](#). Kereta ini saat ini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap [1 Syawal](#) untuk *dimandikan*. Bagian dalam keraton ini terdiri dari [bangunan](#) utama yang berwarna putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang tidur dan [singgasana](#) raja.

Keraton Kasepuhan didirikan pada tahun [1529](#) oleh Pangeran Mas Mochammad Arifin II ([cicit](#) dari [Sunan Gunung Jati](#)) yang menggantikan [tahta](#) dari Sunan Gunung Jati pada tahun [1506](#). Ia bersemayam di dalam Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Kasepuhan dulunya bernama *Keraton Pakungwati*, sedangkan Pangeran Mas Mochammad Arifin bergelar [Panembahan Pakungwati I](#). Sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun [1549](#) dalam [Mesjid Agung Sang Cipta Rasa](#) dalam usia yang sangat tua. Nama beliau diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama Keraton yaitu Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan.

Di depan Keraton Kasepuhan terdapat alun-alun yang pada waktu zaman dahulu bernama Alun-alun Sangkala Buana yang merupakan tempat latihan keprajuritan yang diadakan pada hari [Sabtu](#) atau istilahnya pada waktu itu adalah Saptonan. Dan di [alun-alun](#) inilah dahulunya dilaksanakan berbagai macam hukuman terhadap setiap [rakyat](#) yang melanggar peraturan seperti hukuman [cambuk](#). Di sebelah barat Keraton kasepuhan terdapat [Masjid](#) yang cukup megah hasil karya dari para [wali](#) yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

Sedangkan di sebelah timur alun-alun dahulunya adalah tempat perekonomian yaitu [pasar](#) -- *sekarang adalah pasar kasepuhan yang sangat terkenal dengan [pocinya](#)*. Model bentuk Keraton yang menghadap utara dengan bangunan Masjid di sebelah barat dan pasar di sebelah timur dan alun-alun di tengahnya merupakan model-model Keraton pada masa itu terutama yang terletak di daerah [pesisir](#). Bahkan sampai sekarang, model ini banyak diikuti oleh seluruh [kabupaten/kota](#) terutama di [Jawa](#) yaitu di depan gedung pemerintahan terdapat alun-alun dan di sebelah baratnya terdapat masjid.

Sebelum memasuki gerbang kompleks Keraton Kasepuhan terdapat dua buah [pendopo](#), di sebelah barat disebut *Pancaratna* yang dahulunya merupakan tempat berkumpulnya para [punggawa](#) Keraton, [lurah](#) atau pada zaman sekarang disebut [pamong praja](#). Sedangkan pendopo sebelah timur disebut *Pancaniti* yang merupakan tempat para [perwira](#) keraton ketika diadakannya latihan keprajuritan di alun-alun.

Memasuki jalan kompleks Keraton di sebelah kiri terdapat bangunan yang cukup tinggi dengan [tembok bata](#) kokoh di sekelilingnya. Bangunan ini bernama *Siti Inggil* atau dalam bahasa Cirebon sehari-harinya adalah *lemah duwur* yaitu tanah yang tinggi. Sesuai dengan namanya bangunan ini memang tinggi dan nampak seperti kompleks candi pada zaman [Majapahit](#). Bangunan ini didirikan pada tahun [1529](#), pada masa pemerintahan [Syekh Syarif Hidayatullah](#) (Sunan Gunung Jati).

Di pelataran depan Siti Inggil terdapat [meja batu](#) berbentuk segi empat tempat bersantai. Bangunan ini merupakan bangunan tambahan yang dibuat pada tahun 1800-an. Siti Inggil memiliki dua [gapura](#) dengan [motif](#) bentar bergaya arsitek zaman Majapahit. Di sebelah utara bernama *Gapura Adi* sedangkan di sebelah selatan bernama *Gapura Banteng*. Dibawah Gapura Banteng ini terdapat *Candra Sakala* dengan tulisan *Kuta Bata Tinata Banteng* yang jika diartikan adalah tahun [1451](#) saka yang merupakan tahun pembuatannya (1451 saka = 1529 M). Tembok bagian utara

komplek Siti Inggil masih asli sedangkan sebelah selatan sudah pernah mengalami pemugaran/renovasi. Di dinding tembok kompleks Siti Inggil terdapat piring-piring dan porselen-porselen yang berasal dari Eropa dan negeri Cina dengan tahun pembuatan 1745 M. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang memiliki nama dan fungsi tersendiri.

Bangunan utama yang terletak di tengah bernama Malang Semirang dengan jumlah tiang utama 6 buah yang melambangkan rukun iman dan jika dijumlahkan keseluruhan tiangnya berjumlah 20 buah yang melambangkan 20 sifat-sifat Allah SWT. Bangunan ini merupakan tempat sultan melihat latihan keprajuritan atau melihat pelaksanaan hukuman. Bangunan di sebelah kiri bangunan utama bernama Pendawa Lima dengan jumlah tiang penyangga 5 buah yang melambangkan rukun Islam. Bangunan ini tempat para pengawal pribadi sultan. Bangunan di sebelah kanan bangunan utama bernama Semar Tinandu dengan 2 buah tiang yang melambangkan Dua Kalimat Syahadat. Bangunan ini adalah tempat penasehat Sultan/Penghulu. Di belakang bangunan utama bernama Mande Pangiring yang merupakan tempat para pengiring Sultan, sedangkan bangunan disebelah mande pangiring adalah Mande Karasemen, tempat ini merupakan tempat pengiring tetabuhan/gamelan.

Di bangunan inilah sampai sekarang masih digunakan untuk membunyikan Gamelan Sekaten (Gong Sekati), gamelan ini hanya dibunyikan 2 kali dalam setahun yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain 5 bangunan tanpa dinding terdapat juga semacam tugu batu yang bernama Lingga Yoni yang merupakan lambang dari kesuburan. Lingga berarti perempuan dan Yoni berarti laki-laki. Bangunan ini berasal dari budaya Hindu. Dan di atas tembok sekeliling kompleks Siti Inggil ini terdapat Candi Laras untuk penyelaras dari kompleks Siti Inggil ini.

Berikut ini detail Arsitektur dan Bangunan Bersejarah di Keraton Kasepuhan Cirebon:

- 1) Halaman Pertama. Setelah melewati Pancaratna dan Pancaniti selanjutnya memasuki halaman pertama. Untuk memasukinya bisa melewati Gapura Adi atau Gapura Banteng. Gapura Adi berupa pintu gerbang berbentuk bentar berukuran 3,70 x 1,30 x 5 m menggunakan bahan bata. Gapura Adi ini berada di utara Siti Inggil. Gapura Banteng berupa pintu gerbang dengan bentuk bentar berukuran 4,50 x 9 m. Pintu ini lebih besar dan tinggi daripada Gapura Adi. Pada pipi tangga sebelah timur terdapat stilirisasi bentuk banteng. Halaman pertama merupakan kompleks Siti Inggil, di kompleks terdapat beberapa bangunan, antara lain Mande Pendawa Lima yang berfungsi untuk tempat duduk pengawal Raja, Mande Malang Semirang yang berfungsi sebagai tempat duduk raja timadu menyaksikan acara di alun-alun, Mande Semar Timandu adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat duduk penghulu atau penasehat raja. Mande Karesmen yaitu bangunan sebagai tempat menampilkan kesenian untuk raja, dan Mande Pengiring yaitu bangunan sebagai tempat mengiring raja. Selain bangunan tersebut masih ada satu bangunan lagi yaitu bangunan Pengada. Bangunan ini berukuran 17 x 9,5 m, berfungsi sebagai tempat membagi berkat dan tempat pemeriksaan sebelum menghadap raja.
- 2) Halaman Kedua. Halaman kedua dibatasi tembok bata. Pada pagar bagian utara terdapat dua gerbang yaitu Regol Pengada dan gapura lonceng. Regol Pengada merupakan pintu gerbang masuk halaman ketiga dengan ukuran panjang dasar 5 x 6,5 m. Gerbang yang berbentuk paduraksa ini menggunakan batu dan daun pintunya dari

kayu. Gapura Lonceng terdapat di sebelah timur Gerbang Pangada dengan ukuran panjang dasar 3,10 x 5 x 3 m. Gerbang ini berbentuk koriagung (gapura beratap) menggunakan bahan bata. Halaman kedua ini terbagi dua, halaman Pengada dan halaman untuk kompleks Langgar Agung. Halaman Pengada berukuran 37 x 37 m yang berfungsi untuk memarkirkan kendaraan atau menambatkan kuda. Di halaman ini dahulu ada sumur untuk memberi minum kuda. Halaman kompleks Langgar Agung merupakan halaman di mana terdapat bangunan kompleks Langgar Agung. Bangunan Langgar Agung menghadap ke arah timur, memiliki bangunan utama dengan ukuran 6 x 6 m. Teras 8 x 2,5 m. Jadi bangunan ini berbentuk "T" terbalik karena teras depan lebih besar dari bangunan utama. Bagian teras berdinding kayu setengah dari permukaan lantai, kemudian setengah bagian atas diberi terali kayu. Dinding bangunan utama merupakan dinding tembok. Mihrab berbentuk melengkung berukuran 5 x 3 x 3 m. Di dalam mihrab tersebut terdapat mimbar terbuat dari kayu berukuran 0,90 x 0,70 x 2 m. Atap Langgar Agung merupakan atap tumpang dua dengan menggunakan sirap. Konstruksi atap disangga 4 tiang utama. Langgar Agung ini memiliki halaman dengan ukuran 37 x 17 m. Langgar ini berfungsi sebagai tempat ibadah kerabat keraton. Bangunan Langgar Agung dilengkapi pula dengan Pos Bedug Somogiri. Bangunan yang menghadap ke timur ini berdenah bujursangkar berukuran 4 x 4 m yang di dalamnya terdapat bedug (tambur). Bangunan ini tanpa dinding dan atap berbentuk limas, penutup atap didukung 4 tiang utama dan 5 tiang pendukung.

- 3) Halaman Ketiga. Antara halaman kedua dan ketiga dibatasi tembok dengan gerbang berukuran 4 x 6,5 x 4 m. Gerbang tersebut dilengkapi dua daun pintu terbuat dari kayu, jika dibuka dan ditutup akan berbunyi maka disebut pintu gledeg (guntur). Di halaman ketiga terdapat sejumlah bangunan sebagai berikut.
- 4) Taman Bunderan Dewandaru. Taman ini berdenah bulat telur terbuat dari batu cadas. Memiliki arti dari namanya Bunder artinya sepakat. Dewa berarti dewa atau makhluk halus dan ndaru artinya cahaya. Arti keseluruhan adalah "orang yang menerangi sesama mereka yang masih hidup dalam masa kegelapan". Luas taman 20 m². Di taman ini terdapat nandi, pohon soko sebagai lambing bersuka hati, 2 patung macan putih merupakan lambang Pajajaran, meja dan bangku 2 buah meriam yang dinamai Ki Santomo dan Nyi Santoni.
- 5) Museum Benda Kuno. Bangunan yang menghadap timur berbentuk "E". Terdapat 2 pintu untuk memenuhi bangunan tersebut. Di sini disimpan benda-benda kuno Keraton Kasepuhan.
- 6) Museum Kereta. Bangunan ini menghadap barat dan terdapat di timur Taman Bunderan Dewandaru ini berukuran 13,5 x 11 m. Di Museum Kereta tersimpan kereta-kereta dan barang lainnya.
- 7) Tunggu Manunggal. Bangunan ini berupa batu pendek ± 50 cm, dikelilingi 8 buah pot bunga yang melambangkan Allah yang satu zat sifatnya.
- 8) Lunjuk. Bangunan yang menghadap timur ini berukuran 10 x 7 m yang berfungsi melayani tamu dalam mencatat dan melaporkan urusannya menghadap raja.

- 9) Sri Manganti. Bangunan ini berada di timur tugu manunggal berbentuk bujursangkar. Bangunan ini terbuka tanpa dinding, bumbungan berbentuk joglo dan atap genteng didukung dengan 4 tiang soko guru, 12 tiang tengah dan 12 tiang luar. Langit-langit dipenuhi ukiran-ukiran yang berwarna putih dan coklat. Bangunan ini bernama Sri Manganti karena arti sri artinya raja, manganti artinya menunggu. Sehingga artinya secara keseluruhan tempat menunggu keputusan raja.
- 10) Bangunan Induk Keraton. Bangunan induk keraton merupakan tempat aktifitas Sultan, dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda, yaitu :
- a) Kuncung dan Kutagara Wadasan dibangun pada tahun 1678 oleh Sultan Sepuh 1. Kuncung berupa bangunan berukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 m yang digunakan parkir kendaraan sultan. Kutagara Wadasan adalah gapura yang bercat putih dengan gaya khas Cirebon berukuran lebar 2,5 m dan tinggi ± 2,5 m. Gaya Cirebon tampak pada bagian bawah kaki gapura yang berukiran wadasan dan bagian atas dengan ukiran mega mendung. Arti ukiran tersebut seseorang harus mempunyai pondasi yang kuat jika sudah menjadi pimpinan atau sultan harus bisa mengayomi bawahan dan rakyatnya.
 - b) Jinem Pangrawit yaitu bangunan yang berfungsi sebagai serambi keraton. Nama jinem Pangrawit berasal dari kata jinem atau kajineman berarti tempat tugas dan Pangrawit berasal dari kata rawit berate kecil, halus atau bagus. Lantai marmer, dinding tembok berwarna putih dan dihiasi keramik Eropa. Atap didukung 4 tiang sokoguru kayu dengan umpak beton. Ruangan ini digunakan sebagai tempat Pangeran Patih dan wakil sultan dalam menerima tamu.
 - c) Gajah Nguling yaitu ruangan tanpa dinding dan terdapat 6 tiang bulat bergaya tiang tuscan setinggi 3 m. Lantai tegel dan langit-langit berwarna hijau. Ruangan ini tidak memanjang lurus tapi menyerong (membengkok) dan kemudian menyatu dengan bangsal Pringandani. Bentuk ruangan ini mengambil bentuk gajah yang sedang Nguling (menguak) dengan belalainya yang bengkok. Ruangan ini dibangun oleh Sultan Sepuh IX pada tahun 1845.
 - d) Bangsal Pringgandani merupakan ruangan yang berada di sebelah selatan ruangan Gajah Nguling. Ruangan ini memiliki 4 tiang utama segi empat berwarna hijau yang berfungsi sebagai tempat menghadap para Bupati Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Sewaktu-waktu dipakai pula sebagai tempat sidang warga keraton.
 - e) Bangsal Prabayasa berada di selatan bangsal Pringgandani. "Prabayasa" berasal dari kata praba artinya sayap dan yasa artinya besar. Kata-kata tersebut mengandung arti bahwa Sultan melindungi rakyatnya dengan kedua tangannya yang besar. Pada dinding ruangan terdapat relief yang diberi nama Kembang Kanigaran berarti lambing kenegaraan. Maksudnya Sri Sultan dalam pemerintahannya harus welas asih pada rakyatnya.
 - f) Bangsal Agung Panembahan merupakan ruangan yang berada di selatan dan satu meter lebih tinggi dari bangsal Prabayaksa. Fungsinya sebagai singgasana Gusti Panembahan. Ruangan ini masih asli dan belum ada perubahan sejak dibangun tahun 1529.

- g) Pungkuran merupakan ruangan serambi yang terletak di belakang Keraton. Tempat ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sesaji pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad.
- h) Bangunan Dapur Maulud ini berada di depan Kaputren dengan arah hadap timur yang berfungsi sebagai tempat memasak persiapan peringatan Maulid Nabi SAW.
- i) Pamburatan merupakan bangunan yang berada di selatan Kaputren. Pamburuan artinya menggurat atau mengerik. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat mengerik kayu-kayu wangi (kayu untuk boreh) untuk kelengkapan selamatan Maulud Nabi SAW. (Source: disparbud.jabarprov.go.id dan wikipedia.org).

Secara keseluruhan, kompleks keraton terdiri dari keraton itu sendiri, alun-alun, serta masjid. Rancangan ini serupa dengan Keraton Yogyakarta dan Solo, merupakan representasi dari arsitektur Islam nusantara. Namun demikian, Keraton Kasepuhan masih memiliki unsur Hindu yang kental. Tembok keraton yang terdiri dari bata merah dan bentuk gapura keraton serupa dengan arsitektur bangunan Hindu seperti keraton Majapahit.

Dari sisi budaya, keberadaan Siti Hinggil dan pendopo-pendopo kecil adalah representasi dari bangunan Jawa. Sementara, terdapat juga keramik-keramik dinding yang punya 2 corak, Eropa dan Tiongkok. Di Taman Bundaran Dewandaru yang terletak di kompleks tengah keraton, unsur Hindu bisa dijumpai dalam wujud Lembu Nandu. Sementara, unsur Eropa berwujud meriam hadiah dari Thomas Stanford Raffles.

Benda kuno keraton yang menunjukkan dengan jelas perpaduan unsur berbagai agama dan budaya adalah kereta kencana Singa Barong, kereta kencana tua canggih pertama buatan Indonesia. Sandy Atmawijaya, salah satu pemandu Keraton Kasepuhan, saat ditemui dalam kunjungan beberapa waktu lalu mengatakan, "Desain kereta ini melambangkan persahabatan antar-agama."

Pada bagian depan kereta, terdapat wujud hewan yang merupakan gabungan dari tiga hewan sekaligus, yakni gajah, garuda, dan naga. Belalai gajah adalah lambang agama Hindu, garuda bersayap burak adalah lambang Islam, sedangkan naga adalah lambang Buddha. Kereta kencana itu, kata Sandy, istimewa karena sudah mengenal sistem suspensi seperti mobil canggih masa kini. Perbedaannya, teknik suspensi ini tidak menggunakan sistem pegas, tetapi kulit. Ada empat sabuk kulit yang membuat kereta ini lebih nyaman dipakai. Keistimewaan kereta kencana Singa Barong lainnya adalah sayap burak yang bisa bergerak saat kereta berjalan. Ini membuat sayap bisa berfungsi seperti kipas angin bagi sang raja yang ditandu (www.kompas.com).

3.5.4. Kerajinan Golok Galonggong Manonjaya

Produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di kecamatan Manonjaya, selain menjadi petani rata-rata adalah industri kecil dan industri rumah tangga, seperti penggergajian kayu, alat pertanian sederhana, kerajinan tangan, kerajinan dari bambu, makanan ringan, tahu, dan tempe. Namun demikian, di antara sekian banyak industri kecil yang ada, terdapat industri kecil yang menjadi ciri khas daerah Manonjaya yaitu kerajinan Golok.

Kerajinan *golok* di kampung *Galonggong* sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu dan dapat dikatakan kerajinan tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun sehingga mayoritas masyarakat Galonggong bermatapencaharian sebagai *pengrajin golok*. Hingga saat ini jumlah pengrajin golok di Galonggong mencapai lebih dari ribuan orang tanpa batasan usia, bahkan orang dari luar kampung Galonggong pun banyak yang menjadi pengrajin di Galonggong. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyak berdirinya kios-kios golok di pinggir jalan sepanjang arah menuju Kota Banjar tepatnya di kampung Galonggong Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya (<http://www.golokgalonggongtulen.blogspot.com>).

Kerajinan golok Galonggong merupakan suatu bentuk kerajinan turun temurun yang ada di kampung Galonggong, yang masih mempertahankan ciri khas bentuk yang dihasilkan pada golok yang ada sejak dahulu. Fungsi golok Galonggong selain untuk perkakas dan alat kebutuhan sehari-hari, juga memiliki nilai seni yang sangat tinggi terutama apabila dilihat pada bagian pegangannya atau dalam bahasa sunda *perah*. Demikianlah sehingga banyak para pembeli menjadikan golok Galonggong sebagai pajangan atau benda hias.

Proses pembuatan kerajinan golok Galonggong masih menggunakan teknik manual dengan menggunakan alat-alat tradisional serta mesin buatan yang sederhana. Pembuatan golok dimulai dengan proses pembuatan bilah terlebih dahulu dengan menggunakan bahan per mobil, setelah pembuatan bilah selesai barulah ke tahap proses pembuatan sarangka yang berbahan dasar dari kayu Kijulang, kemudian dilanjutkan pada proses pembuatan perah yang terbuat dari tanduk kerbau betina. Setelah ketiga bagian golok Galonggong selesai barulah pada proses peneraan pada bilah yang berbentuk buaya yang menjadi ciri khas golok Galonggong.

Ditinjau dari visual estetika media, bentuk, dan hiasan, golok Galonggong memiliki ciri khas di setiap bagiannya. Di bagian bilah terdapat pinggulan serta ujung bilah berbentuk sedikit melingkar dan tidak meruncing dan di bagian badan bilah golok terdapat ukiran buaya. Untuk bagian sarangka ciri utama yang menonjol yaitu bagian *simeut meuting* yang berbentuk cicak. Bagian ciri khas golok Galonggong yang terakhir yaitu bagian *perah*/pegangan pada golok, berbentuk burung kutilang masyarakat Galonggong menyebutnya *mamanukan*. Dengan seiring perkembangan zaman dari sekitar tahun 2000 perajin golok Galonggong berinovasi memproduksi hasil goloknya dengan beberapa jenis bentuk misalnya dalam perah golok tidak hanya bentuk burung kutilang saja. Walaupun demikian perajin golok Galonggong seperti Pa Eman tetap tidak melupakan ciri khas golok yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang khususnya di kampung Galonggong.

3.5.5. Wisata Kuliner Ikan Rancapanggung Cililin

Salah satu aset budaya yang harus dilestarikan adalah sentra wisata kuliner sekaligus pasar ikan yang berada di perbatasan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pasar ikan ini tidak seperti pasar ikan biasanya, namun pasar ikan ini lebih menarik dengan adanya tempat makan juga disuguhkan dengan pemandangan yang indah.

Jika dilihat dari segi wilayah, pasar ikan ini termasuk pada wilayah perbatasan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung. Namun, sebagian besar penjual dan pengembangnya berasal dari Desa Rancapanggung. Oleh karena itu, para peneliti mengambil kesimpulan bahwa pasar ikan ini berada di bawah pengelolaan Desa Rancapanggung.

Pasar ikan di Desa Rancapanggung termasuk pada bagian selatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), pembangunan di kawasan selatan Kabupaten Bandung Barat bagian selatan belum optimal, berbeda dengan kawasan utara Kabupaten Bandung Barat (Lembang) yang banyak dikunjungi para wisatawan. Oleh karena itu, banyak potensi wisata kuliner khas hingga kerajinan khas Bandung Barat belum dikenal masyarakat luas. Infrastruktur yang buruk merupakan pemicunya. Tak heran apabila belum banyak wisatawan datang ke wilayah selatan Bandung Barat.

Suatu kawasan di sekitar jembatan Sungai, Jalan Raya Rancapanggung Cililin, menawarkan pasar ikan atau bisa disebut dengan wisata kuliner yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga dan alam di pinggir genangan Waduk Saguling pun dapat menjadi pilihan berekreasi. Di sekitar jembatan yang menghubungkan antara Desa Mukapayung dan Rancapanggung berderet sekitar belasan tempat makan yang menyuguhkan berbagai menu ikan.

Pasar ikan di Desa Rancapanggung baru berdiri sekitar tahun 2007, namun orang pertama yang berjualan ikan di daerah ini yaitu Bapak Suryana (55 tahun), menyebutkan bahwa dia memulai usahanya sejak tahun 1997, mulai dari bekerja sebagai penangkap ikan lalu membuka warung nasi hingga menjadi penjual ikan eceran sampai sekarang. Saat itu dia satu-satunya orang yang membuka kios ikan pertama di sekitar jembatan. Jembatan penghubung dua desa ini merupakan satu-satunya jalan yang dilalui kendaraan yang bertujuan ke arah bagian selatan Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu banyak wisatawan yang lalu-lalang melewati jembatan sehingga orang lainpun berinisiatif untuk mengikuti jejak Bapak Suryana. Semakin banyak yang berjualan ikan di sekitar jembatan, maka semakin ramai daerah tersebut dan terbentuklah pasar ikan di sekitar jembatan di Desa Rancapanggung.

Pengunjung bisa menikmati berbagai hidangan ikan air tawar. Ikan mas, gurame, belut, ikan gabus, patin, ikan nila, bahkan daging ayam pun dapat ditemukan dengan mudah. Sebagai penambah kemeriahan, pengunjung bebas memilih dan mengambil ikannya sendiri untuk disajikan sambil menikmati keindahan Waduk Saguling.

Bagi yang hobi memancing, tempat ini sangat pas. Ikan hasil tangkapan bisa langsung disantap setelah diolah, dibersihkan, dan dibakar di kios-kios makanan di tempat ini.

Umumnya, lokasi pasar ikan dikenal seperti pasar tradisional kebanyakan; kotor, bau amis, dan sebagainya. Namun pasar ikan di Desa Rancapanggung berbeda dengan pasar ikan kebanyakan, yaitu terletak di atas jembatan dan berupa saung dan kios-kios terbuka dengan suasana perbukitan hijau, gunung, hamparan sawah bertingkat (terasering), dan sungai Waduk Saguling dengan perahu-perahu nelayan penambak ikan yang hilir mudik melintas di atas genangan waduk.

Tidak hanya orang-orang di daerah sekitar saja yang berkunjung ke pasar ikan di Desa Rancapanggung, tetapi dari luar daerahpun banyak yang berkunjung ke pasar ikan tersebut. Pasar ikan ini juga menarik perhatian pejabat daerah, sehingga sesekali mereka sengaja berkunjung ke pasar ikan untuk menikmati hidangannya.

Saat ini kawasan pedagang ikan di Jembatan Ciminyak banyak dikunjungi wisatawan, khususnya yang ingin menikmati kuliner ikan bakar atau goreng. Tidak sedikit pelanggannya berasal dari Jakarta, Bandung, dan Soreang. Pedagang lainnya, Ati, 38, tampak sibuk menyiapkan dua ikan mas ukuran sedang yang dibakar menggunakan batok kelapa. Sebakul nasi pulen panas, kecap berisi potongan cabai dan bawang, sambal jahe dadakan, lalapan, dan segelas besar air teh tersaji komplet menggugah selera.

Ati mengatakan, selain warga lokal, yang banyak mampir ke tempatnya adalah warga Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Jakarta. Bahkan, turis mancanegara sering mampir ke tempat makannya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB Aos Kaosar mengungkapkan, tahun ini Kementerian Pariwisata sudah menetapkan Desa Rancapanggung dengan keberadaan Kampung Ikan sebagai salah satu desa wisata di KBB.

3.5.6. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS)

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan Taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai saat ini, jenis-jenis satwa liar yang telah diidentifikasi di TNGHS antara lain: 244 jenis burung atau setara dengan 50 % dari jumlah jenis burung yang hidup di Jawa dan Bali, 61 jenis mamalia, 27 jenis amfibi, 50 jenis reptilia dan 26 jenis capung (Odonata). Diduga masih banyak jenis kehidupan liar yang belum teridentifikasi, terutama serangga dan organisme mikro. Jenis Penciri (*Flagship Species*) TNGHS yang disepakati para pakar keanekaragaman hayati adalah: Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Macan Tutul (*Panthera pardus* melas), Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*), serta Kukang (*Nycticebus javanicus*).

Hutan alam di kawasan TNGHS terbagi menjadi tipe hutan hujan dataran rendah (100-1000 m dpl) yang sebagian besar merupakan Zona Collin (500-1000 m dpl.), hutan hujan pegunungan bawah atau sub montana (ketinggian 1000–1.500 dpl.) dan hutan hujan pegunungan tengah atau hutan Montana (ketinggian 1.500 - 2000 m dpl). Khusus di Gunung Salak juga ditemukan ekosistem alpin (lebih dari 2000 m dpl.) dan ekosistem kawah yang memiliki vegetasi spesifik. Lebih dari 700 jenis tumbuhan berbunga diketahui hidup di hutan alam di dalam TNGHS, meliputi 391 marga dari 119 suku.

Secara geografis TNGHS terletak pada 106o12'58" BT 106o45'50" BT dan 06o32'14" LS – 06o55'12" LS. Secara administratif, kawasan TNGHS terletak dalam tiga wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu: Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kawasan Ekosistem Halimun merupakan penyangga kehidupan bagi Masyarakat Kasepuhan, masyarakat lokal setempat, masyarakat pedesaan dan perkotaan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di Kawasan Ekosistem Halimun, seperti DAS Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Wilayah perkotaan yang termasuk ketiga DAS tersebut adalah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi.

Wilayah Gunung Halimun telah ditetapkan menjadi hutan lindung semenjak tahun 1924, luasnya ketika itu 39.941 ha. Kemudian pada 1935 kawasan hutan ini diubah statusnya menjadi Cagar Alam Gunung Halimun. Status cagar alam ini bertahan hingga tahun 1992, ketika kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun dengan luas 40.000 ha, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992. Sampai dengan lima tahun kemudian, taman nasional yang baru ini pengelolaannya 'dititipkan' kepada Taman Nasional Gunung Gede – Pangrango yang wilayahnya berdekatan. Baru kemudian pada 23 Maret 1997, taman nasional ini memiliki unit pengelolaan yang tersendiri sebagai Balai Taman Nasional Gunung Halimun.

Pada tahun 2003 atas dasar SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003, kawasan hutan BTN Gunung Halimun diperluas, ditambah dengan kawasan hutan-hutan Gunung Salak, Gunung Endut dan beberapa bidang hutan lain di sekelilingnya, yang semula merupakan kawasan hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Sebagian besar wilayah yang baru ini, termasuk kawasan hutan G. Salak di dalamnya, sebelumnya berstatus hutan lindung. Namun kekhawatiran atas masa depan hutan-hutan ini, yang terus mengalami tekanan kegiatan masyarakat dan pembangunan di sekitarnya, serta harapan berbagai pihak untuk menyelamatkan fungsi dan kekayaan ekologi wilayah ini, telah mendorong diterbitkannya SK tersebut. Dengan ini, maka kini namanya berganti menjadi Balai Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, dan luasnya bertambah menjadi 113.357 ha.

Secara administratif, kawasan konservasi TN Gunung Halimun – Salak termasuk ke dalam wilayah tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat, dan Lebak di Propinsi Banten. Topografi wilayah ini berbukit-bukit dan bergunung-gunung, pada kisaran ketinggian antara 500–2.211 m dpl. Puncak-puncaknya di antaranya adalah G. Halimun Utara (1.929 m), G. Ciawitali (1.530 m), G. Kencana (1.831 m), G. Botol (1.850 m), G. Sanggabuana (1.920 m), G. Kendeng Selatan (1.680 m), G. Halimun Selatan (1.758 m), G. Endut (timur) (1.471 m), G. Sumbul (1.926 m), dan G. Salak (puncak 1 dengan ketinggian 2.211 m, dan puncak 2 setinggi 2.180 m). Jajaran puncak gunung ini acapkali diselimuti kabut (Sd. halimun), maka dinamai demikian.

Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang penting di sebelah barat Jawa Barat. Tercatat lebih dari 115 sungai dan anak sungai yang berhulu di kawasan Taman Nasional. Tiga sungai besar mengalir ke utara, ke Laut Jawa, yakni Ci Kaniki dan Ci Durian (yang bergabung dalam DAS Ci Sadane), serta Ci Berang, bagian dari DAS Ci Ujung. Sementara terdapat 9 daerah aliran sungai penting yang mengalir ke Samudera Hindia di selatan, termasuk di antaranya Cimandiri (Citarik, Cicatih), Citepus, Cimaja, dan Cisolak. Sungai-sungai ini mengalir melintasi wilayah Bogor, Tangerang, Rangkasbitung, Bayah dan Palabuhanratu.

Kawasan TN Gunung Halimun – Salak memang merupakan daerah yang basah. Curah hujan tahunannya berkisar antara 4.000–6.000 mm, dengan bulan kering kurang dari 3 bulan di antara Mei hingga September. Iklim ini digolongkan ke dalam tipe A hingga B menurut klasifikasi curah hujan Schmidt dan Ferguson. Suhu bulanannya berkisar antara 19,7–31,8 °C, dan kelembaban udara rata-rata 88%.

Kekayaan hayati kawasan taman nasional ini telah lama menarik perhatian para peneliti, dalam dan luar negeri. Banyak catatan telah dibuat, terutama setelah status kawasan ditingkatkan menjadi taman nasional, dan banyak pula yang telah diterbitkan, khususnya semasa masih bernama TN Gunung Halimun. Informasi berikut ini masih merujuk pada hasil-hasil penelitian di TN Gunung Halimun tersebut, terkecuali apabila disebutkan lain.

Tutupan hutan di taman nasional ini dapat digolongkan atas 3 zona vegetasi: (1) Zona perbukitan (*colline*) hutan dataran rendah, yang didapati hingga ketinggian 900–1.150 m dpl; (2) Zona hutan pegunungan bawah (*submontane forest*), antara 1.050–1.400 m dpl; dan (3) Zona hutan pegunungan atas (*montane forest*), di atas elevasi 1.500 m dpl.

Keanekaragamannya cenderung berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Dua petak coba permanen, masing-masing seluas 1 ha, di zona submontana ditumbuhi 116 dan 105 spesies

pohon. Sementara satu plot lagi dengan luas yang sama di zona montana didapati hanya berisi 46 spesies pohon.

Catatan sementara mendapatkan lebih dari 500 spesies tumbuhan, yang tergolong ke dalam 266 genera dan 93 suku, hidup di kawasan konservasi ini. Hasil ini diduga masih jauh di bawah angka yang sesungguhnya, mengingat bahwa TN Gede Pangrango yang berdekatan dan mirip kondisinya, namun luasnya kurang dari sepertujuh TNGHS, tercatat memiliki 844 spesies tumbuhan berbunga. Apalagi penelitian di atas belum mencakup wilayah-wilayah yang ditambahkan semenjak 2003.

Penelitian pada zona perbukitan di wilayah Citorek mendapatkan 91 spesies pohon, dari 70 marga dan 36 suku. Suku yang dominan adalah *Fagaceae*, yang diwakili oleh 10 spesies dan 144 (dari total 519) individu pohon; diikuti oleh *Lauraceae*, yang diwakili oleh 9 spesies dan 26 individu pohon. Jenis-jenis yang memiliki nilai penting tertinggi, berturut-turut adalah ki riung anak atau ringkasnya ki anak (*Castanopsis acuminatissima*), pasang parengpeng (*Quercus oidocarpa*), puspa (*Schima wallichii*), saketi (*Eurya acuminata*), dan rasamala (*Altingia excelsa*). Jenis-jenis tersebut selanjutnya membentuk tiga tipe komunitas hutan yang terbedakan di lapangan, yakni tipe *Castanopsis acuminatissima* – *Quercus oidocarpa*; *Schima wallichii* – *Castanopsis acuminatissima*, dan *Schima wallichii* – *Eurya acuminata*.

Dua plot permanen yang dibuat pada hutan submontana di ketinggian 1.100 m dpl., yakni dekat Stasiun Riset Cikaniki dan di gigir utara G. Kendeng, berturut-turut didominasi oleh rasamala (*A. excelsa*) dan ki anak (*C. acuminatissima*). Sedangkan plot permanen pada hutan montana di bawah puncak G. Botol pada elevasi 1.700 m dpl, didominasi oleh pasang *Quercus lineata*. Hutan montana di atas 1.500 m dpl. umumnya dikuasai oleh jenis-jenis *Podocarpaceae*, seperti jamuju (*Dacrycarpus imbricatus*), ki bima (*Podocarpus blumei*) dan ki putri (*P. neriifolius*).

Di taman nasional ini juga didapati sekurang-kurangnya 156 spesies anggrek; diyakini jumlah ini masih jauh di bawah angka sebenarnya apabila dibandingkan dengan kekayaan anggrek Jawa Barat yang tidak kurang dari 642 spesies.

Hutan-hutan primer dan pelbagai kondisi habitat lainnya menyediakan tempat hidup bagi aneka jenis margasatwa di TN Gunung Halimun – Salak. Tidak kurang dari 244 spesies burung, 27 spesies di antaranya adalah jenis endemik Pulau Jawa yang memiliki daerah sebaran terbatas. Dari antaranya terdapat 23 spesies burung migran. Wilayah ini juga telah ditetapkan oleh *BirdLife*, organisasi internasional pelestari burung, sebagai daerah burung penting (IBA, *important bird areas*) dengan nomor ID075 (Gunung Salak) dan ID076 (Gunung Halimun). Wilayah-wilayah ini terutama penting untuk menyelamatkan jenis-jenis elang jawa (*Spizaetus bartelsi*), luntur jawa (*Apalharpactes reinwardtii*), ciung-mungkal jawa (*Cochoa azurea*), celepuk jawa (*Otus angelinae*), dan gelatik jawa (*Padda oryzivora*).

Catatan sementara herpetofauna di taman nasional ini mendapatkan sejumlah 16 spesies kodok, 12 spesies kadal dan 9 spesies ular. Daftar ini kemudian masing-masing bertambah dengan 10, 8, dan 10 spesies, berturut-turut untuk jenis-jenis kodok, kadal, dan ular. Namun, daftar ini belum lagi mencakup jenis-jenis biawak dan kura-kura yang hidup di sini.

Mamalia terdaftar sebanyak 61 spesies. Di antaranya termasuk jenis-jenis langka seperti macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*), owa jawa (*Hylobates moloch*), surili (*Presbytis aygula*), lutung budeng (*Trachypithecus auratus*), dan juga ajag (*Cuon alpinus*).

Masyarakat yang berada di Kawasan Ekosistem Halimun tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga ada masyarakat adat yang dikenal dengan Masyarakat Kasepuhan. Untuk masyarakat Kasepuhan, mereka hidup dalam kelompok tersebar di berbagai kampung di sekitar Banten Selatan (Kabupaten Lebak), Sukabumi Selatan dan Bogor Selatan, di sepanjang lereng-lereng dan bukit-bukit di sekitar Kawasan Ekosistem Halimun.

Berawal dari filosofi hidup yang tertuang dalam suatu kepercayaan yang menganggap bahwa "*Ibu Bumi, Bapak Langit*" yang maknanya adalah keutuhan bumi beserta dengan segala isinya harus dijaga dengan seksama, sebab apabila ada salah satu unsur/makhluk yang dirusak akan mengakibatkan rusaknya keseimbangan proses Kawasan Ekosistem Halimun ini. Perwujudan dari upaya mencegah kerusakan tersebut, masyarakat kasepuhan memandang hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, menjadi:

- a. Hutan Titipan (*Leuweung Titipan*)
- b. Hutan Tutupan (*Leuweung Tutupan*)
- c. Hutan Garapan (*Leuweung Garapan*)

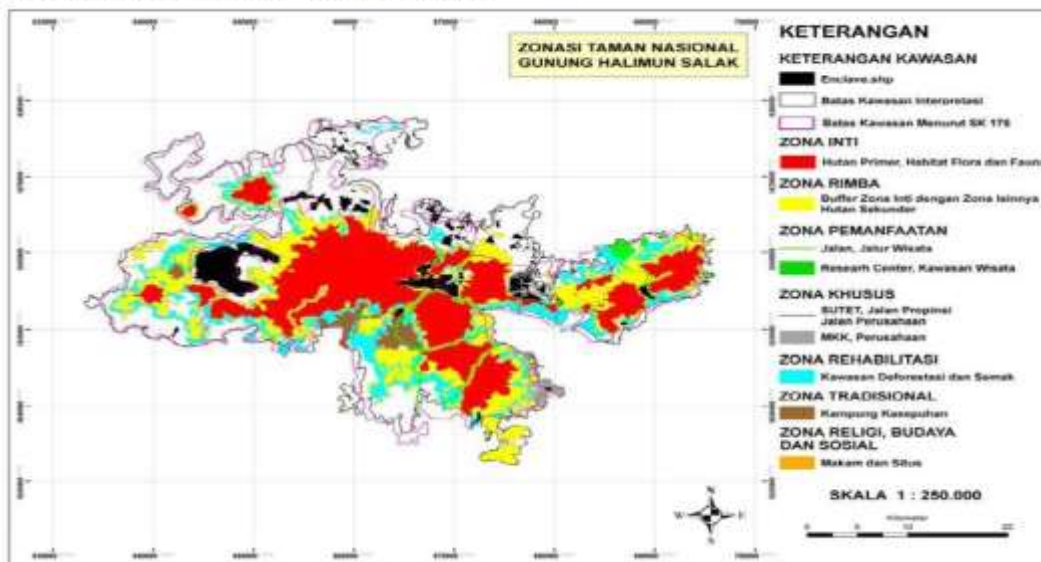
Leuweung Titipan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari para leluhur (*karuhun*) dan juga Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) untuk dijaga keutuhannya dan dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung Titipan* ini biasanya berada di daerah atas pegunungan atau puncak. Bagi masyarakat kasepuhan, *Leuweung Titipan* bukan hanya sebagai hutan lindung, tetapi juga merupakan hutan perlindungan alam mutlak yang tidak boleh diganggu gugat dari awal sampai akhir. Hutan perlindungan alam mutlak menunjukkan keanekaragaman hayati yang tinggi, berfungsi sebagai daerah resapan air (*Leuweung Sirah Cai*) dan sebagai pusat keseimbangan ekosistem. Keberadaan *Leuweung Titipan* ini ditandai dengan adanya "larangan untuk masuk ke dalamnya" secara adat.

Leuweung Tutupan adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk daerah pemukiman masyarakat adat Kasepuhan di masa mendatang (*awisan*) dan alokasi lahan garapan (untuk huma dan kebun). Perpindahan pemukiman ini dilakukan berdasarkan "wangsit" yang diterima oleh *Abah* (pemimpin adat/*sesepuh girang* masyarakat Kasepuhan), dan umumnya dalam kurun waktu 30-40 tahun, masyarakat Kasepuhan berpindah tempat (kampung). Secara ekologi, kurun waktu 30-40 tahun merupakan suatu gambaran mengenai daya dukung alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kemampuan alam untuk memulihkan kembali daya dukungnya. *Tutupan* diibaratkan seperti sebuah pintu yang dapat dibuka dan ditutup untuk diolah. *Leuweung Tutupan* berada pada bagian tengah dari kawasan hutan adat. Manusia diperbolehkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayunya, untuk pemenuhan kebutuhan subsistem (tidak untuk eksploitasi), seperti kayu bakar, kayu untuk bangunan, rotan, damar, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, serat, dan lain-lain. Aturan adat mengharuskan dalam setiap penebangan satu batang pohon, harus diganti dengan pohon yang baru. Penebangan pohon tersebutpun dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari ketua adat, dan hanya untuk keperluan pembuatan rumah (rumah adat).

Leuweung Garapan adalah kawasan hutan yang telah dibuka menjadi lahan yang dapat diusahakan oleh masyarakat, baik untuk bersawah, berhuma/ladang atau kebun. Pengaturan lokasi garapan (apakah di bagian timur, Barat, Utara atau Selatan) ditentukan oleh *Abah* (*Abah*

merupakan sebutan untuk pemimpin masyarakat Adat Kasepuhan). Pengelolaan huma/ladang dilakukan secara rotasi minimal 3 tahun sekali. Untuk daerah-daerah tertentu, penanaman padi huma/ladang tidak boleh dilakukan pada tempat yang sama untuk kedua kalinya, seperti pada *Huma Serang* (suci). Di samping pembagian pengelolaan hutan, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang hidup di Kawasan Ekosistem Halimun juga mengenal berbagai sistem agroforestri khas Jawa Barat lainnya seperti: Kebun Talun, Dudukuhan, dan Kebon Kayu. Sistem ini, di kawasan hutan adat biasanya berada di kawasan leuweung tutupan dan garapan.

Lampiran 4. Peta Zonasi Indikatif TNGHS



Gambar 3.1.

Peta Zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Wilayah kerja TNGHS terletak dalam 28 kecamatan, di mana 9 kecamatan di Kabupaten Bogor, 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan 11 kecamatan di Kabupaten Lebak. Secara keseluruhan terdapat 108 desa yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS.

Komposisi jumlah penduduk dari 108 desa yang ada di TNGHS terdiri dari: 155.345 jiwa di Kabupaten Sukabumi (Tahun 2006), 296.138 jiwa di Kabupaten Bogor (Tahun 2005) dan 154.892 jiwa di Kabupaten Lebak (Tahun 2005). Berdasarkan survey kampung yang dilakukan oleh GHSNP MP-JICA pada tahun 2005 dan 2007, tercatat ada 348 kampung yang berada di dalam kawasan TNGHS.

Di TNGHS tinggal masyarakat kasepuhan yang secara historis penyebarannya terpusat di kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Cisitu. Masyarakat Kasepuhan memiliki lembaga adat yang terpisah dari struktur administrasi pemerintahan formal (Desa). Masyarakat Kasepuhan memiliki kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan konservasi hutan, melalui pembagian wilayah berhutan berdasarkan intensitas pemanfaatan dan tingkat perlindungannya, yaitu: *leuweung titipan* (hutan tutupan), *leuweung tutupan* (hutan tutupan) dan *leuweung sampalan* (hutan bukaan). Mereka memiliki pengetahuan etnobotani dan menggunakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan

pengetahuan tersebut, serta mempertahankan pola pertanian yang mampu melestarikan sumberdaya genetik padi (*Oryza sativa*) lokal. Pada saat ini sebagian anggota Masyarakat Kasepuhan mulai meninggalkan kearifan tradisional yang mereka miliki akibat dinamika proses sosial yang terjadi. Lemahnya pengakuan masyarakat terhadap eksistensi batas kawasan TNGHS di lapangan, serta belum selesainya proses tata batas dan zonasi TNGHS merupakan kendala bagi pengelola untuk mempertahankan kemantapan kawasan hutan dan menjalankan fungsi penegakan hukum yang dapat diterima semua pihak. Dari keseluruhan batas TNGHS sepanjang lk. 1280 km, 1170 km sudah ditata batas dan lk 110 km belum ditata batas, yakni: di Blok Ciladaeun dan Cisimeut, Kabupaten Lebak (sepanjang lk 70 km) dan Blok Cimaja, Kabupaten Sukabumi (sepanjang lk 40 km). Rekontruksi batas masih perlu dilakukan agar batas kawasan TNGHS bebas konflik.

Kemampuan ekonomi masyarakat sekitar TNGHS cenderung rendah, walaupun sebagian besar tidak termasuk dalam kategori rumah tangga (RT) miskin. Secara umum jumlah RT miskin masyarakat di dalam dan di sekitar TNGHS dalam wilayah Kabupaten Sukabumi jumlah RT miskin berjumlah 15.699 RT atau 10 % dari jumlah RT (data tahun 2006, tidak termasuk Desa Cianaga), di kabupaten Bogor berjumlah 29.718 RT atau 10 % dari jumlah RT (data tahun 2005), sedangkan di Kabupaten Lebak berjumlah 22.696 RT atau 15 % dari jumlah RT (data tahun 2005, tidak termasuk desa Wangun Jaya). Degradasi ekosistem hutan banyak terjadi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan TNGHS umumnya telah berlangsung sejak sebelum ditetapkan kawasan tersebut sebagai taman nasional. Beberapa kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di TNGHS yang penting, antara lain: pemanfaatan lahan untuk pemukiman, budidaya pertanian, penambangan (emas, panas bumi, dan galena), pembangunan infrastruktur (SUTET, jalan kabupaten dan propinsi, desa), dan pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan TNGHS.

Di dalam kawasan TNGHS, beroperasi 2 perusahaan pertambangan, yaitu PT Aneka Tambang dan PT Chevron Geothermal Salak. PT Aneka Tambang melakukan penambangan emas di Cikidang (Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak) dan Gunung Pongkor (Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor), sedangkan PT Chevron Geothermal Salak melakukan penambangan panas bumi di kawasan Gunung Salak. Kedua perusahaan pertambangan tersebut mendapatkan izin pinjam pakai kawasan sebelum alih fungsi hutan lindung dan hutan produksi menjadi hutan konservasi (TNGHS). Kawasan TNGHS dikelilingi pula oleh perusahaan perkebunan yaitu PT Nirmala Agung, PTPN VIII Cianten, PTPN VIII Cisalak Baru, PT Jayanegara, PT Intan Hepta, PT Yanita Indonesia, PT Salak Utama, PT. Baros Cicareuh, PT Hevea Indonesia (HEVINDO) dan PT Pasir Madang. Selain itu, di sekitar kawasan TNGHS juga terdapat banyak perusahaan pengguna air, yaitu: industri air minum dalam kemasan, PDAM, industri makanan-minuman, pertambangan, perkebunan, peternakan, industri garmen, industri elektronik dan berbagai industri lainnya yang sumber mata airnya sangat dipengaruhi oleh keadaan ekosistem di dalam kawasan TNGHS.

Praktek pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dapat memicu terjadinya bencana alam di kawasan TNGHS, mengingat karakteristik alamnya menunjukkan adanya titik-titik rawan bencana, antara lain: banjir, tanah longsor, gempa

bumi, uap/gas beracun, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Bencana alam dapat menimbulkan resiko sosial ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Selain itu, kerusakan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang semakin parah pada akhir-akhir ini telah dianggap melampaui ambang batas toleransi. Padahal Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan hutan yang memiliki posisi strategis, karena merupakan daerah perlindungan bagi sumberdaya hayati, flora, dan fauna yang cukup potensial. Pertambahan penduduk yang sangat pesat di sekitar kawasan, serta terjadinya reformasi politik tahun 1998 yang lalu, memiliki dampak ikutan terhadap kerusakan hutan Taman Nasional ini, akibat penjarahan oleh penduduk. Kerusakan tersebut diperkirakan akan semakin parah, jika tidak segera dilakukan penanganan yang serius oleh semua pihak.

Faktor lain yang tampaknya ikut memberikan kontribusi bagi terjadinya kerusakan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tersebut adalah faktor sosial budaya masyarakat setempat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran lingkungan, dan faktor kemiskinan masyarakat daerah penyangga, semakin mempercepat terjadinya perusakan hutan Taman Nasional tersebut. Paradigma pembangunan dari rezim Orde Baru yang memprioritaskan pertumbuhan pada akhirnya hanya melahirkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, menjamurnya konglomerasi, serta kesenjangan sosial.

Di samping beberapa persoalan tersebut di atas, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah penyangga tampaknya juga memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jika kondisi SDA di daerah penyangga Taman Nasional memiliki daya dukung untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat (pangan, sandang, papan, dan lapangan kerja) yang ada disekitarnya, maka diperkirakan sentuhan atau gangguan terhadap SDA yang ada "di dalam" Taman Nasional akan dapat ditekan sekecil mungkin. Akan tetapi, sebaliknya kemungkinan akan terjadi, jika potensi SDA di daerah penyangga Taman Nasional tersebut tidak memadai bagi penduduk di sekitarnya, maka akibatnya terjadi penggerogotan, gangguan, dan bahkan penjarahan terhadap SDA di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Oleh karena itu pemahaman kondisi SDA di daerah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadi sangat penting. Potensi SDA di daerah penyangga Taman Nasional akan menjadi faktor penentu terjadinya tekanan penduduk terhadap SDA yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Jika tekanan penduduk lebih besar dari ketersediaan lahan garapan, maka kemungkinan besar akan terjadi tekanan yang kuat terhadap lahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemberdayaan Masyarakat di Saung Angklung Udjo (SAU)

1. Orientasi tujuan

Secara umum visi SAU adalah untuk menjaga dan melestarikan seni Sunda pada umumnya dan angklung pada khususnya. Misi dari SAU ada banyak yaitu diantaranya adalah: (1) Menjadikan Angklung sebagai media/alat untuk pendidikan, (2) diplomasi angklung, (3) Angklung sebagai alat interaksi antar bangsa dengan tidak melupakan *dignity* dan identitas sebagai angklung adalah Indonesia. Program untuk 5 tahun ke depan dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Berdasarkan *Supporting*, yaitu pembenahan manajemen SAU menuju manajemen yang lebih maju dan berkembang dan pendaftaran angklung sebagai *Intangible Cultural Heritage* di Unesco, PBB; dan (2) Berdasarkan Teknis, yaitu penciptaan dan pengkreasian karya seni berbasis bambu baik bidang kesenian pertunjukan maupun bidang kriya bambu (kegiatan Awi-awi Mandiri), Pengenalan lebih mendalam terhadap sekolah-sekolah (kegiatan resital Angklung dan *coaching* klinik angklung), bea siswa terhadap anak murid akademi SAU.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Analisis terhadap masyarakat sekitar SAU mencerminkan bahwa masyarakat sekitar SAU mempunyai potensi untuk menjadi *supporting system* terhadap produksi angklung maupun produksi kriya bambu lain untuk menjadi souvenir. Untuk itu SAU secara berkala memberikan pelatihan terhadap warga sekitar untuk lebih mendalami teknik mengolah bambu sehingga dengan pelatihan-pelatihan ini menciptakan plasma-plasma di masyarakat untuk bisa menjadi *supporting system* terhadap SAU. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar SAU dapat terangkat dengan *supporting system* yang sudah berjalan tadi.

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

SAU sangat melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan programnya, baik dari pemain (pelaku seni pertunjukan) maupun menjadi *supporting system* terhadap produksi angklung maupun kriya lainnya, sehingga keberadaan SAU langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar SAU.

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Usaha souvenir dan pertunjukan angklung meski dikelola secara turun temurun, tetapi itu dilakukan secara berkelanjutan antar-generasi. Penjelasan yang lebih penting adalah seluruh *stakeholder* di sekitar SAU menempatkan budaya bambu sebagai arena sosial-ekonomi yang dapat mengakselerasikan kehidupan sosial mereka. Faktanya, hingga hari ini usaha tersebut berlangsung sejak 40an tahun lalu. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas yang didukung oleh mekanisme sosial-ekonomi mereka sebagai bagian penting yang menjadikan usaha ini eksis di tengah pengaruh internal dan eksternal lainnya. Di tempat yang lain, kita menyaksikan bagaimana usaha-usaha yang berbasis potensi lokal mandek di tengah jalan setelah berlangsung beberapa tahun. Masyarakat sekitar SAU dalam hal ini memiliki mekanisme sosial yang sangat efektif.

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Pemerintah Kelurahan sangat aktif mendukung program SAU karena langsung dapat terasa oleh masyarakat tetapi hal ini kurang diapresiasi lebih oleh kecamatan maupun pemerintahan kota. Konon, banyak janji-janji terutama dari pemerintah kota untuk membantu SAU hanya sebagai janji yang tidak terealisasi.

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Dengan program plasma yang dikembangkan SAU, masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan minat dan kemampuan dirinya, sehingga apabila kesempatan ini dimanfaatkan secara maksimal maka kemajuan akan terasa dan ternikmati. Keberhasilan SAU dalam membina masyarakat dapat dilihat dari banyaknya koperasi yang bekerja sama dengan SAU dalam hal *supporting system* untuk produksi angklung maupun kriya lain SAU juga mempunyai program Akademi Saung Angklung, yang di dalamnya terdapat anak-anak warga sekitar yang mempunyai potensi untuk menjadi pemain untuk dapat dididik dan dilatih menjadi seorang pelaku dan penikmat seni pertunjukan yang tentunya di luar jam sekolah resminya.

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Dalam hal interaksi dapat dikatakan hampir tidak ada kendala dalam berinteraksi. Hal ini dikarenakan hubungan yang baik selama SAU berdiri menyebabkan tumbuhnya rasa saling menghormati antara SAU dan masyarakat sekitar. Staf SAU sangat banyak, dengan bidang kerja: pemain (dari anak-anak, remaja dan dewasa), pemasok bakalan angklung (pengrajin rangka, pengrajin tabung, pengrajin tukang lilit), pemasok angklung jadi, pemasok kriya bambu dan souvenir, katering makan siang pegawai SAU, katering acara SAU, dan lain-lain. Rata-rata penghasilan bersih dari mulai Rp. 750.000 – Rp. 2,5 juta per bulan per orangnya. Jumlah kunjungan per hari wisatawan asing rata-rata 50 orang, domestik sampai 75 orang.

8. Peranan masyarakat

Masyarakat sekitar sangat mendukung keberadaan SAU sebagai wahana pengembangan sosial budaya. Kegiatan budaya yang berlangsung di SAU menunjukkan bahwa budaya lokal khususnya budaya Sunda maupun kesenian angklung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Keberadaan SAU juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dampak ekonomi muncul dengan datangnya wisatawan domestik maupun mancanegara setiap harinya khususnya setiap akhir pekan/hari libur. Pada dasarnya ada simbiosis mutualisme antara SAU dengan warga sekitar. Dengan kata lain, keberadaan SAU dengan warga sekitar berlangsung karena kesaling-percayaan (*mutual trust*).

9. Peranan pekerja sosial

Pekerja sosial di SAU sebenarnya menjadi penting untuk mendukung keberadaan SAU yang didukung juga oleh pegawai harian yang mengoperasikan kegiatan SAU. Meski demikian, keberadaan SAU didukung oleh segenap warga yang secara sukarela memiliki komitmen dalam mengembangkan budaya Sunda umumnya dan tradisi angklung khususnya. Banyak warga yang bersedia meluangkan waktunya untuk terlibat dalam kegiatan di SAU.

10. Media perubahan

Jelas pada SAU media panggung atau pentas memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melestarikan angklung sebagai budaya lokal. Setiap harinya alunan dan harmoni suara angklung mengalun dengan merdu untuk menampilkan identitas dan eksistensi angklung. Ini bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat Bandung maupun Jawa Barat tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia secara umum di pentas global. *Cultural heritage* dapat berjalan sebagai kekayaan budaya nasional. Media promosi juga memiliki peran penting dalam mengakselerasi angklung sebagai kekayaan bangsa. Berbagai souvenir dan aksesoris menjadi media untuk mempromosikan keberadaan SAU baik di Jawa Barat maupun di Indonesia secara lebih luas. Terakhir, perkembangan media internet juga membantu sosialisasi SAU baik di tingkat nasional maupun internasional.

11. Strategi perubahan

Keberadaan SAU menjadi arena sosio-edukasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatoris berbasiskan pendekatan sosial-budaya setempat. Banyak masyarakat yang menjadikan SAU sebagai wahana pengembangan kebudayaan lokal. Mereka menjadikan SAU sebagai wahana pembelajaran budaya yang tidak didapatkan di pendidikan formal. Pembelajaran yang dilakukan SAU merupakan pengkayaan yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hal ini sangat penting dalam memperkuat budaya lokal yang kian terancam oleh budaya global (baca:globalisasi). "Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai dan melestarikan budaya lokal," demikian barangkali pepatah yang bisa diambil dari SAU ini.

12. Teknik perubahan

Pembelajaran berbasiskan budaya yang dilakukan oleh SAU secara lebih operasional dilakukan dengan cara pelatihan, *workshop*, diskusi maupun berbagai media promosi. Dengan cara ini, warga dapat melakukan pengayaan wacana dan kearifan lokal yang dapat mendukung bertahannya SAU bagi masyarakat sekitar. Kita melihat selalu diselenggarakannya berbagai seminar, diskusi, pelatihan maupun *workshop* terkait dengan angklung. Dengan cara ini, diseminasi angklung dan budaya lokal dapat dilakukan secara massif dan kontinyu.

4.2. Pemberdayaan Masyarakat di Wisata Bunga

1. Orientasi Tujuan

Bagi masyarakat Cihideung, usaha budidaya bunga sudah dilakukan secara turun temurun. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi iklim yang cocok. Masyarakat di luar Bandung bahkan sudah sangat

mengenal Desa Cihideung sebagai sentra penjualan bunga. Usaha budidaya bunga ini sudah dimulai pada tahun 1980an. Lebih berkembang ketika ada kunjungan Bapak Harmoko yang saat itu menjadi Menteri Penerangan pada 1984.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Kondisi di atas mengakibatkan aktivitas ekonomi di Desa Cihideung terpusat kepada bunga sebagai mata pencaharian utama warga. Potensi ini sesungguhnya menjadi kekuatan ekonomi lokal yang menopang sistem sosial-ekonomi di masyarakat Cihideung. Jika merujuk kepada konsepsi pengembangan masyarakat, potensi ekonomi sebagaimana tercermin di masyarakat Desa Cihideung merupakan katalisator perubahan sosial yang mampu membangkitkan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Potensi budidaya Cihideung bukan sekadar melahirkan pengusaha-pengusaha lokal yang tumbuh dan berkembang dari tradisi dan potensi lokal maupun menghasilkan perputaran uang atau ekonomi, tetapi juga lebih dari itu potensi tersebut mampu memperkuat *social capital* maupun *social networking* dan tradisi kepeloporan di masyarakat Cihideung. Fenomena ini sering disebut dengan munculnya inisiasi lokal yang berkembang di masyarakat lokal.

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

Masyarakat Desa Cihideung sebagian besar bermatapencaharian sebagai pedagang bunga. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari potensi alam dan kondisi geografis yang berada di Desa Cihideung. Jika kita mengunjungi Desa Cihideung, kita akan menyaksikan bagaimana hampir seluruh keluarga menjadikan bunga sebagai aktivitas kesehariannya. Berdasarkan penuturan Bapak Asep Sekretaris Desa Cihideung, bahwa saat ini masyarakat yang berdagang bunga kurang lebih ada 2410 keluarga. Biasanya ada yang dikelola sendiri oleh keluarga ada pula yang memiliki karyawan, sesuai dengan besar kecilnya usaha penjualan bunga itu sendiri.

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Usaha budidaya bunga di Cihideung meski dikelola secara turun temurun dari generasi mereka, tetapi itu dilakukan secara berkelanjutan antar-generasi. Tiap generasi di Cihideung memaknai usaha tersebut secara positif dan sangat menentukan kohesi sosial mereka. Faktor turun-temurun hanyalah sebagai wahana alih generasi budidaya bunga di Cihideung. Penjelasan yang lebih penting adalah seluruh *stakeholder* di Cihideung menempatkan budidaya bunga sebagai arena sosial-ekonomi yang dapat mengakselerasikan kehidupan sosial mereka. Faktanya, hingga hari ini usaha tersebut berlangsung sejak 30an tahun lalu. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas yang didukung oleh mekanisme sosial-ekonomi mereka sebagai bagian penting yang menjadikan usaha ini eksis ditengah pengaruh internal dan eksternal lainnya. Di tempat yang lain, kita menyaksikan bagaimana usaha-usaha yang berbasis potensi lokal mandek di tengah jalan setelah berlangsung beberapa tahun. Masyarakat Cihideung dalam hal ini memiliki mekanisme sosial yang sangat efektif.

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Tokoh-tokoh informal di Cihideung memiliki pengaruh besar dalam melestarikan budidaya bunga. Secara tidak langsung, tokoh lokal tersebut ditempatkan sebagai kolaborator perubahan yang menjadi rujukan dan inspirasi bagi masyarakat akar rumput di Cihideung. Peran sebagai kolaborator dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan potensi sosial-ekonomi warga yang berlangsung sejak tahun 1980-an.

Mereka melakukan itu dengan transmisi kebudayaan, yaitu menanamkan nilai sosial-ekonomi kepada generasi-generasi berikutnya yang secara tidak langsung diajak terlibat mengelola budidaya bunga tersebut. Peran kolaborator tersebut paling tidak berlangsung dalam ranah yang paling mikro di keluarga masing-masing. Peta perubahan sosial di Cihideung berlangsung secara simultan, artinya meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman eksternal, budidaya bunga yang ada di Cihideung dapat bertahan. Kasus yang lain terjadi di Desa Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat Kampung Kripik yang terdapat di satu desa. Sayangnya, mekanisme sosial-ekonomi di masyarakat tersebut tidak dapat berlangsung secara efektif. Tahun 2008, usaha lokal tersebut terancam punah karena banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik meneruskan usaha tersebut. Banyak generasi muda yang lebih tertarik untuk bekerja di sektor jasa maupun industri sebagai karyawan maupun buruh.

Ketika dalam suatu komunitas tidak ditemukan media massa, maka disitulah hadir media sosial yakni media yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Siregar, 1990). Keberadaan media sosial tersebut berfungsi sebagai saluran-saluran yang dapat digunakan sebagai penyebarluasan informasi dan mengekspresikan diri. Meski pernyataan ketidakberadaan media massa dalam suatu komunitas sebagai penyebab kehadiran/kemunculan media sosial itu tidak dapat sepenuhnya dikatakan benar mengingat untuk kondisi sekarang media massa sudah dapat diakses di manapun. Namun yang membedakan media sosial dengan media komunikasi lainnya adalah kemungkinannya untuk tercipta integrasi ketika proses komunikasi sosial berlangsung dalam suatu media yang disebut media sosial tersebut (Susanto, 1985).

Media sosial atau media aspiratif di sini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi penduduk atau media ekspresi diri yang berkaitan dalam proses pembangunan di Desa Cihideung. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan media sosial itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cihideung, media sosial yang ada di desa tersebut adalah pengajian, tahlilan, musyawarah RT, dan rembug desa. Namun untuk tahlilan dan pengajian yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu tersebut murni berupa kegiatan rohani. Jadi dalam kedua kegiatan tadi tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, sehingga penulis tidak membahas terlalu dalam mengenai kegiatan ini.

Sementara untuk rembug desa tidak dihadiri oleh seluruh warga tapi hanya perwakilan RT dan RW kadangkala juga tergantung pada materi yang dibicarakan dan tidak dilaksanakan secara rutin.

Selain masalah frekuensi penyelenggaraan dan peserta, materi yang dibahas dalam rembug desa dan pertemuan RT juga menjadi salah satu faktor yang penting. Biasanya materi pertemuan berkaitan dengan kebutuhan warga misalnya mengenai keamanan, pajak, pemilu, dan sebagainya sehingga warga merasa membutuhkan pertemuan tersebut.

Minat untuk menghadiri suatu kegiatan juga didasari atas adanya harapan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta cara memperoleh harapan itu.

Jadi pesan yang dinilai oleh seorang komunikan dirasa bisa memuaskan atau mencukupi kebutuhan pribadinya ataupun lingkungan sosialnya maka ia akan mempunyai kecenderungan menanggapi pesan tersebut. Salah satu wujud dari tanggapan terhadap pesan yang disampaikan adalah berupa kehadiran/partisipasi dalam kegiatan tersebut. "Komunikasi akan berlangsung selama orang mempunyai apa yang disebut *"expectation of reward"* atau adanya harapan akan memperoleh suatu keuntungan dari pelaksanaan komunikasi itu. Keuntungan atau manfaat yang diharapkan bisa merupakan pemenuhan orang dlm bentuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial" (Skinner dalam Susanto, 1977).

Selain adanya harapan untuk memenuhi kebutuhan dan cara memperoleh harapan, minat untuk menghadiri dan berpartisipasi juga didorong oleh adanya tekanan dan harapan masyarakat. Ia tidak disenangi oleh anggota masyarakat yang lain jika kurang rajin, sebaliknya akan mendapat pujian jika besar partisipasinya (Rogers dan Shoemaker, 1986).

Dalam rembug desa dan pertemuan RT yang bersifat tatap muka memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah antara warga dan pengurus RT dan desa.

Komunikasi efektif menurut Schramm harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yakni:

1. Pesan yang disampaikan harus dapat menarik perhatian khalayak yang dituju
2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
3. Dapat menumbuhkan kebutuhan pribadi khalayak dan juga harus diberikan cara/upaya memenuhinya
4. Harus memuat upaya bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan harus pula tidak lepas dari lingkungan budaya (Assegaf, 1987).

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Budidaya bunga yang berlangsung secara berkelanjutan di Cihideung pada dasarnya bertahan juga karena adanya kekuatan kearifan lokal yang berlangsung secara massif. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekhasan budaya-budaya lokal tertentu yang harus diakui keberadaannya, dan berbeda dengan kekhasan budaya lokal tertentu lainnya. Pada praktiknya, dalam situasi inilah kearifan lokal kadang-kadang berbenturan dengan kearifan sosial. Benturan terjadi ketika klaim kearifan lokal dianggap lebih berdaulat dibanding perbedaan-perbedaan dan perbauran yang terjadi di tingkat sosial. Jika pengakuan terhadap kearifan lokal didahulukan (dimenangkan), maka sangat mungkin kearifan lokal terkesan tidak adaptif terhadap konteks-konteks hubungan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karenanya, seperti diketahui, dalam pengertian awalnya memang kearifan lokal tidak dimaksudkan sebagai satu perangkat pengetahuan untuk mengelola relasi sosial.

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Keberadaan budidaya bunga yang sudah berlangsung secara turun temurun pada dasarnya bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat desa Cihideung, tetapi juga memberikan implikasi sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar Desa Cihideung. Implikasi sosial-ekonomi tersebut seperti yang kita sebut dengan *snow ball effect* bagi masyarakat sekitar Cihideung. *Snow ball effect* tersebut mampu menggerakkan potensi sosial-ekonomi yang berlangsung secara massif bagi masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Cihideung menjalin interaksi dengan masyarakat desa lain. Dari interaksi atau komunikasi tersebut lahirlah seperangkat nilai, norma, tradisi, adat istiadat, peran, dan pranata. Di lain pihak, dengan mempergunakan seperangkat nilai, norma, tradisi, adat istiadat, peran dan pranata yang dimilikinya itu masyarakat di luar Cihideung mencoba berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Dalam proses interaksi atau komunikasi tersebut timbul proses pengenalan, penyesuaian, penilaian dan berakhir sampai kepada penerimaan dan penolakan. Dengan kata lain, keputusan apakah masyarakat Cihideung dapat menerima serta memberikan legitimasi atau menolak sesuatu yang datang dari luar didahului oleh proses di atas. Selama ini penjualan bunga selain di daerah Bandung dan Jawa Barat juga di jual ke daerah Jawa, Sumatera dan ke Singapura dan Korea. Sejauh ini

untuk Kalimantan dan Sulawesi belum dilakukan karena masih ada beberapa kendala seperti *suplllyer* di daerahnya.

8. Peranan masyarakat

Masyarakat Desa Cihideung sebagian besar bermatapencaharian sebagai pedagang bunga. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari potensi alam dan kondisi geografis yang berada di Desa Cihideung. Jika kita mengunjungi Desa Cihideung, kita akan menyaksikan bagaimana hampir seluruh keluarga menjadikan bunga sebagai aktifitas kesehariannya. Bagi masyarakat Cihideung, usaha budidaya bunga sudah dilakukan secara turun temurun. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi iklim yang cocok. Masyarakat di luar Bandung bahkan sudah sangat mengenal Desa Cihideung sebagai sentra penjualan bunga.

9. Peranan pekerja sosial

Walaupun pada dasarnya seluruh warga di Desa Cihideung merupakan aktor sosial dalam usaha pertanian bunga tersebut, namun fasilitator pertanian kadang-kadang diperlukan pula. Demikian karena penyuluh tersebut dapat membawa perkembangan akademis mutakhir yang perlu pula dicermati mengenai penanaman dan pemeliharaan bunga. Begitu pula, seorang penyuluh pertanian membutuhkan pengetahuan dan wawasan tentang cara berkomunikasi yang baik dan benar untuk dapat melaksanakan tugasnya. Selain itu pula perlu didukung oleh tingkat pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam segala hal, karena sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan dan wawasan yang memadai untuk dapat memahami persoalan mereka, memikirkan solusinya, ataupun memilih solusi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya adalah menyediakan informasi dan metode komunikasi yang efisien dan efektif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara agen penyuluhan pertanian dengan petani sebagai sasaran penyuluhan pertanian.

10. Media perubahan

Pihak desa belum mendapatkan data yang pasti mengenai berapa jumlah wisatawan yang berkunjung, biasanya kalau dari Bandung kebanyakan hari Senin sampai Jumat. Jika dari luar Bandung seperti Jakarta itu hari Sabtu dan Minggu. Daerah penjualan bunga berada dari desa Cihideung, biasanya daerah penjualan bunga berada di pinggir jalan besar. Selama ini para petani atau perajin tanaman bunga, dalam mendapatkan bantuan modal sering meminjam ke bank ataupun lembaga keuangan mikro.

Ada perusahaan yaitu PT. INTI yang telah memberikan pinjaman modal kepada petani. Masalah yang sering dihadapi yaitu promosi penjualan karena kurang terdapatnya dana, penjualan tidak selalu tinggi, berfluktuasi kadang tinggi kadang rendah biasanya memperhatikan juga waktu, apabila waktu pernikahan biasanya penjualan bisa meningkat tajam. Apabila dirata-ratakan penjualan bunga per bulan dari tiap toko berkisar 2-3 juta. Promosi yang dilakukan belum dilakukan secara besar-besaran karena memerlukan biaya yang relatif besar, paling promosi yang pernah dilakukan yaitu menampilkan profil penjual bunga di majalah *Trubus* dan harian *Pikiran Rakyat*. Hal yang paling penting adalah berbagai pelatihan yang dilakukan Kementerian Pertanian menjadi instrumen penting dalam mengembangkan potensi dan jaringan budidaya bunga di Cihideung. Keberadaan Asosiasi Penjual Bunga Desa Cihideung juga menjadi penting sebagai wadah mereka mengartikulasikan kepentingannya. Masyarakat Cihideung juga memiliki koperasi yang dapat menghindari praktik rentenir dan tengkulak.

11. Strategi perubahan

Masyarakat Cihideung dihadapkan pada segala sesuatu yang datang dari dalam maupun dari luar yang berwujud materil, seperti barang hasil jadi atau produk-produk, maupun sesuatu yang non-materiil seperti nilai, norma, gagasan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Di dalam proses tersebut, tampak dengan jelas bahwa masyarakat Cihideung sebenarnya memiliki mekanisme untuk menyeleksi segala sesuatu yang datang dari luar. Dalam banyak hal, mekanisme yang berfungsi menyeleksi itu akan bersifat negatif dan berubah menjadi *self-defense mechanism*, bila segala sesuatu yang datang dari luar itu dipandang dan dinilai akan merugikan keutuhan masyarakat atau mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Cihideung.

12. Teknik perubahan

Kondisi di atas mengakibatkan aktivitas ekonomi di Desa Cihideung terpusat kepada bunga sebagai mata pencaharian utama warga. Potensi ini sesungguhnya menjadi kekuatan ekonomi lokal yang menopang sistem sosial-ekonomi di masyarakat Cihideung. Jika merujuk kepada konsepsi pengembangan masyarakat, potensi ekonomi sebagaimana tercermin di masyarakat desa Cihideung merupakan katalisator perubahan sosial yang mampu membangkitkan kewirausahaan sosial. Potensi budidaya Cihideung bukan sekadar melahirkan pengusaha-pengusaha lokal yang tumbuh dan berkembang dari tradisi dan potensi lokal maupun menghasilkan perputaran uang/ekonomi, tetapi juga lebih dari itu potensi tersebut mampu memperkuat modal sosial maupun jejaring sosial dan tradisi kepeloporan di masyarakat Cihideung. Fenomena ini sering disebut dengan munculnya inisiasi lokal yang berkembang di masyarakat lokal. Sejauh ini pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Cihideung yang bermatapencaharian budidaya bunga dilakukan dengan mengadakan penyuluhan pertanian bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Penyuluhan dilakukan biasanya minimal 1 tahun sekali. Di Cihideung, usaha budidaya bunga yang berlangsung secara turun temurun seolah sudah menjadi konsensus bagi warganya. Berbagai bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan Kementerian/Dinas Pertanian merupakan hal yang penting dalam pengembangan tersebut.

4.3. Pengembangan Masyarakat di Keraton Kasepuhan

Berdasarkan wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini memang tengah menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal.

Secara internal, pihak Keraton saat ini menghadapi kendala dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Keraton. Hal ini berhubungan dengan minimnya bantuan dana dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak heran, pengelolaan Keraton saat ini juga tidak berjalan secara optimal, meski pelayanan kepariwisataan oleh Kelompok Pengelola keraton tetap berjalan dengan baik.

Pangeran Arief menyadari bahwa keraton adalah benteng terakhir kebudayaan. Ini merupakan hal penting bagi masyarakat dewasa ini. Namun hal tersebut dalam fakta dan teknisnya ternyata tidak mudah. Padahal secara ideal, Keraton dapat berfungsi sebagai pusat budaya, pusat peradaban bahkan berfungsi sebagai paru-paru kota. Kendala eksternalnya adalah promosi yang kurang karena masalah dana juga. Hal ini berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan. Tiket yang ada sebesar Rp. 5000 pun tidak membantu banyak terhadap siklus keuangan keraton.

Keraton juga menghadapi kendala Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pengelolaan Keraton. Hal yang paling kecil misalnya, untuk memelihara kebersihan Keraton yang luasnya 375 hektar ini hanya diurus oleh 5 petugas kebersihan. Hal tersebut sangat memberatkan tapi apa daya karena minimnya dana untuk operasional sehari-hari. Begitu juga *guide* Wisata yang sangat sedikit jumlahnya dan akhirnya mengandalkan internal kerabat Keraton sendiri.

Ekonomi kreatif berjalan tidak terlalu maksimal, meski ada Perajin Topeng Cirebon dan Perajin Kaligrafi Kaca. Namun untuk ukuran Keraton Kasepuhan, jumlah tersebut tentunya sangat sedikit.

1. Orientasi tujuan

Keraton adalah benteng terakhir kebudayaan. Ini merupakan hal penting bagi masyarakat dewasa ini. Namun hal tersebut dalam fakta dan teknisnya ternyata tidak mudah. Padahal secara ideal, keraton dapat berfungsi sebagai pusat budaya, pusat peradaban bahkan berfungsi sebagai paru-paru kota.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Keraton tetap berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya serta berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu, pihak keraton terus bekerja keras mencari cara agar keberadaannya bermanfaat untuk warga sekitar. Misalnya, tidak melarang masyarakat berjualan di depan Keraton, memulai usaha buku-buku mengenai Keraton Kasepuhan, dll. Ini salah satu upaya Keraton Kasepuhan Cirebon agar kehadirannya bermanfaat untuk warga sekitar. Efeknya memang tampak halaman depan Keraton terlihat sangat kumuh.

Bahkan, bagi Elang Sudrajat (wawancara pada tanggal 15 April 2014), kuncen Makam Sunan Gunung Djati, menganggap bahwa keberadaan para pengemis dan peminta-minta adalah lumrah. Hal ini atas dasar wasiat dari Sunan Gunung Jati kepada para keturunannya. Wasiat Sunan Gunung Jati itu berupa "*ingsun titip tajug lan fakir miskin*" (Aku titip mesjid dan fakir miskin).

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

Masyarakat Cirebon dan sekitarnya khususnya bagi masyarakat sekitar pada dasarnya sangat merasakan manfaat dengan adanya keraton Kasepuhan. Dampak ekonomi dirasakan cukup penting oleh masyarakat sekitar. Keberadaan Keraton Kasepuhan Cirebon dapat dipahami sebagai kebanggaan bagi masyarakat Cirebon khususnya dan Jawa Barat umumnya. Hal ini dirasakan juga oleh kekuasaan lokal lainnya seperti Kesultanan Surakarta, dan sebagainya.

Masyarakat sekitar pemakaman kompleks Sunan Gunung Jati dan para masyarakat Desa Astana Kecamatan Gunung Jati menganggap bahwa keberadaan makam memberikan dampak yang sangat positif bagi para masyarakatnya. Bahwa dengan adanya makam Gunung Jati ini bisa membantu perekonomian masyarakat Astana dan sekitarnya (wawancara dengan Elang pada tanggal 25 Mei 2014). Hal ini terlihat dari banyaknya para penjual yang banyak sekali berjajar di sepanjang jalan dan sekitar kompleks pemakaman.

Pedagang yang berjualan di sekitar makam kebanyakan adalah para pedagang kembang tujuh rupa dan banyak pula yang menjajakan barang dagangannya berupa botol-botol plastik atau jerigen-jerigen kosong kepada para peziarah. Selain itu pula, ada banyak penjual yang menjual beraneka makanan kering serta ada pula warung nasi. Ada pula warung atau toko yang menjajakan oleh-oleh khas Cirebon dan oleh-oleh berupa makanan tempo dulu yang kini jarang ditemui serta banyak para penjual yang menjual *souvenir-souvenir* yang berupa kerajinan tangan yang terbuat dari kayu.

Salah seorang pedagang yang berada di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati adalah Asih. Asih yang tak memiliki keahlian dan keterampilan khusus serta hanya seorang tamatan SMP sehingga tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Asih memilih berdagang karena melihat peluang bahwa dengan banyaknya peziarah yang datang maka akan membantu perekonomiannya. Barang dagangan yang Asih tawarkan hanya berupa jerigen-jerigan dan botol-botol kosong, bunga untuk ritual nyekar para peziarah serta beberapa guci atau kendi-kendi kecil yang terbuat dari tanah liat merah (wawancara dengan Asih pada 24 April 2014).

Ada pula yang menjadi tukang parkir di sekitar kompleks pemakaman. Adi, salah seorang juru parkir di sekitar kompleks pemakaman, menuturkan bahwa dengan keberadaan makam Sunan Gunung Jati sangat membantu, terlebih lagi dengan kondisi fisik yang tak sempurna dan hanya tamatan SD yang tak memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Dengan adanya makam Sunan Gunung Jati, Adi dapat memperoleh uang dengan menjadi juru parkir. Ketika banyak peziarah yang datang maka upah yang diterima sebagai juru parkir akan sangat banyak (wawancara pada tanggal 15 April 2014).

Sebagian masyarakat desa Astana banyak yang lebih memilih menjadi penjaga dan pengurus makam dikarenakan pendapatan yang didapatkan lumayan tinggi. Pendapatan yang diperoleh tidak tentu karena tergantung pada ramai atau tidaknya peziarah yang datang. Jika suasana makam ramai maka per orang bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 per dua minggu sekali. Tetapi jika keadaan dan suasana makam Sunan Gunung Jati sedang sepi maka biasanya pendapat yang diperoleh sekitar Rp. 1.000.000 dalam 2 minggu. Dengan demikian dengan adanya keberadaan makam Gunung Jati ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar desa Astana (wawancara dengan Elang pada tanggal 25 Mei 2014).

Keramaian peziarah yang datang ke makam Sunan Gunung Jati dapat membawa peningkatan pendapatan rumah tangga bagi masyarakatnya. Dengan adanya tradisi ziarah ini tidak hanya menciptakan suasana ramai tetapi juga bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar makam, khususnya bagi masyarakat yang memiliki jiwa berwirausaha. Masyarakat sekitar desa Astana kebanyakan tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai sehingga dengan demikian masyarakat dapat membuka usaha sendiri seperti berdagang. Melalui usaha tersebut setidaknya dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga.

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Keberadaan keraton Kasepuhan Cirebon memiliki sejarah panjang bagi budaya lokal yang bertahan sangat lama di Cirebon maupun Jawa Barat umumnya. Jika kita merujuk pada perspektif historis, Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki makna yang sangat dalam keberadaannya. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan Keraton Kasepuhan menjadi simbol sejarah sekaligus budaya yang sangat langka. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah dan perjalanan panjang keberadaannya. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, Indonesia adalah akumulasi dari wajah-wajah kekuasaan lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok Indonesia. Keraton Kasepuhan Cirebon adalah salah satunya.

Keunggulan Keraton Kasepuhan Cirebon adalah keterkaitannya dengan tradisi agama, yaitu ziarah kubur kepada ulama, dalam hal ini adalah Sunan Gunung Jati. Maka, fungsi-fungsi dari agama pun muncul di sini. Menurut E.K Nottingham bahwa secara empiris, agama dapat berfungsi didalam masyarakat antara lain sebagai (1) faktor yang mengintegrasikan masyarakat; (2) faktor yang mendisintegrasikan masyarakat; (3) faktor yang bisa melestarikan nilai-nilai sosial; dan (4) faktor yang bisa

memainkan peran yang bersifat kreatif. Inovatif dan bahkan bersifat revolusioner. Adapun fungsi agama ditinjau dari kajian sosiologis, ada dua macam. Pertama, *manifest* adalah fungsi yang disadari dan biasanya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku-pelaku ajaran agama. Sedangkan fungsi *latent* adalah fungsi yang tersembunyi, yang kurang disadari oleh pelaku-pelaku ajaran agama (Ishomuddin, 2002: 51).

Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena agama itu sendiri ternyata dalam praktiknya agama diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Ishomuddin, 2002: 54-56). *Pertama*, fungsi edukatif yakni bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh menyuruh dan melarang. *Kedua*, fungsi penyelamat. *Ketiga*, fungsi *social control* dimana ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial baik secara individu maupun kelompok.

Keempat, fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas yakni dimana para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam suatu kesatuan. *Kelima*, fungsi transformatif yakni ajaran agama dapat mempengaruhi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. *Keenam*, fungsi kreatif yakni ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya tetapi juga untuk kepentingan orang lain. *Ketujuh*, fungsi sublimatif yakni ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrowi melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama maka dapat dilakukan.

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Dengan mengacu pada derajat saling mempengaruhi antara masyarakat dan pemerintah, maka apa yang terjadi di keraton Cirebon bisa dikategorikan berada pada tahap *engaging* (keikutsertaan). Dalam konteks ini, maka yang perlu dilakukan oleh Pihak pemerintah dan masyarakat adalah melakukan dialog dan konsensus dalam pengembangan keraton. Inisiatif yang datang dari pemerintah, keluarga keraton, dan masyarakat yang lain perlu dipertemukan untuk kemudian dicari kata yang sama dalam pengembangan keraton.

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, yaitu soal keamanan dan ketertiban. Ini jelas-jelas merupakan wewenang pemerintah untuk melakukannya. Demikian pula, pemerintah bisa mengambil manfaat yang besar dari dijadikannya Keraton dan Makam sebagai sentra wisata budaya dan religi.

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Seluruh warga masyarakat dalam model ini terlibat sebagai aktor penting dalam perubahan sosial. Mereka memiliki peran yang tidak dapat dianggap kecil. Keberadaan Keraton Kasepuhan Cirebon hingga hari ini bertahan karena berbagai kelompok sosial dan masyarakat umum yang masih memiliki kepedulian akan bertahannya warisan leluhur di Cirebon tersebut. Keberadaan Keraton Cirebon dalam ruang lingkup Jawa Barat memang sangat unik dan langka. Hal ini tidak ditemukan di tempat lain di Jawa Barat.

Di sini nampak bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon itu sebagai wadah (*locus*) dari tindakan sosial masyarakat sekitarnya. Bagi Weber, tindakan sosial (*soziales handeln = social action*; juga berarti perilaku) mencakup semua perilaku manusia ketika manusia itu bertindak atau beraktivitas yang melibatkan makna subyektif kepada tindakannya tersebut. Weber melihat bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut

tindakan sosial jika tindakan tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan atau melibatkan makna subyektif dalam tindakan tersebut, dengan memperhitungkan perilaku-perilaku orang lain dan mengorientasikan perilaku-perilaku tersebut ke dalam tindakan-tindakan sosialnya sendiri. Itu terlihat dari aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon.

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Seluruh warga yang mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan konsumen yang menikmati wisata sejarah-budaya. Sebagai konsumen mereka disuguhkan keindahan sosial-historis terkait Keraton Kasepuhan Cirebon. Generasi muda khususnya pelajar merupakan konsumen penting yang memiliki peran penting dalam transmisi kebudayaan dari tempat ini. Mereka menjadikan Keraton Kasepuhan sebagai wahana pembelajaran sosial-historis. Hal yang lebih penting adalah Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai wahana untuk melakukan alih generasi kekayaan budaya yang terus dilakukan kepada generasi muda. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Sekitar 15-20 tahun mendatang, generasi muda tersebut kelak akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa.

Ada yang unik dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini, yaitu keberadaan Makam Sunan Gunung Jati yang memunculkan adanya wisata religi. Makam Sunan Gunung Jati ini akan sangat ramai bahkan penuh sesak dipadati oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah hanya pada waktu-waktu tertentu. Bahkan keluarga Keraton Kasepuhan dan Kanoman juga akan ikut datang untuk berziarah pada waktu-waktu itu. Waktu-waktu yang sangat ramai dipadati peziarah adalah ketika diadakannya *Grebek Maulud* saat bulan *Maulud*, ada pula yang menyebutnya *panjang jimat*. Ketika bulan *Syawal* atau dinamakan pula dengan *Grebek Syawal*, kemudian setiap malam Jumat *Kliwon* dan setiap bulan *Rajab* guna mencari barokah (Wawancara dengan Sutarjo pada 2 Mei 2014).

8. Peranan masyarakat

Sebagai kebanggaan masyarakat Cirebon khususnya dan Jawa Barat umumnya, masyarakat sebagai konsumen seharusnya dapat terlibat optimal dalam mempertahankan dan merawat keberadaan wahana bersejarah ini. Berdasarkan penuturan Pangeran Cirebon, saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon mengalami tantangan yaitu kondisi yang tidak terawat. Tantangan ini sebenarnya menjadi sinyal dan panggilan bagi masyarakat sekitar yang notabene sebagai konsumen untuk ikut serta merawat Keraton Kasepuhan Cirebon. Jika Keraton Kasepuhan dapat memberikan kontribusi sangat besar bagi masyarakat khususnya generasi muda, seharusnya juga masyarakat sekitar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam merawat Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut.

Ada pula dana yang didapat dari masyarakat untuk perawatan Keraton dan makamnya. Dalam wawancara pada 4 Juni 2014 menurut salah satu *guide* yang tidak mau untuk disebutkan namanya, mengatakan bahwa para peziarah bisa masuk ke makam Sunan. Biasanya para *guide* akan membawa para peziarah ke *bekel* atau *jeneng* yang nantinya *bekel* atau *jeneng* ini berjanji akan memberikan akses ke makam Sunan Gunung Jati. *Bekel* ini menuturkan bahwa ketika ingin masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati maka harus ada izin dari Sultan Cirebon dan sang *bekel* atau *jeneng* ini dapat mewakilinya. Tentunya untuk bisa masuk ke makam Sunan harus ada maharnya. Mahar ini akan digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan makam serta untuk disetorkan ke Keraton.

Mahar yang harus dibayarkan adalah seikhlasnya, terserah kepada para peziarah. Namun pada kenyataannya biasanya orang-orang yang berziarah masuk ke makam Sunan membayar Rp. 1.000.000 dan terkadang ada pula yang membayar hingga sebesar Rp. 3.000.000 tetapi ada pula peziarah yang

membayar Rp. 300.000 saja. Mahar ini sudah menjadi suatu kewajiban agar para peziarah dapat masuk ke makam Sunan Gunung Jati, sebab untuk perawatan makam itu sendiri.

9. Peranan pekerja sosial

Keberadaan Keraton Kasepuhan Cirebon tidak semata-mata ditentukan oleh pihak keratonnya maupun masyarakat sekitar, tetapi juga dapat dilibatkan pihak eksternal lainnya seperti peneliti, analis maupun fasilitator lapangan. Mereka dapat dilibatkan secara independen maupun secara resmi oleh pihak Keraton. Pihak eksternal ini dapat memberikan berbagai masukan penting untuk program-program yang dapat dilaksanakan oleh Keraton Kasepuhan. Peneliti dari universitas dapat dilibatkan untuk berbagai penelitian yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi keberlangsungan program-program budaya tersebut.

Fasilitator lapangan juga dapat dilibatkan dengan berbagai ide maupun program yang menarik, inspiratif dan mencerdaskan masyarakat sebagai konsumen. Mahasiswa tingkat akhir yang memiliki *concern* dan komitmen dengan pengembangan budaya dapat dilibatkan dalam program pengembangan budaya. Dengan cara ini, keterlibatan mereka sebagai pekerja sosial dapat menjadikan Keraton Kasepuhan semakin menarik.

10. Media perubahan

Berdasarkan temuan lapangan, keberadaan Keraton Kasepuhan Cirebon juga ditopang oleh mobilisasi organisasi formal yang berada di kawasan Cirebon dan sekitarnya. Pada level ini, sinergi yang harmonis terjadi antara pihak Keraton Kasepuhan sebagai organisasi informal dan organisasi formal lain seperti pemerintah daerah, DPRD Kota Cirebon, Dinas Pariwisata, maupun pihak universitas. Meski demikian, berdasarkan keterangan dari Pangeran Arief Natadiningrat, hubungan harmonis ini selayaknya diejawantahkan juga dalam wujud konkret berupa kebijakan pembinaan dan pengembangan kawasan keraton secara optimal dari Pemda khususnya.

Daya tarik Keraton bahkan lebih banyak disebarkan melalui jalur wisata religi (ziarah). Pengunjung yang datang tertarik akan keadaan, keberadaan dan tradisi ziarah yang pernah didengar dan dilihat dari orang lain maupun dari media massa. Saat ini aktivitas ziarah memang sering dibuat menyatu dalam satu paket kegiatan wisata, bahkan ziarah sendiri kemudian dimasukkan kedalam kategori pariwisata. Berpariwisata sangat erat kaitannya dengan aspek psikologi dan sosiologi. Secara psikologis seseorang yang melakukan pariwisata dapat memperoleh ide-ide baru dan pandangan baru untuk mengisi serta melengkapi kebutuhan hidupnya.

11. Strategi perubahan

Perubahan yang berlangsung di Keraton Kasepuhan Cirebon dilakukan dengan cara penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ahli sangat penting untuk semakin mendinamiskan peran sosial Keraton Kasepuhan Cirebon. Peran sosio-edukasi yang berlangsung di Keraton Kasepuhan Cirebon selama ini berlangsung cukup efektif dalam membangun kesadaran akan pentingnya budaya berbasiskan historis tersebut. Meski demikian, minimnya Dana pengembangan Kawasan Keraton, berpengaruh pula pada hasil perubahan yang diharapkan.

12. Teknik perubahan

Transformasi kesadaran sosio-edukasi yang berlangsung di Keraton Kasepuhan tidak secara langsung terjadi sebagaimana lazim dilakukan pendidikan formal di dalam kelas yang hanya bersifat dua arah. Pendekatan yang terjadi melalui pendekatan andragogi, yaitu pendidikan model orang dewasa yang

menjadikan individu sebagai orang yang aktif dan terlibat dinamis dalam pembangunan kebudayaan. Hal yang penting juga adalah adanya perumusan kebijakan dan perencanaan program yang dapat memperkuat pemberdayaan sosial yang dilakukan Keraton Kasepuhan.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, pihak Keraton perlu mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Selain itu, dalam menyasrakan diri dengan lingkungannya. Di lingkungan tersebut masyarakat keraton hidup untuk menyempurnakan dan memperluas sikap tindaknya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya. Dengan demikian, Keraton menerapkan sistem adaptif terhadap masyarakatnya, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun, disamping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat terus hidup.

4.4. Pemberdayaan Masyarakat di Sentra Golok Galonggong

1. Orientasi tujuan

Secara umum visi kelompok kerajinan Golok Galonggong sebagai wahana bertukar informasi bagi pengrajin merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan daya pikir dan pengetahuan bagi mereka. Dalam kaitannya dengan informasi, kelompok pengrajin merupakan kelas belajar dan berinteraksi *edukatif* dalam rangka mengadopsi inovasi. Oleh karena itu tujuan pengrajin berkelompok adalah untuk mempermudah penyebaran dan penyerapan informasi antara pengrajin dalam kelompok kecil.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Karena bersifat kerajinan, maka yang selalu menjadi masalah di sentra produksi golok Galonggong adalah produktivitas, yang elemen mendasarnya untuk meningkatkan kenaikan produktivitas adalah "kenaikan gaji riil". Banyak pekerja mengatakan bahwa: "Kami bekerja memang ibadah tetapi kenyataannya juga membutuhkan kenaikan gaji yang proporsional. Ini lebih disebabkan oleh harga barang-barang kebutuhan yang selalu naik dan biaya hidup yang terus meningkat". Caranya, bisa dilakukan dengan kenaikan hasil produk yang kualitasnya baik, kemasannya menarik tetapi harganya juga mengikuti".

Dengan memperhatikan etos kerja yang baik maka pengusaha sangat memperhatikan kebutuhan riil para pekerja. Para pengusaha sadar bahwa keberhasilannya tidak akan dapat dikerjakan oleh dia sendiri melainkan juga tergantung dari para pekerja pula. Kualitas etos kerja tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sifat individu sangat personal. Gaji adalah hak setiap pekerja sehingga tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Tradisi naik gaji dikenakan secara periodik disesuaikan dengan prestasi dan lama waktu (masa) bekerja di tempat tersebut. Disamping itu pekerja juga sadar bahwa setiap orang bekerja berdasarkan komitmen yang disepakati antara pihak pengusaha dan pekerja.

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

Komunikasi kelompok pengrajin golok Galonggong sangat efektif berjalan di suatu komunitas yang memiliki kegotongroyongan dan kekerabatan yang baik seperti di Manonjaya, Tasikmalaya ini. Sifat gotong royong dan kekerabatan itulah umumnya ciri khas kehidupan masyarakat di Indonesia. Mereka membentuk

kelompok, karena sesungguhnya individu itu sadar bahwa dia tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Ketika memasuki kelompok, para anggota sadar, bahwa masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan yang ingin dipecahkan bersama. Kesadaran itu cukup mengkristal, karena persoalan-persoalan yang mereka alami adalah sangat penting menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Persoalan-persoalan pun semakin kompleks dari waktu ke waktu bahkan memerlukan bantuan pihak lain. Caranya kemudian, adalah mereka mengadakan komunikasi, interaksi dan interrelasi secara solid dan mantap. Makin akrab dan makin sering berinteraksi diharapkan terjalin kerjasama yang signifikan untuk memecahkan masalah-masalah besama sesuai dengan kesepakatan yang telah terbentuk sebelumnya.

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Dalam kaitan faktor produksi dan marketing kerajinan golok Galonggong, yang barangkali hanya berposisi sebagai kaitan tidak langsung dengan perhitungan produktivitas kuantitatif, adalah faktor komunikasi dan filosofis manusia. Bahwa kerja itu merupakan salah satu pengabdian kepada Tuhan YME dan sesama manusia. Pandangan seperti ini erat melekat pada komunitas masyarakat desa sehingga ketika faktor -faktor kuantitatif seperti pendapatan yang memadai, fasilitas kerja yang kondusif, jam kerja per satuan unit, kerusakan/penyimpangan dan sebagainya - itu tidak didapat dari tempat kerja maka bukan tidak mungkin manakala kondisi psikologis yang nyaman tersebut hadir dan dominan, maka produktivitas kemungkinan saja bisa meningkat. Jadi ketersentuhan pekerja pada aspek-aspek psikologis, dorongan atau peningkatan motivasi pada saat komunikasi kelompok merupakan faktor yang sangat berperanan pada peningkatan produktivitas. Dimensi psikologis datang dari pengusaha maupun di antara pengrajin - yang muncul dalam sikap saling toleransi, menghargai, membantu dan keterbukaan. Untuk pekerja perempuan, muncul penghargaan yang lebih spesifik, seperti: diperbolehkannya mengajak anaknya yang masih kecil (balita) ke tempat kerja sehingga memunculkan suasana *at home* yang berdampak pada ketenangan kerja dan terakhir menaikkan produktivitas kerja.

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Pemerintah memang mendukung kegiatan ekonomi kerajinan golok Galonggong. Namun temuan lain hasil studi ini juga menunjukkan bahwa sumber kurangnya kemampuan daya saing pasar yang paling dirasakan khususnya oleh usaha skala menengah justru akibat lingkungan usaha yang tidak kondusif dengan banyaknya pungutan-pungutan yang menggerogoti margin. UKM yang notabene riil melakukan kegiatan produktif sangat mengandalkan margin yang didapat sebagai modal untuk melakukan akumulasi kapital maupun efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Penurunan margin akibat berbagai bentuk pungutan akan berimplikasi pada penurunan kemampuan melakukan akumulasi kapital sehingga berdampak pada kemampuannya melakukan akumulasi kapital, menurunkan efisiensi dan memaksanya meningkatkan harga jual sehingga menjadi sulit bersaing dalam iklim pasar yang kompetitif. Dipihak lain, hambatan tersebut semakin melemahkan motivasi UKM untuk berkembang lebih maju melalui inovasi, perluasan pasar maupun peningkatan skala usaha. Di sinilah perlunya intervensi pemerintah untuk membantu berbagai hal untuk peningkatan usaha.

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Apabila dilihat dari proses diskusi, maka sifatnya tidak beraturan (random) dan berbeda-beda. Sifat kelompok diskusi di lingkungan UKM dan Industri Rumahtangga di Kecamatan Manonjaya dapat dikategorikan sebagai berikut, (1) untuk subkelompok usaha pengrajin Golok Galonggong, gula kelapa, penggergajian kayu – sifat diskusinya ada dalam “kelompok konsensus”; (2) Subkelompok usaha minyak dilem dan pembuatan alat pertanian sederhana – masuk dalam “kelompok nonkonsensus”. Kategori diskusi kelompok konsensus ditandai dengan kejelasan atau panjangnya, juga disertai dengan orientasi dan obyektifitas masalah yang tinggi. Hasil diskusi diarahkan kepada saran yang bermanfaat dan upaya-upaya untuk mengatasi konflik. Sedangkan kelompok nonkonsensus ditandai dengan kecenderungan hasil diskusi yang tidak terarah. Apabila diambil suatu kesimpulan kemungkinan besar tidak ada tindakan konkret dalam rangka menindaklanjuti solusi-solusi yang telah ditetapkan. Temuan berikutnya adalah dimensi Proses Pemecahan Masalah. Keltner (1974) menyatakan bahwa efektifitas suatu diskusi pemecahan masalah berkaitan dengan sejumlah faktor yang mempunyai hubungan dengan beberapa tujuan dan hambatan dalam situasi permasalahan yang berhasil diidentifikasi peserta kelompok. Ini dilakukan peneliti dengan cara “apakah suatu kelompok sesudah melakukan analisis awal terhadap suatu masalah akan menjadi lebih efektif seandainya kelompok menyampaikan kemungkinan cara pemecahan masalah sebelum menetapkan kriteria untuk menilai cara pemecahan”.

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Secara rinci terdapat 10 subkelompok di UKM dan Industri RT pengrajin golok Galonggong di Kecamatan Manonjaya. Setiap kelompok terdiri dari lima 5 orang anggota, masing-masing membahas tiga masalah di bawah pengarahan seorang pembimbing yang terlatih melalui pola pemecahan masalah khusus, yaitu: kriteria “peng-ide-an”, yaitu cara-cara pemecahan masalah tertentu; peng-ide-an kriteria; cara pemecahan masalah, yaitu saran-saran tentang cara-cara pemecahan masalah serta evaluasinya terjadi kurang lebih secara bersamaan. Pengukuran lain juga dilakukan melalui jawaban peserta atas pertanyaan yang berhubungan dengan kepuasan terhadap keputusan kelompok, pemimpin yang ditunjuk, prosedur yang dianut, jumlah ide yang dinilai baik oleh setiap dua orang ahli, jumlah saran cara pemecahan masalah.

8. Peranan masyarakat

Di Kecamatan Manonjaya, kelompok-kelompok usaha sejenis memang membentuk kelompok-kelompok dengan mengadakan perkumpulan secara teratur. Sedikitnya satu bulan sekali mereka mengadakan pertemuan, guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi. Di antara industri-industri sejenis mereka saling menjalin hubungan dengan baik, yang implikasinya adalah saling membantu, memberi informasi, memotivasi dan membentuk kerjasama. Di dalam kerjasama, interaksi sosial yang ingin dicapai berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga seseorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga mencapai tujuan. Memang ada prasarat dalam hal kerjasama yaitu, cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, ada kesediaan dari seseorang anggota kelompok untuk mengganti kegiatan anggota kelompok yang lain, karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan saling tergantung dengan kegiatan lain dalam hubungannya dengan pencapaian kerjasama.

9. Peranan pekerja sosial

Pekerja sosial di sekitar sentra kerajinan golok Galonggong sebenarnya menjadi penting untuk mendukung keberadaan masyarakat pengrajin untuk mempelajari dan mendalami peluang dan tantangan bisnis. Faktor peluang yaitu: (1) adanya peraturan dan undang-undang peningkatan sumber daya manusia, (2) permintaan pasar belum terpenuhi dan peluang pasar terbuka lebar, (3) tersedianya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang dekat dengan perusahaan, (4) tingginya minat pengusaha/pemilik perusahaan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas. Faktor ancaman yaitu: (1) kurang kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, (2) keluar atau pindahnya tenaga kerja profesional, (3) fruktiasi harga yang mendukung input (4) perkembangan ekonomi global.

10. Media perubahan

Di Kecamatan Manonjaya, proses komunikasi kelompok berlangsung melalui pembentukan kelompok-kelompok yang mengadakan perkumpulan secara teratur sedikitnya satu bulan sekali guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi. Diantara industri-industri sejenis tersebut terjalin hubungan dengan baik yang implikasinya adalah saling membantu, memberi informasi, memotivasi dan membentuk kerjasama. Memang ada prasarat dalam hal kerjasama yaitu, cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, ada kesediaan dari seorang anggota kelompok untuk mengganti kegiatan anggota kelompok yang lain, karena kegiatan yang dilaksanakan saling tergantung dalam hubungannya dengan pencapaian kerjasama.

11. Strategi perubahan

Kemampuan fleksibilitas sentra kerajinan golok Galonggong sebagai salah satu UKM dalam merespon fluktuasi permintaan pasar yang bersumber dari keunggulan skala ekonomi harus dilakukan dengan penyesuaian pemanfaatan kapasitas produksi dengan cepat. Perubahan permintaan yang terjadi dengan cepat di pasar pada saat krisis mampu direspon oleh UKM tanpa terjadinya inefisiensi yang begitu besar. Studi CESS dan The Asia Foundation (2002) terhadap industri skala menengah dan besar menunjukkan bahwa semakin kecil skala usaha, semakin kecil dampak penurunan output yang terjadi akibat krisis. Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian kapasitas produksi menjadi faktor yang mendukung kecilnya dampak penurunan output pada usaha skala kecil dan menengah.

Harus diakui sampai saat ini UKM telah secara efektif menjadi *safety valve* ekonomi dalam penyediaan tenaga kerja, memproduksi output dan sumber kehidupan dan ketenangan bagi jutaan rakyat Indonesia. Salah satu indikasi mengapa UKM bertahan adalah karena salah satu atau kombinasi alasan berikut: (a) tidak terkaitnya kegiatan ekonomi UKM dengan pinjaman dollar, (b) seperti dilaporkan oleh (CESS, 1999) UKM mampu mengadakan langkah penghematan dengan substitusi input mahal terhadap input yang lebih murah, dan (c) serta mampu melakukan keanekaragaman usaha (diferensiasi usaha) dan membuka pasar baru (diversifikasi pasar) dan (d) UKM pada dasarnya mayoritas bergerak berdasarkan modal sendiri dan bukan pinjaman (CESS, 1999).

12. Teknik perubahan

Pembelajaran berbasis budaya yang dilakukan oleh pengrajin golok Galunggung dilakukan melalui diskusi dalam kelompok. Untuk mencapai kelompok dengan performa ideal sesungguhnya teramat sulit, sehingga yang paling representatif adalah kelompok kerja efektif. Kategori kelompok ini beranggotakan individu yang memiliki sejumlah karakter khas, berupa: (a) Tujuan dari kelompok dapat memotivasi anggotanya untuk mencapai prestasi kelompok dan individu; (b) Kerjasama kelompok sangat baik dan melihat pada kemampuan kelompok dan individu; (c) Setiap anggota kelompok bersungguh-sungguh dalam melakukan kerjasama; (d) Setiap anggota kelompok menggunakan keterampilan untuk bersosialisasi dan diharapkan mempergunakannya dalam rangka pencapaian tujuan; (e) Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan untuk menganalisa setiap proses kegiatan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kerja.

4.5. Pemberdayaan Masyarakat di Sentra Ikan Rancapanggung

1. Orientasi Tujuan

Wisata kuliner ikan Rancapanggung merupakan salah satu aset budaya yang harus dilestarikan. Demikian karena, daerah ini menyediakan tempat orang dapat mencari nutrisi yang bagus untuk kesehatan masyarakat, yaitu ikan; sekaligus membuat tempat ini sebagai wahana pemasaran para petani keramba ikan di Waduk Saguling. Maka, jadilah Rancapanggung ini merupakan pasar ikan. Pasar ikan ini tidak seperti pasar ikan biasanya, namun pasar ikan ini lebih menarik dengan adanya tempat makan juga disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Nyatalah bahwa kehadiran pasar ikan yang ada di Desa Rancapanggung sangat menarik perhatian banyak orang, dengan kondisi kios yang bersih, pemandangan yang indah juga disuguhkan menu makanan yang enak dan harganya pun terjangkau. Ini menimbulkan persepsi baik bagi banyak orang, terbukti dengan adanya pasar ikan di Desa Rancapanggung tidak pernah menimbulkan masalah bagi siapapun justru malah menarik banyak perhatian orang lain.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Jika dilihat dari segi wilayah, pasar ikan ini termasuk pada wilayah perbatasan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung. Namun, sebagian besar penjual dan pengembangnya berasal dari Desa Rancapanggung. Dengan demikian, pasar ikan Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Rancapanggung. Luas pasar ikan mencapai 1 hektar di sepanjang jembatan genangan waduk saguling. Terdapat 15 kios yang berjajar di sekitar jembatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Penjual Ikan Rancapanggung

No	Nama Pemilik Kios	Jumlah Pedagang dalam Satu Kios
1	Suryana	6 orang

2	Yayan	3 orang
3	Budi	3 orang
4	Tantang	4 orang
5	Saepul	5 orang
6	Asep	3 orang
7	Maman	5 orang
8	Fauzan	4 orang
9	Mardi	4 orang
10	Somad	4 orang
11	Samsul	3 orang
12	Yayat	5 orang
13	Jamal	4 orang
14	Yadi	5 orang
15	Eman	5 orang

Hasil survey lapangan 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 kios di pasar ikan Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat. Rata-rata dalam satu kios terdapat 5 orang yang membantu melayani pembeli yaitu kios Bapak Yadi (46 tahun), Bapak Saepul (47 Tahun), Bapak Maman (45 tahun), Bapak Yayat (50 tahun) dan Bapak Eman (49 tahun). Ada juga yang dalam satu kios terdiri dari 4 orang yang membantu melayani pembeli, yaitu kios Bapak Tatang (45 Tahun), Bapak Fauzan (43 tahun), Bapak Mardi (46 tahun), Bapak Somad (44 tahun) dan Bapak Jamal (44 tahun). Selain itu dalam satu kios berjumlah 3 orang, yaitu kiosnya Bapak Yayan (46 tahun), Bapak Budi (47 tahun), Bapak Samsul (48 tahun) dan Bapak Asep (46 tahun). Satu-satunya kios yang memiliki 6 orang pelayan yakni kios Bapak Suryana (55 tahun).

Pasar ikan di Desa Rancapanggung termasuk pada bagian selatan di Kabupaten Bandung Barat, pembangunan di kawasan selatan Kabupaten Bandung Barat bagian selatan belum optimal, berbeda

dengan kawasan utara Kabupaten Bandung Barat (lembang) yang banyak di kunjungi para wisatawan. Oleh karena itu, banyak potensi wisata kuliner khas hingga kerajinan khas Bandung Barat belum dikenal masyarakat luas. Infrastruktur yang buruk merupakan pemicunya. Tak heran apabila belum banyak wisatawan datang ke wilayah selatan Bandung Barat.

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

Kehadiran pasar dan wisata kuliner ikan di Rancapanggung dirasakan kepentingannya oleh masyarakat, bahkan oleh para pejabat desa. Menurut sekretaris Desa Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dani Tohar, 45 tahun, kehadiran pasar ikan yang ada diperbatasan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung telah mengangkat nama baik Desa Rancapanggung. Pasar ikan ini telah membuat sebagian warga Desa Rancapanggung menjadi memiliki mata pencaharian yang tetap. Desa Rancapanggung sangat mendukung dan ikut serta dalam pengembangan pasar ikan di desanya, terbukti dengan memberikannya pinjaman uang untuk para penjual ikan yang membutuhkan. Meski demikian, Desa Rancapanggung sendiri tidak meminta ataupun menuntut subsidi dari para penjual ikan untuk pemasukan ke desa. Pihak desa tidak pernah memberatkan dalam bentuk apapun kepada penjual ikan. Jika ada pedagang yang meminjam uang desa, pihak desa hanya meminta lebih 1,5% dari uang pinjaman. “Desa Rancapanggung ingin sekali mengembangkan potensi yang ada di desanya yakni pasar ikan, Desa Rancapanggung ini ingin membuat desanya sebagai desa wisata mini dengan adanya pasar ikan di sekeliling jembatan juga ditambah ke wilayah yang melewati waduk saguling.” Ungkap sekretaris desa saat diwawancarai (Cililin, 20 Juni 2014).

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Meski dari segi wilayah pasar ikan Rancapanggung termasuk pada perbatasan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung, namun Desa Mukapayung tidak pernah memperlakukan hal itu. Dengan memakai nama Rancapanggung sebagai nama pasar ikan di sekitar jembatan, Desa Mukapayung tidak merasa keberatan atau bahkan dirugikan. Pasar ikan yang terletak di perbatasan antara dua desa ini telah dikembangkan oleh orang-orang yang berasal dari Desa Rancapanggung, bahkan Desa Rancapanggung sendiri ikut andil dalam pengembangan pasar ikan. Oleh karena itu, wajar jika nama Rancapanggung yang dikenal atau yang dijadikan nama pasar ikan yang terletak di penghubung dua desa.

“Sebelumnya pasar ikan Rancapanggung belum ramai seperti sekarang, namun dengan didirikannya saung-saung kecil dan diperbanyaknya kios-kios yang berjualan ikan membuat para wisatawan atau masyarakat memilih untuk beristirahat atau sengaja datang ke pasar ikan Rancapanggung untuk menikmati berbagai suguhan ikan yang disediakan,” tutur kepala Desa Mukapayung saat diwawancarai (Cililin, 20 Juni 2014).

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Tokoh-tokoh informal di Rancapanggung memiliki pengaruh besar dalam melestarikan budidaya ikan. Secara tidak langsung, tokoh lokal tersebut ditempatkan sebagai kolaborator perubahan yang menjadi rujukan dan inspirasi bagi masyarakat akar rumput di Rancapanggung. Peran sebagai kolaborator dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan potensi sosial-ekonomi warga yang berlangsung sejak tahun 1980-an.

Mereka melakukan itu dengan transmisi kebudayaan, yaitu menanamkan nilai sosial-ekonomi kepada generasi-generasi berikutnya yang secara tidak langsung diajak terlibat mengelola budidaya ikan tersebut. Peran kolaborator tersebut paling tidak berlangsung dalam ranah yang paling mikro di keluarga masing-masing. Peta perubahan sosial di Rancapanggung berlangsung secara simultan, artinya meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman eksternal, budidaya ikan yang ada di Rancapanggung dapat bertahan.

Dari segi teoretis, kelompok rujukan (*reference group*) merupakan satu kelompok atau kategori yang memberi garis panduan kepada individu dalam mewarnai kepercayaan, sikap, nilai dan perilakunya. Konsep ini mula-mula diperkenalkan oleh Herbert H. Hyman dan kemudian diperluas oleh segolongan ahli psikologi sosial dan sosiologi seperti M. Sharif, T.M. Newcomb dan R.K. Merton.

Kelompok rujukan yang berbentuk kelompok yang darinya seorang individu mengambil standard dan membentuk sikapnya. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok rujukan normatif. Kelompok rujukan bisa juga bercorak kelompok yang situasi dan sifat-sifatnya digunakan oleh individu untuk membandingkan kedudukannya sendiri. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok rujukan bandingan.

Kelompok rujukan biasanya dibedakan dari kelompok keanggotaan (*membership group*), karena kelompok yang pertama itu merupakan kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang, sementara kelompok yang kedua merupakan kelompok yang dianggotai oleh orang tersebut. Namun, kedua jenis kelompok itu seingkali koinsiden, yaitu kelompok keanggotaan seorang itu juga merupakan kelompok rujukannya.

Sesungguhnya bagi seorang individu, satu kelompok yang sama bisa bergerak sebagai kelompok keanggotaan, kelompok rujukan normatif dan kelompok rujukan bandingan pada saat yang sama. Sebagai contoh, seorang individu dari kelas menengah dianggap oleh orang lain sebagaimana ia menganggap dirinya sebagai anggota kelas menengah. Ia mempelajari serta mengambil nilai dan normanya dari kelas itu, serta membandingkan pencapaian dan perilakunya dengan anggota-anggota kelas menengah.

Ada juga kemungkinan bagi anggota kelompok A mengambil standardnya dari anggota kelompok B serta membandingkan dirinya dengan mereka. Misalnya seorang anggota kelas menengah, meniru standardnya serta membandingkan dirinya dengan anggota kelas menengah itu.

Dalam masyarakat perindustrian modern yang mengutamakan mobilitas ke atas melalui pencapaian prestasi, seringkali terdapat individu-individu dari kelompok tertentu bercita-cita untuk menjadi anggota kelompok lain. Kedudukan individu tersebut dikenal sebagai kedudukan pinggiran (*marginal*). Dalam masyarakat terbuka yang mempunyai kemungkinan besar terjadinya mobilitas, masalah kepinggiran (*marginality*) dapat diselesaikan melalui penerimaan oleh kelompok-kelompok yang dicita-citakannya itu.

Pejabat daerah setempat memberikan persepsi yang positif terhadap kehadiran pasar ikan Rancapanggung. Persepsi positif itu muncul dari beberapa faktor, yaitu mengangkat nama baik desa, membayar pinjaman tepat waktu, memajukan perekonomian warga dan yang lainnya. Selain itu, pejabat daerah setempat begitu mendukung pasar ikan ini, terbukti dengan memberikan pinjaman untuk penjual ikan yang membutuhkan. Pihak Desa Rancapanggung tidak pernah memberatkan para peminjam uang dalam proses pengembaliannya, hanya meminta lebih 1,5% dari hasil pinjamannya. Baik pihak desa maupun pihak peminjam uang tidak merasa dirugikan, pihak desa dan peminjam uang sepakat dengan bunga pinjaman yang ditentukan Desa Rancapanggung. Dukungan dari pihak desa tidak lain adalah karena

manfaat yang diberikan oleh kehadiran pasar ikan Rancapanggung, diantaranya mengurangi tingkat pengangguran, banyak orang yang berkunjung dan mengenal Desa rancapanggung dan sebagainya.

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Budidaya ikan yang berlangsung secara berkelanjutan di Rancapanggung pada dasarnya bertahan juga karena adanya kekuatan kearifan lokal yang berlangsung secara massif. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekhasan budaya-budaya lokal tertentu yang harus diakui keberadaannya, dan berbeda dengan kekhasan budaya lokal tertentu lainnya. Dalam praktiknya, dalam situasi inilah kearifan lokal kadang-kadang berbenturan dengan kearifan sosial. Benturan terjadi ketika klaim kearifan lokal dianggap lebih berdaulat dibanding perbedaan-perbedaan dan perbauran yang terjadi di tingkat sosial. Jika pengakuan terhadap kearifan lokal didahulukan (dimenangkan), maka sangat mungkin kearifan lokal terkesan tidak adaptif terhadap konteks-konteks hubungan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karenanya, seperti diketahui, dalam pengertian awalnya memang kearifan lokal tidak dimaksudkan sebagai satu perangkat pengetahuan untuk mengelola relasi sosial.

Proses interaksi antara penjual dan pembeli juga mempengaruhi persepsi seseorang, dari proses interaksi itu maka akan terjalin suasana yang baik. Selanjutnya pembeli bisa menawar harga yang diberikan oleh penjual, dari proses tawar-menawar ini seseorang akan menimbulkan persepsinya. Baik persepsi positif maupun persepsi negatif, tergantung dari interaksi yang terjalin. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Rina (46 tahun), ibunda Intan selaku pelanggan di pasar ikan Rancapanggung, sebagai berikut:

“Interaksi dan komunikasi sangat penting, interaksi dan komunikasi antara penjual dengan pembeli di pasar ikan Rancapanggung yang terjalin cukup baik. Seorang pedagang memang tidak boleh sombong atau bahkan marah ketika si pembeli menawar harga yang dikeluarkan penjual, agar para pembeli semakin banyak berdatangan. Tak lupa senyuman pun selalu diberikan oleh setiap pelayannya. Ini yang membuat saya nyaman menikmati olahan ikan yang ada disini.” (7 Juli 2014)”

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Konsepsi mengenai klien nampaknya sangat positif diberikan oleh para pengelola pasar ikan Rancapanggung. Pasar ikan ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu tempatnya yang unik, bersih, dan tidak bau. Pada kenyataannya kebersihan juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, seperti yang dikatakan oleh Bimo (2004: 87) bahwa proses terjadinya persepsi didahului oleh penginderaan. Jika kebersihan pasar ikan Rancapanggung tidak terjaga maka masyarakat pun akan memberikan kesan atau persepsi yang kurang baik.

Agar persepsi baik muncul dari setiap individu maka harus ada hal positif yang di munculkan dari individu tersebut yang membuat individu lain tertarik, seperti yang dikatakan oleh Chaplin yang dikutip oleh Mursidin (2010: 189) bahwa dalam persepsi terdapat suatu proses ketertarikan. Tidak mungkin masyarakat akan tertarik pada kios ataupun tempat makan yang kotor, dengan berserakannya sampah di sekeliling pasar ikan maka pembelipun enggan untuk membeli ikan di sana. Proses seperti ini dinamakan dengan interaksi simbolik, yaitu interaksi dengan menggunakan simbol.

Kutipan di atas menegaskan bahwa faktor kebersihan dapat mempengaruhi persepsi positif seseorang terhadap sesuatu. Dan disebabkan oleh faktor kebersihan pasar yang terjaga dengan baik, maka terbangun persepsi positif masyarakat terhadap kehadiran pasar. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Intan, 24 tahun, yang menuturkan, “kebersihan di pasar ikan ini cukup diperhatikan, saya betah menikmati berbagai olahan ikan disini. Kebersihan seperti ini mencerminkan bahwa pasar ikan ini cukup memperhatikan keinginan pembeli untuk menikmati berbagai olahan ikan.” (7 Juli 2014).

Demikianlah, maka dalam satu hari rata-rata pengunjung yang datang ke satu kios ikan mencapai 15-20 keluarga, tentunya dari berbagai daerah. Ketika hari libur tiba, jumlah pengunjung yang membeli atau makan di tempat mencapai 25-27 keluarga. Di hari libur juga jumlah jam buka pasar ikan kadang-kadang ditambah sampai jam 12 malam, karena jumlah pengunjung yang terus berdatangan membuat si penjual tidak bisa menutup kiosnya begitu saja. Stok ikan yang dimiliki juga ketika hari libur selalu di tambah dua sampai tiga kali empat kali lipat dari hari biasa.

Pendapatan dari proses jual beli ikan di pasar ikan Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat rata-rata mencapai Rp. 600.000 sampai Rp. 750.000 per harinya. Namun ketika hari-hari libur pendapatan para penjual ikan mencapai dua bahkan empat kali lipat dari pendapatan biasanya.

8. Peranan masyarakat

Sebagian masyarakat Desa Rancapanggung bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang ikan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari potensi alam dan kondisi geografis yang berada di Desa Rancapanggung. Jika kita mengunjungi Desa Rancapanggung, kita akan menyaksikan bagaimana hampir seluruh keluarga menjadikan ikan sebagai aktifitas kesehariannya. Bagi masyarakat Rancapanggung, usaha budidaya ikan sudah dilakukan secara turun temurun. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi iklim yang cocok. Masyarakat di luar Bandung bahkan sudah sangat mengenal Desa Rancapanggung sebagai sentra penjualan ikan.

Para pelanggan memberikan persepsi yang positif terhadap kehadiran pasar ikan Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat. Persepsi positif itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dilapangan, seperti kebersihan pasar, keramahan terhadap pelayanan, suasana hati pelanggan dan yang lainnya. Selain itu para pelanggan juga cukup apresiatif dengan kehadiran pasar ikan ini. Tidak hanya olahan ikannya yang bagus, namun pemandangan indah sekitar pasar juga yang menjadi salah satu alasan atas persepsi positif pelanggan.

9. Peranan pekerja sosial

Pada dasarnya seluruh warga di Desa Rancapanggung merupakan aktor social dalam usaha pengembangan pasar ikan dan wisata kuliner tersebut. Aktor sosial di sini juga dapat ditempatkan sebagai pekerja sosial yang menjadi katalisator perubahan sosial. Dalam konteks lain, sebagaimana dijelaskan di atas, peranan tokoh lokal seperti ulama maupun tokoh desa menjadi pembimbing. Mereka seringkali diminta nasihat dan masukan bagi pengembangan budidaya ikan tersebut. Dengan kata lain, tokoh-tokoh lokal tersebut pada dasarnya ditempatkan sebagai *reference group*.

Persepsi warga setempat terhadap kehadiran pasar ikan Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat dapat disimpulkan sebagai usaha yang positif. Persepsi positif itu dipengaruhi oleh fakto-faktor di lapangan

seperti, letak pasar yang jauh dari pemukiman warga membuat warga setempat tidak merasakan hal negatif (kebisingan), oleh karena itu kehadiran pasar ikan ini tidak mengganggu aktivitas warga setempat. Selain itu warga setempat pun ikut apresiatif dengan kehadiran pasar ikan ini, terbukti dengan adanya warga setempat yang beberapa kali membeli ikan segar atau bahkan menikmati olahan ikan di pasar Rancapanggung ini.

10. Media perubahan

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga sedang giat melaksanakan program-program pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung SD, polindes, pengaspalan jalan, jembatan, dan masjid. Sementara untuk pembangunan non-fisik berupa pembentukan media bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.

Untuk menambah pengetahuan masyarakat dan mensosialisasikan program-program atau kebijakan-kebijakan baru, diadakan penyuluhan (di tingkat RW dengan pembicara dari pihak desa) meskipun frekuensi pertemuannya sangat sedikit. Penyuluhan merupakan bentuk pendidikan informal untuk mendidik masyarakat agar menjadi tahu dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan dengan percontohan. Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran petani ikan dengan program modernisasi pertanian sehingga tercipta perubahan sikap mental dan cara bekerja melalui kombinasi belajar sambil berbuat sehingga masyarakat terangsang untuk meniru dan peningkatan ketrampilan dapat terbina karena disertai contoh-contoh nyata.

Kredibilitas komunikator (kadar keterpercayaan pernyataan-pernyataan pengirim di telinga komunikan) menjadi aspek yang menentukan untuk terciptanya komunikasi yang efektif, sehingga harus ada kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan latar belakang komunikator, misalnya dapat dipercaya, mempunyai motivasi yang baik, bersahabat, kesesuaian antar keahlian dengan materi, dan dinamis (Johnson, 1994). Selain aspek kredibilitas, perlu pula diusahakan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami serta mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri penerima (Supratiknya, 1995).

Ketika berbicara mengenai program pembangunan, maka yang perlu dibahas tidak hanya program apa yang telah dan akan dilaksanakan sebagai manifestasi dari program pembangunan tersebut, akan tetapi harus ditilik lebih jauh mengenai asal ide pembangunan, identifikasi masalah, perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta sumber dananya.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa peran serta warga dalam proses pembangunan di Rancapanggung berupa pemunculan ide-ide pembangunan yang perlu dilaksanakan di desa tersebut. Hal itu menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kepekaan dari masyarakat mengenai lingkungannya. Partisipasi mempunyai prinsip utama kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Sehingga partisipasi berfokus lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagi pengetahuan atau kemampuan (Nasution, 1988).

Begitulah yang terjadi di sentra wisata kuliner ikan di Rancapanggung. Meski letaknya diatas jembatan yang menghubungkan antara Desa Mukapayung dengan Desa Rancapanggung, namun tidak mengurungkan niat warga untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan. Warga pun tidak menjadi berebut dan bertengkar mengenai lahan perdagangan. Justru persepsi mengenai kehadiran pasar ikan di

Desa Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat sangatlah positif. Menurut Dudi, 35 tahun, tidak ada persepsi miring terhadap kehadiran pasar ikan Rancapanggung ini, inilah kreativitas warga dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Dengan demikian, masyarakat Desa Rancapanggung ini bersifat kreatif. Bahkan Dudi berharap pasar ikan di Desa Rancapanggung ini diperbesar agar pengunjung yang datang tidak mengantri, namun tempatnya yang kecil menjadi sulit untuk memperluas pasar ikan ini. Dengan penuh harapan ia pun menuturkan:

“Kehadiran pasar ikan di sekitar jembatan itu memang cukup bagus, saya tidak pernah merasa terganggu atau keberatan meski nama Rancapanggung yang terkenal namun saya setuju-setuju saja lah dipermasalahkan pun tidak ada gunanya. Semua warga baik Mukapayung atau Rancapanggung tahu kalau yang mengembangkan pasar ikan itu orang-orang yang berasal dari Desa Rancapanggung. saya mah berharap pasar ikan itu bisa diperluas agar yang beli tidak mengantri, apalagi di musim liburan.”(4 Juli 2014).

Kehadiran pasar ikan di Desa Rancapanggung Kabupaten Bandung Barat ini cukup bagus di mata masyarakat. Sebab, dengan adanya pasar ikan ini Desa Rancapanggung menjadi cukup terkenal. Terbukti dengan beberapa kali wartawan mendatangi Desa Rancapanggung dan beberapa kali desa ini dimuat di media cetak. Ade, 47 tahun, bangga dengan Desa Rancapanggung yang menarik perhatian banyak orang, tentunya karena adanya pasar ikan yang ada di desa ini. Meski jauh dari pemukiman warga namun Ade cukup mengetahui perkembangan dari pasar ikan ini, banyak pembeli yang berasal dari luar daerah yang sengaja datang ke pasar ikan di Desa Rancapanggung hanya untuk menikmati berbagai menu ikan yang ada. Apalagi di musim libur seperti sekarang, terlihat banyak mobil yang parkir dari luar daerah. Sesekali Ade pun mengunjungi pasar ikan Desa Rancapanggung ini, namun Ade hanya membeli mentahnya saja karena ingin menikmati ikan bersama keluarganya di rumah. Lantas ia menuturkan:

“*Ayana* pasar ikan di Rancapanggung *teh* membuat Desa Rancapanggung jadi terkenal, jadi banyak yang tahu k desa ini. Kan banyak juga yang datang dari luar kota, misalnya dari bogor, garut, dan lain-lain. Biasanya kalau yang dari jauh mah awalnya diajak dulu sama saudaranya yang ada di daerah sini. *Tungtungna mah ngalanggan weh*. Saya mah *atoh we* desa saya jadi banyak yang tahu, saya sendiri pernah beberapa kali baca di koran, di internet tentang pasar ikan Rancapanggung *teh*. Malah pernah aya wartawan nu bolak-balik ka pedagang ikan buat wawancara, katanya buat dimuat dikorannya.”(Cililin, 1 Juli 2014).

11. Strategi perubahan

Masyarakat Rancapanggung seringkali dihadapkan pada kunjungan dari luar, berupa wisatawan. Oleh karena itu, dalam rangka strategi menghidupkan pasar ikan dan wisata kuliner di sini, masyarakat Rancapanggung mempunyai resep tersendiri yang cukup jitu, yaitu pelayanan dan kontrol kualitas layanan. Demikian itu karena letak pasar ikan yang strategis. Menurut Soliah, 45 tahun, olahan ikan yang terdapat di pasar ikan yang ada di Desa Rancapanggung ini berbeda dengan olahan ikan di tempat lain. Selain itu, pasar ikan ini berada di wilayah yang strategis, yakni pas dengan tempat lewatnya orang-orang yang hendak ke kota Bandung atau ke kota lainnya karena tidak ada jalan alternatif lain selain melewati pasar ikan tersebut. *Liliwateun* kalau dalam bahasa Sunda. Kemudian ia mengemukakan pandangannya:

“Menurut saya letak pasar ikan ini cukup strategis meski berada disekitar jembatan waduk saguling, semua orang yang ingin ke daerah selatan pasti akan melewati pasar ikan ini. *Jembatan ieu mah liliwateun pisan*. Ketika lapar, cape ataupun lelah bisa istirahat dipasar ikan ini sambil menikmati olahan ikan yang tersedia. Saya sendiri atau kadang-kadang dengan keluarga sering membeli ikan disini, baik dimakan ditempat maupun dibawa ikan segarnya ke rumah.” (Sabtu, 7 Juli 2014).

12. Teknik perubahan

Potensi pasar ikan dan wisata kuliner di Rancapanggung ini sesungguhnya menjadi kekuatan ekonomi lokal yang menopang sistem sosial-ekonomi di masyarakat wilayah Bandung Barat. Jika merujuk kepada konsepsi pengembangan masyarakat, potensi ekonomi sebagaimana tercermin di masyarakat desa Rancapanggung merupakan katalisator perubahan sosial yang mampu membangkitkan kewirausahaan sosial. Potensi budidaya ikan Rancapanggung bukan sekadar melahirkan pengusaha-pengusaha lokal yang tumbuh dan berkembang dari tradisi dan potensi lokal maupun menghasilkan perputaran uang/ekonomi, tetapi juga lebih dari itu potensi tersebut mampu memperkuat modal sosial maupun jejaring sosial dan tradisi kepeloporan di masyarakat Rancapanggung. Fenomena ini sering disebut dengan munculnya inisiasi lokal yang berkembang di masyarakat lokal. Sejauh ini pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Rancapanggung yang bermatapencaharian budidaya ikan dilakukan dengan mengadakan penyuluhan pertanian bekerjasama dengan Kementerian Perikanan. Penyuluhan dilakukan biasanya minimal 1 tahun sekali. Di Rancapanggung, usaha budidaya ikan yang berlangsung secara turun temurun seolah sudah menjadi konsensus bagi warganya. Berbagai bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan Kementerian/Dinas Pertanian merupakan hal yang penting dalam pengembangan tersebut.

4.6. Pengembangan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

1. Orientasi tujuan

Keberadaan TN Gunung Halimun-Salak sangat penting dalam mengatur ketersediaan air tanah dan mengatur kestabilan cuaca di sekitar Taman Nasional. Selain itu, Taman nasional Gunung Halimun-Salak berperan penting menjaga ekosistem makhluk hidup, baik flora maupun fauna endemik yang masih tersisa. Dengan adanya ekowisata ke TNGHS ini, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keberlangsungan menjaga ekosistem bukan malah menjadi ajang eksploitasi alam berkedok ekowisata.

2. Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah

Secara administratif, Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau lebih enak disingkat TNGHS, termasuk ke dalam tiga wilayah kabupaten dan dua provinsi, yaitu Kab. Bogor, Kab. Sukabumi – Provinsi Jawa Barat dan Kab. Lebak, Provinsi Banten. Alam TNGHS sangat memanjakan mata para pengunjungnya. Pepohonan yang tinggi menjulang dan perkebunan teh yang terhampar luas menjadi pemandangan yang umum dijumpai di TNGHS. Kicauan burung berbagai jenis dan macam-macam warnanya saling bersahutan menyempurnakan pemandangan di TNGHS. Sungguh menyajikan pemandangan yang eksotis, dimana semua elemen dalam hutan TNGHS dapat dilihat secara dekat dan hidup beriringan satu sama lain. Banyak hal yang dapat dinikmati ketika mengunjungi TNGHS. Beberapa di antaranya adalah akses jalannya cukup

menantang apalagi bila dilakukan dengan bersepeda, berinteraksi langsung dengan masyarakat di desa citalahab, melihat beberapa air terjun, trekking di hutan dan pesona hamparan hijau perkebunan teh Nirmala. Dan yang paling terkenal di tempat ini adalah *Glowing Mushrooms* atau jamur yang menyala pada waktu malam hari.

Tetapi beberapa puncak gunung dan hutan yang relatif masih lebat telah menarik didaki dan dikunjungi oleh berbagai kelompok pecinta alam, dengan memenuhi syarat pendakian : seperti membuat ijin pendakian, mempelajari peta jalur pendakian, pendakian didampingi petugas atau orang yang sudah mengetahui jalur pendakian, mempersiapkan diri secara fisik dan perbekalan makanan yang cukup. Beberapa puncak gunung yang menarik didaki : Gunung Halimun Utara (1.929 m dpl.) Gunung Botol (1.720 m dpl.) Gunung Sanggabuana (1.919 m dpl.) Gunung Kendeng Selatan (1.680 m dpl.) Gunung Halimun Selatan (1758 m dpl.) Gunung Puncak Salak 1 (2211 m dpl.) Gunung Puncak Salak 2 (2190 m dpl.) Hutan – Perkebunan Teh di TNGHS Di antara puncak-puncak yang umum dan menarik didaki di TNGHS adalah Puncak Gunung Salak 1 karena paling tinggi. Adapun jalur pendakian ke puncak Gunung Salak sudah diketahui dan dirintis oleh para pendaki gunung melalui beberapa jalur masuk. Saat ini untuk mendaki Puncak Gunung Salak 1, harus dapat memenuhi persyaratan pendakian gunung dan mengurus ijin pendakian di Kantor BTNGHS di Kabandungan, Sukabumi. Adapun jalur pendakian yang relatif aman dan umum digunakan adalah melalui jalur Javana Spa/Cangkuang, Cidahu –Simpang Kawah Ratu–Puncak Salak. Atau Pasir Reungit, Gunung Bunder–Kawah Ratu–Simpang Kawah/ Puncak Salak 1 – Puncak Salak 1 Bumi Perkemahan. Salah satu kegiatan yang dapat dikembangkan di TNGHS adalah berkemah di bumi perkemahan yang sudah tersedia sumber air dan kamar mandi. Lokasinya antara lain di Cangkuang, Sukamantri dan Gunung Bunder.

Di TNGHS terdapat Jembatan Tajuk (Canopy Trail: Jembatan di Atas Pohon) Jembatan gantung yang menghubungkan antara pepohonan sepanjang 100 m, lebar 0,6 m dengan ketinggian 20–25 m dari atas tanah dilengkapi dengan tangga naik. Jembatan ini terletak sekitar 200 m dari Stasiun Penelitian Cikaniki. Digunakan sebagai pendukung kegiatan penelitian.

Di TNGHS terdapat beberapa sumber air panas yang masih alami seperti di Cisukarame dan di Gunung Menir, maupun yang sudah dibuka sebagai tempat rekreasi, seperti di Gunung Salak Endah, Cisolok dan Cipanas.

Perkebunan di sekitar TNGHS termasuk pemandangan alam yang menarik dan banyak dijumpai dalam perjalanan menuju kawasan TNGHS. Umumnya di wilayah kabupaten Sukabumi dan Bogor terdapat beberapa perkebunan teh yaitu perkebunan teh Jayanegara, Cianten, Pasir Madang dan Parakansalak. Bahkan jauh sebelum TNGHS ditetapkan, di tengah taman nasional juga terdapat *enclave* perkebunan teh Nirmala yang luasnya sekitar 997 ha. Selain perkebunan teh saat ini disekitar TNGHS juga terdapat perkebunan kelapa sawit, seperti di Kelapa Nunggal, Cikidang, Cisolok dan juga sepanjang jalan dari Cigudeg di kabupaten Bogor menuju kota Rongkasbitung, kabupaten Lebak.

Perjalanan dari Sukabumi atau Cibadak menuju Pelabuhanratu dan terus ke Bayah selain menyusuri bagian tenggara atau selatan TNGHS juga akan melintasi jalur wisata arung jeram (sungai Citarik dan sungai Cicatih) serta pantai selatan yang indah seperti pantai Karang Hawu, Karang Taraje dan Sawarna.

Selain situs Candi Cibedug dan Gunung Batu di TNGHS juga terdapat beberapa kuburan keramat dan situs-situs lainnya yang belum terungkap, bahkan ada yang berbentuk “batu berundak” seperti peninggalan masa-masa kerajaan dahulu. Walaupun terdapat di lokasi yang cukup sulit, sering orang berkunjung untuk berziarah seperti ke kuburan keramat di puncak Gunung Salak 1 dan ke lereng puncak

Halimun Selatan. Beberapa lokasi situs lainnya seperti situs Genterbumi di kampung Pangguyangan, situs Ciawitali di Gunung Bodas dan situs Ciarca di kecamatan Cikakak, situs Girijaya di kecamatan Cidahu, Sukabumi, situs Cibalay di kecamatan Tenjolaya, situs Batu Kipas, Lewijamang di kecamatan Sukajaya, Bogor dan situs Gunung Bedil di kecamatan Cibeber, Lebak.

Masyarakat lokal yang ada umumnya adalah suku Sunda, yang terbagi ke dalam kelompok masyarakat kasepuhan dan bukan kasepuhan. Untuk masyarakat kasepuhan, secara historis penyebarannya terpusat di Kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Cisitu. Masyarakat kasepuhan masih memiliki susunan organisasi secara adat yang terpisah dari struktur organisasi pemerintahan formal (desa).

Berdasarkan wilayah hidupnya, masyarakat Kasepuhan Banten Kidul tersebar di Banten, Sukabumi dan Bogor. Di daerah Banten Selatan (Banten Kidul) warga Kasepuhan (incu putu) bermukim di sekitar Kecamatan Bayah yang antara lain terkonsentrasi di kampung Tegal Lumbu, Cicarucub, Cisungsang, Cicemet, Sirnagalih dan banyak lagi perkampungan tersebar di sekitar Desa Mekarsari, Sirnagalih, Sukamulya, Neglasari, Hergamanah, Warung Banten, Cihambali, Cikuda dan Citorek. Di Kecamatan Jasinga antara lain tersebar di sekitar kampung Gajrug, Sajira, Guradog dan berbagai kampung lain di sekitar wilayah tersebut. Di daerah Bogor Selatan, mereka bermukim di sekitar Kecamatan Cigudeg tepatnya di kampung Urug, Pabuaran dan Cipatat Kolot di wilayah Desa Kiara Pandak. Di daerah Sukabumi Selatan mereka tersebar di sekitar wilayah pedalaman Kecamatan Ciselok dan sepanjang sungai Cibareno Girang (Adimihardja, 1992). Selebihnya adalah daerah-daerah yang ditempati oleh urang sunda asli bukan Kasepuhan dan Baduy (masyarakat lokal).

3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat

Dilihat dari bentuk kawasannya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak berbentuk seperti bintang atau jemari, sehingga batas yang mengelilingi kawasan taman nasional ini menjadi lebih panjang. Pengelolaan kawasan seperti ini lebih sulit dibandingkan dengan pengelolaan kawasan yang berbentuk relatif bulat. Apalagi di dalamnya terdapat beberapa enklave berupa perkebunan, permukiman masyarakat tradisional serta beberapa aktivitas pertambangan emas, pembangkit energi listrik panas bumi dan pariwisata. Termasuk pula permukiman-permukiman masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul.

4. Konsepsi mengenai kepentingan umum

Banyak para petani tradisional maupun pendatang sudah tinggal di wilayah ini sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai areal konservasi. Sehingga menjadi tantangan pengelola, para pihak dan masyarakat lokal dalam mengembangkan model pengelolaan kawasan TNGHS yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Dengan mengacu pada derajat saling mempengaruhi antara masyarakat dan pemerintah, maka apa yang terjadi di TNGHS bisa dikategorikan berada pada tahap *engaging* (keikutsertaan). Dalam konteks ini, maka yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat adalah melakukan dialog dan konsensus dalam pengembangan hutan. Inisiatif yang datang dari

pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat yang lain perlu dipertemukan untuk kemudian dicari kata yang sama dalam pengembangan hutan.

6. Sistem klien atau sistem perubahan

Seluruh warga masyarakat dalam model ini terlibat sebagai aktor penting dalam perubahan sosial. Mereka memiliki peran yang tidak dapat dianggap kecil. Keberadaan masyarakat adat hingga hari ini bertahan karena berbagai kelompok sosial dan masyarakat umum yang masih memiliki kepedulian akan bertahannya warisan alam di TNGHS. Keberadaan masyarakat adat gunung dalam ruang lingkup Jawa Barat memang sangat unik dan langka.

7. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan

Seluruh wisatawan yang mengunjungi TNGHS merupakan konsumen yang menikmati wisata alam-budaya. Sebagai konsumen mereka disuguhkan keindahan natural-sosial terkait TNGHS dan masyarakat pendukungnya. Generasi muda khususnya para pendaki gunung merupakan konsumen penting yang memiliki peran penting dalam transmisi ekologis dari tempat ini. Mereka menjadikan TNGHS sebagai wahana pembelajaran alam-sosial. Hal yang lebih penting adalah TNGHS sebagai wahana untuk melakukan alih generasi kekayaan alam dan budaya yang terus dilakukan kepada generasi muda. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Sekitar 15-20 tahun mendatang, generasi muda tersebut kelak akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa yang mesti bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan alam yang mereka pimpin.

8. Peranan masyarakat

Masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul yang tinggal di sekitar TNGHS sampai saat ini masih mempunyai karakteristik budaya yang khas. Dimana setiap tahun setelah panen padi mereka mengadakan kegiatan adat yang disebut seren taun sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan dalam pertanian khususnya padi yang merupakan makanan pokok masyarakat. Kegiatan seren taun selain untuk warga kasepuhan juga dapat disaksikan oleh masyarakat umum lainnya termasuk untuk kunjungan wisata budaya karena banyak kegiatan menarik yang dapat dilihat. Jadwal pelaksanaannya antara bulan Juni-Desember setiap tahun, tergantung perhitungan waktu masing-masing kelompok kasepuhan. Beberapa seren taun yang menarik untuk dikunjungi dan dilihat adalah seren taun di kasepuhan Ciptagelar, Sirnaresmi, Ciptamulya, Cicarucub, Cisitu, Cisungsang, Citorek dan Urug.

Masyarakat setempat masih memegang teguh memegang adat istiadat yang diwariskan leluhur mereka dan diyakini bahwa arwah leluhur sebagai penghuni alam gaib yang mengendalikan kehidupan. Hal ini terlihat dari tata cara mereka memohon restu kepada leluhur sebelum penanaman padi dilaksanakan agar diberikan hasil panen yang melimpah atau dijauhkan dari hama penyakit.

Pelepasan *nadar* (permohonan sesuatu) yang berhubungan dengan nasib dan keberuntungan dilakukan oleh masyarakat melalui suatu upacara kecil (selamatan) yang dilaksanakan didalam salah satu halaman kompleks bangunan Situs pada bagian susunan kelompok menhir yang diberi pagar dan atap.

9. Peranan pekerja sosial

Kelangsungan keberadaan TNGHS tidak semata-mata ditentukan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya, tetapi juga dapat dilibatkan pihak eksternal lainnya seperti peneliti, analis maupun fasilitator lapangan. Mereka dapat dilibatkan secara independen maupun secara resmi oleh pihak pemerintah. Pihak eksternal ini dapat memberikan berbagai masukan penting untuk program-program yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat penyangga TNGHS. Peneliti dari universitas dapat dilibatkan untuk berbagai penelitian yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi keberlangsungan program-program budaya-ekologis tersebut.

Fasilitator lapangan juga dapat dilibatkan dengan berbagai ide maupun program yang menarik, inspiratif dan mencerdaskan masyarakat sebagai konsumen. Mahasiswa tingkat akhir yang memiliki *concern* dan komitmen dengan pengembangan budaya dapat dilibatkan dalam program pengembangan budaya dan kelestarian alam. Dengan cara ini, keterlibatan mereka sebagai pekerja sosial dapat menjadikan TNGHS semakin menarik.

Berdasarkan fungsi yang harus dijalankan dari tali piranti karuhun, sebaran Masyarakat Kasepuhan tersebut, Kasepuhan Sinaresmi, Ciptagelar, Cisungsang, Cisitu, Cicarucup, Citorek dan Bayah merupakan kelompok Kasepuhan utama. Salah satu indikasi yang menunjukkan tentang "keutamaan" kelompok Kasepuhan tersebut adalah banyaknya perwalian. Sebagai contoh Kasepuhan Ciptagelar – dulu dikenal sebagai Kasepuhan Ciptarasa – membawahi 560 perwalian Kasepuhan dari tiap-tiap desa di tiga kabupaten (Lebak, Sukabumi dan Bogor). Selain dari Bogor, Sukabumi dan Lebak, pengikut kasepuhan juga berasal dari beberapa daerah lain. Banyak tidaknya pengikut dalam suatu kelompok Kasepuhan sangat mungkin juga dipengaruhi oleh kebiasaan berpindahnya kampung gede Kasepuhan (sebagai pusat orientasi sosio-kultural dan politik Masyarakat Kasepuhan) tersebut.

10. Media perubahan

Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat lokal adalah bahasa Sunda dan mayoritas penduduknya beragama Islam walau masih terdapat yang menganut kepercayaan lama. Masyarakat kasepuhan di TNGHS merupakan bagian dari warisan budaya nasional. Mereka masih memegang teguh adat kebudayaan nenek moyangnya terlihat dalam keseragaman kehidupan sehari-hari, arsitektur rumah, sistem pertanian dan interaksi dengan hutan.

11. Strategi perubahan

Perubahan yang berlangsung di TNGHS dilakukan dengan cara penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ahli sangat penting untuk semakin mendinamiskan peran sosial TNGHS. Peran sosio-edukasi yang berlangsung di TNGHS selama ini berlangsung cukup efektif dalam membangun kesadaran akan pentingnya budaya berbasis alam tersebut. Meski demikian, minimnya Dana pengembangan kawasan hutan, berpengaruh pula pada hasil perubahan yang diharapkan.

Demi kepentingan *survival*, saat ini, masyarakat setempat memanfaatkan hutan dan lahan sekitarnya dalam berbagai cara, yaitu seperti huma/ladang (*swidden cultivation*), sawah (*rice growing*), kebun (*garden*), kebuntalun (*mixed garden*) dan talon (*mixed forest*). Masyarakat memiliki kearifan

tradisional yang sifatnya tutun temurun dalam pemanfaatan dan konservasi hutan, melalui pembagian wilayah berhutan berdasarkan intensitas pemanfaatan dan tingkat perlindungannya yaitu adanya 'leuweung titipan' (*protected forest*), 'leuweung tutupan' (*conservation forest*), atau 'leuweung sampalan' (*opened forest*). Mereka masih memiliki interaksi yang kuat dengan hutan sekitarnya. Masyarakat juga memiliki pengetahuan etnobotani dan menggunakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan pengetahuan tersebut, serta mempertahankan pola pertanian yang mampu melestarikan sumberdaya genetik padi (*Oryza sativa*) lokal. Pada saat ini sebagian anggota Masyarakat Kasepuhan mulai meninggalkan kearifan tradisional yang mereka miliki akibat dinamika proses sosial yang terjadi.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan Kementerian Kehutanan akhir-akhir ini tampaknya mulai dapat memberikan angin segar bagi sistem pelestarian hutan di masa yang akan datang. Asumsi ini diharapkan dapat terealisasi jika paradigma tersebut dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan berkelanjutan. Paradigma kementerian dari semula bersifat sentralistik dan hanya memperhatikan aspek ekonomi telah diubah dengan arah yang lebih mengutamakan keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan strategi pemerintah dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem setempat (*community based forest management*) yang sekaligus merupakan upaya penyelamatan kelestarian hutan.

12. Teknik perubahan

Transformasi kesadaran sosio-edukasi yang berlangsung di TNGHS tidak secara langsung terjadi sebagaimana lazim dilakukan pendidikan formal di dalam kelas yang hanya bersifat dua arah. Pendekatan yang terjadi melalui pendidikan model orang dewasa (*andragogi*) yang menjadikan individu sebagai orang yang aktif dan terlibat dinamis dalam pembangunan ekologi. Hal yang penting juga adalah adanya perumusan kebijakan dan perencanaan program yang dapat memperkuat pemberdayaan sosial yang dilakukan masyarakat sekitar TNGHS.

Secara realistis, kerusakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di luar faktor-faktor yang bersifat alamiah, tampaknya tidak terlepas dari akibat campur tangan manusia. Tingkat pemahaman, perhatian, serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Taman Nasional, banyak dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Aspek-aspek struktural maupun kultural seringkali sangat berpengaruh terhadap persepsi maupun kepedulian masyarakat daerah penyangga terhadap Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Tingginya kesenjangan sosial akibat adanya stratifikasi sosial, dan polarisasi sosial merupakan suatu situasi yang perlu diwaspadai bagi kelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Bertahannya nilai-nilai dan norma-norma sebagai perwujudan budaya masyarakat, memiliki makna yang strategis bagi upaya-upaya pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kawasan budaya bisa menjamin kelangsungan hidupnya sendiri secara berkelanjutan jika kawasan budaya tersebut dapat memberikan manfaat kongkret bagi masyarakat sekitarnya. Hubungan antara warisan budaya, seperti keraton dengan masyarakat lokal seringkali tidak semata berupa pekerjaan (*employment*) dan pendapatan (*incomes*), tetapi kadang juga berupa persoalan kepemilikan tanah, hubungan antara hukum adat dan kebijakan pemerintah, relokasi, dan juga perubahan *lifestyles*.

Hal yang tak boleh dilewatkan dalam pengembangan budaya lokal adalah bahwa masyarakat lokal memang tak boleh diabaikan untuk berpartisipasi dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi dengan tetap menjamin pemeliharaan situs dan kawasan budaya sesuai dengan prinsip arkeologisnya. Konservasi saja tentunya tidak cukup memadai sehingga harus memberi makna kepada masyarakat bahwa masyarakat sekitar lah yang bisa menjadi pemelihara sejati bagi kawasan budaya. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar harus diajak melakukan kerjasama (*partnership*) dengan para profesional di bidang pemeliharaan dan pengembangannya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup sebenarnya telah berlangsung di tengah masyarakat sekitar kawasan. Meskipun, partisipasi dan derajat keterlibatannya beragam sesuai dengan keaneragaman kondisi dan situasi di tiap-tiap kawasan.

Konsep Pengembangan Masyarakat Berbasis Budaya dan Lingkungan Hidup sebenarnya telah berlangsung di dalam masyarakat sesuai dengan keberadaan mereka di dalam keragaman budaya dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Hanya saja, pelaku dan derajat keterlibatannya dalam pengembangan tersebut beragam seiring dengan perbedaan kondisi dan situasi di tiap-tiap daerah. Masyarakat telah memiliki inisiatif untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan kekayaan budaya. Adapun bentuk partisipasi mereka meliputi kegiatan pelestarian, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pemanfaatan kekayaan budaya. Faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kekayaan budaya adalah faktor agama, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah karena adanya keterbatasan dana masyarakat, lemahnya kemampuan, kurang terlibatnya semua pihak, dan kurangnya stimulus dari pemerintah.

Pola kerjasama pengembangan kekayaan budaya yang dimungkinkan berdasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) formal, artinya ada satu kesepakatan yang sifatnya mengikat, 2) berkelanjutan, memiliki dimensi jangka panjang dan simultan, dan 3) partisipatif, artinya melibatkan semua pelaku (*stakeholder*), meliputi: masyarakat, pemerintah, swasta, mediator, tokoh budaya/masyarakat.

Model kerjasama yang dilakukan harus memiliki sifat: 1) tidak harus seragam, artinya satu model tidak harus cocok untuk semua situasi dan kondisi tempat; 2) adanya standar minimal, yaitu memiliki unsur-unsur pokok, yaitu para pelaku, mekanisme kerja dan program utama, dan jangka waktu tertentu; dan 3) dinamis, yaitu memiliki kemungkinan dan fleksibilitas untuk disesuaikan dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi.

Dari enam lokasi penelitian dapat dirinci bahwa dua lokasi yaitu Saung Angklung Udjo, Wisata Bunga Cihideung, Sentra Golok Galonggong Manonjaya, dan Sentra Ikan Rancapanggung Cililin itu masuk dalam model pembangunan masyarakat lokal. Karakteristik utamanya adalah aktor utama yang merintis arena tersebut adalah berdasarkan inisiatif masyarakat lokal. Dalam terminologi pembangunan sosial, itu disebut sebagai pembangunan model *bottom up*. Berbeda dengan empat lokasi tersebut, Keraton Kasepuhan Cirebon dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berada pada ranah perencanaan sosial. Model ini tidak lagi berbasiskan inisiatif lokal, tetapi dibangun atas perencanaan sosial yang dilakukan oleh berbagai kekuatan formal maupun informal. Keduanya menjalin sinergi yang harmonis dalam mendinamiskan peran sosial Keraton Kasepuhan Cirebon dan TNGHS.

B. Implikasi Kajian

Konsep Pemberdayaan Masyarakat adalah bagian konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Pemberdayaan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat dapat membentuk iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat nasional sampai desa sampai menjadi nilai yang *inherent* pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat; begitu juga, desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat.

Hal-hal di atas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan. Hal ini juga merupakan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marginal. Usaha kecil menengah yang berbasis masyarakat merupakan keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut, untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan managerial, juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marginal kepada pihak lainnya sehingga akses penduduk miskin terbuka lebar. Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marginal dengan membangun prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah pembangunan fisik diarahkan untuk daerah tertinggal.

Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Efektif ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. Peranan Pemerintahan Daerah dapat diperkuat dengan cara membuka dialog yang lebih intens dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat. Begitu pula, pemerintah seyogianya membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri-sendiri. Terakhir, pemerintah mesti menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Peranan Pemerintahan Daerah, Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, Membangun partisipasi masyarakat . Berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada masyarakat sebanyak banyaknya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri sendiri. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. efektif Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian.

Industri kecil, sebagai bagian dari studi ekonomi dipandang dari aspek subkontrak, merupakan bagian praktek dari kegiatan ekonomi modern, mengkaji subkontrak ini telah menyebut kecenderungan untuk melahirkan ketergantungan searah.

Industri kecil, sebagai faktor non-ekonomi sesungguhnya juga telah adalah salah satu pendorong ekonomi. Misalnya, Sarmini (2003), yang melihat dari perspektif strategi adaptasi, sebenarnya di dalamnya juga telah terkandung pengertian gerakan sosial (social movement) yang sudah selayaknya mendapat perhatian yang memadai. Sayangnya fokus semacam ini belum dimunculkan dalam dalam komunikasi kelompok yang terjalin

Raharjana (2003) yang melihat ekonomi moral dan rasional dari para pelakunya. Sebenarnya ia, dapat menghadirkannya secara bersama-sama dalam dinamika dan dialektika ekonomi moral-rasional. hal memaparkan secara terperinci, misalnya perilaku yang anggota kemompon untuk memunculkan perilaku social dimana keberagaman belum dapat diterima secara terbuka, bentuk efektifitas dalam kelompok ini adalah mencapainya consensus bersama untuk memutuskan sesuatu sehingga produktifitas yang ada menghasilkan sebuah kemampuan untuk menghasilkan keputusan bersama.

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

C. Saran

Setelah menyimpulkan dan mempertimbangkan implikasi di atas, ada hal-hal yang perlu disarankan seperti berikut:

1. Pemerintah dituntut untuk senantiasa memperhatikan dengan penuh apresiasi dan memantau perkembangan perwujudan inisiatif masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya fasilitasi terhadap berbagai inisiatif masyarakat tersebut secara legal melalui perlindungan

peraturan-peraturan dan perlunya mengkaji secara kritis berbagai produk perundangan tentang kebudayaan sehingga memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan inisiatif dan keberdayaan dirinya.

2. Pemerintah, utamanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu meningkatkan perhatian terhadap pembinaan sumber daya manusia (terutama motif yang mendorong) dan penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menstimulasi daerah-daerah tertentu yang memiliki perhatian, komitmen, dan penganggaran di instansi masing-masing.
3. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memecahkan kebekuan komunikasi dengan menjadi mediator bagi para pelaku (*stakeholder*), baik masyarakat, dunia usaha, tokoh-tokoh masyarakat melalui berbagai aktivitas kebudayaan, seperti usulan model pengembangan kekayaan budaya, *expo* budaya, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aron, Raymond. 1965. *Main Currents in Sociological Thought 1*, Penguin Book, Harmondsworth.
- Aron, Raymond. 1965. *Main Currents in Sociological Thought 2*, Penguin Book, Harmondsworth.
- Bamberger, M. (Ed.). 2000. *Integrating Quantitative and Qualitative Research in Development Projects*. Directions in Development, Washington DC: The World Bank.
- Bangun, Wilson. 2010. *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung: Refika Aditama.
- Bottomore, T.B. 1971. *Classes in Modern Society*, Holt, Rinehart and Winston, London.
- Bottomore, T.B. 1966. *Elites and Society*, Penguin Book, Harmondsworth.
- Bottomore, T.B. 1962. *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, G. Allen & Unwin, London.
- Box, Steven. 1971. *Deviance, Reality and Society*, Holt, Rinehart and Winston, London.
- Cahyono, Tri, Bambang. 1983. *Pengelolaan Sumber Daya*. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta.
- Clinard, M.B. (ed). 1964. *Anomie and Deviant Behaviour*, Free Press, New York.
- Cohen, Percy, *Modern Social Theory*, Heinemann, London 1968.
- Comte, A., *The Positive Philosophy*, Trubner, London, 1853.
- Coser, L., *The Functions of Social Conflict*, Routledge & Kegan Paul, London, 1956.
- Coser, Lewis & Rosenberg, Bernard (eds.), *Sociological Theory A Book of Readings*, Macmillan, New York, 1969.
- Coser, Lewis, *Masters of Sociological Thought*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, `1971.
- Coughlin, Richard, *Double Identity: The Chinese in Modern Thailand*, Hong Kong University Press, Hong Kong, 1960.
- Cox, O.C. *Caste, Class and Class and Race*, Montly Review Press, New York, 1959.
- Dahrendorf, R., *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Routledge & Kegan Paul, London, 1959.
- Davison, G. dan Mc Conville, C. 1991. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen &Unwin.
- Deliarinov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labour in Society*, Free Press, New York, 1964.
- Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, Free Press, New York, 1964.
- Gerth, H.H. & Mills, C. Wright (eds), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Routledge & Kegan Paul, London, 1970.
- Gibbs, J.P. "The Study of Norm," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 11, Macmillan & Free Press, New York, 1968.

- Giddens, A. (ed.), *Positivism and Sociology*. Heinemann, London, 1974.
- Hardcastle, D.A., Powers, P.R., and Wenocur, S. 2004. *Community practice: theories and skills for social workers —2nd ed.* New York: Oxford University Press.
- Herskovits, M.J., *Cultural Anthropology*, Knopf, New York, 1955.
- Hikmat, Harry. 2005. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Howard, A.M., *Caste: A Comparative Study*, Russel & Russell, New York, 1968.
- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ishomuddin. 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karmadi, Agus Dono, *Budaya Lokal Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya*. (Makalah tidak dipublikasikan).
- Linton, R. (ed.), *The Science of Man in the World Crisis*, Columbia University Press, New York, 1945.
- Linton, Ralph, *The Study of Man*, Appleton Century, New York, 1936.
- Lipset, S.M. & Bendix, R., *Social Mobility in Industrial Society*, University of California Press, Berkeley, 1959.
- Lipsey, Richard G., dkk. 1988. *Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara.
- MacIver, R.M. & Page, D.H., *Society: An introductory Analysis*, Macmillan, New York, 1969.
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1957.
- Miller, S.M. "Comparative Social Mobility," *Current Sociology*, Vol. IX, No 1, 1960.
- Mills, C. Wright, *The Power Elite*, Oxford University Press, New York, 1956.
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mosca, G., *The Ruling Class*, McGraw-Hill, New York, 1939.
- Mustari, Mohamad, and M. Taufik Rahman. *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress, 2010.
- Muttaqin, Tatang, et. al., *Studi Pengembangan Kekayaan Budaya Berbasis Masyarakat* (Laporan Penelitian). Direktorat Pariwisata, Pemuda dan Budaya, Bappenas (tidak dipublikasikan).
- Narwoko, J. Dwi, dkk. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1985. *Metode Research*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Zulkarnaen. 1988. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Neuman, Lawrence W. 1994. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society*, Dover, New York 1963.

- Parson, Talcott, *The Social System*, Routledge & Kegan Paul, London, 1951.
- Parsons, T. & Shils, E., *Towards a General Theory of Action*, Harper, New York, 1962.
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd edition, London: Sage.
- Philipus, Ng., dkk. 2006. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pitana, I. Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Popper, Karl, *Poverty of Historicism*, Routledge & Kegan Paul, London, 1961.
- Punch, K. F. 1998. *Introduction to Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Radcliffe Brown, A.R., *Structure and Function in Primitive Society*, Cohen & West, London, 1968.
- Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. 2011.
- Rahman, M. Taufiq. "Pesantren: Dari Desa Ke Kota." *Risalah* 41.2 (2003): 17-21.
- Rahman, Bustami dan Yuswadi, Hary. 2000. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jember: Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat – FISIP – Universitas Jember.
- Rescher, N. "On Prediction and Explanation", *English Journal of the Philosophy of Science*, 8, hlm. 281-290, 1958.
- Rex, John, "The Plural Society in Sociological Theory", *English Journal of Sociology*, Vol. 10, No. 2, 1959.
- Rex, John, *Key Problems of Sociological Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1961.
- Rex, John, *Race Relation in Sociological Theory*, Weidenfeld & Nicolson, London, 1970.
- Riesman, D. et.al., *The Lonely Crowd*, Yale, University Press, New Haven, 1950.
- Robertson, Roland (ed.), *Sociology of Religion*, Penguin Books, Harmondsworth, 1969.
- Rothman, J., & Tropman, J. 1987. Models of community organization and macro practice perspectives: Their mixing and phasing. In F. Cox, J. Erlich, J. Rothman, & J. Tropman (Eds.), *Strategies of community organization* (4th ed., pp. 3–26). Itasca, IL: P. E. Peacock.
- Runciman W.G., *Relative Deprivation and Social Justice*, Routledge & Kegan Paul, London, 1966.
- Smith, L. 1996. "Significance Concepts in Australian Management Archaeology" dalam L. Smith dan A. Clarke (eds). *Issues in Management Archaeology*. Tempus, vol 5.
- Smith, M.G., *The Plural Society in the English West Indies*, University of California Press, Berkeley, 1965.
- Srinivas, M.N., *Caste in Modern India and Other Essays*, Asia Publishing House, Bombay, 1962.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat – Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

- Suwarsono & Alvin Y.So. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1982. *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Travers, Max. 2001. *Qualitative Research Through Case Studies*, London:Sage Publications.
- Tylor, E.B., *Primitive Culture*, Murray, London 1929.
- Van den Berghe, P.L., *Race and Racism*, John Wiley, New York, 1967.
- Weber, Max, *The Methodology of the Social Sciences*, Free Press New York, 1949.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, Free Press, New York, 1947.
- Wells, Alan (1970), *Social Institutions*, Heinemann, London, 1970.
- Wicaksono, Andhie, *Inisiatif Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Budaya: Kasus Desa Miau Baru* (tidak dipublikasikan).
- www.disparbud.jabarprov.go.id
- www.golokgalonggongtulen.blogspot.com
- www.kompas.com
- www.madani-ri.com
- www.pustakabersama.net
- www.saung-angklung.com
- www.wikipedia.com
- Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yogi, Ms. 2004. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Kencana.